



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

OPTIMALISASI KEGIATAN AGENDA SETTING BAGI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMBERITAAN DI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN MELALUI PENETAPAN ISU (OPTIK SETIA)

Disusun oleh :

Nama : Suciati, S.Sos.
NIP : 197207201994032002
INSTANSI : Sekretariat Jenderal DPR RI

**PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIKA INDONESIA**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suciati, S.Sos.

NIP : 197207201994032002

Jabatan : Kepala Subbagian Analis Media

Unit Kerja/ Instansi : Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia


Adalah peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, dengan judul Proyek Perubahan:

"Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu."

Dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan Proyek Perubahan yang merupakan *output* dari pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019, saya menyatakan bahwa target sasaran jangka menengah dan jangka panjang Proyek Perubahan tersebut di atas akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sasaran Kinerja Pegawai.


Mengetahui

Mentor/Atasan Langsung,


Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP.196510311994031002

Jakarta, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,


Suciati, S.Sos.
NIP.197207201994032002



**LEMBAR PERSETUJUAN
PROYEK PERUBAHAN**

**OPTIMALISASI KEGIATAN AGENDA SETTING
BAGI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMBERITAAN
DI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN MELALUI PENETAPAN ISU
(OPTIK SETIA)**

Disusun oleh :

Nama : Suciati, S.Sos.
NIP : 197207201994032002
INSTANSI : Sekretariat Jenderal DPR RI

Peserta Diklat



(Suciati, S.Sos)

Menyetujui

Mentor



(Drs. Mohammad Djazuli, M.Si)

Menyetujui

Coach



(Dra. Puji Hastuti, M.Pd.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan ridho dan rahmat-Nya, Proyek Perubahan (Proper) dapat selesai tepat pada waktunya dan berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan judul **OPTIK SETIA (Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu)**.

Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan ini disusun sebagai salah satu syarat memenuhi kewajiban kurikuler dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Penulis meminta maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan Laporan Pelaksanaan "**Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu**". Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar pelaksanaan Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting dapat terus ditingkatkan dan menjadi lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan proyek perubahan ini, terutama kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI Ferdiansyah, Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Damayanti, Kepala Pusat Diklat Setjen DPR RI Rahaju Setya Wardani, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen YOI Tahapari, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohamad Djazuli, Kepala Subbagian Media Cetak Sugeng Irianto, Kepala Subbagian Media Sosial dan Website Nita Juwita, Kepala Subbagian Program dan Produksi TV Parlemen Bayu Setiadi, Kepala Subbagian Radio Parlemen, Pranata Humas Setjen DPR RI, Redaksi, Redaktur, Reporter, Fotografer, dan Kameramen di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen, teman-teman di Subbagian Analis Media DPR Achyar Tibi, Sunarya, Fahmi, Mohammad Rizki, Deprisa, Natasa, Larissa, dan Safitri, serta Staf Admin Medtaksos yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Proyek Perubahan dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini. Semoga Proyek Perubahan ini dapat membantu serta mengoptimalkan kegiatan agenda setting di Biro Pemberitaan Parlemen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN DAN MANFAAT	9
3. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	10
4. RUANG LINGKUP	14
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	15
1. MILESTONE PROYEK PERUBAHAN.....	15
2. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER, TIM EFEKTIF, DAN TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN.....	18
3. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN.....	24
4. STRATEGI KOMUNIKASI	25
BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	27
1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN.....	27
2. KRITERIA KEBERHASILAN.....	30
3. KENDALA/MASALAH DAN STRATEGI MENANGANI KENDALA/MASALAH.....	30
4. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.....	31
BAB IV PENUTUP	33
1. KESIMPULAN	33
2. REKOMENDASI	33
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATARBELAKANG

A. Gambaran Organisasi

Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, mengisyaratkan perubahan struktur organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Perubahan struktur organisasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan BK DPR) adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, Sekretaris Jenderal DPR telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016.

Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang administrasi dan persidangan, Setjen DPR menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR serta perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi.

Deputi Bidang Persidangan merupakan salah satu Deputi dalam Struktur Organisasi Setjen DPR RI, memiliki tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan

kepada DPR. Untuk terselenggaranya tugas tersebut, Deputi Persidangan didukung oleh 5 (lima) Biro, yaitu : Biro Persidangan I; Biro Persidangan II; Biro Kerja Sama Antar Parlemen; Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan Biro Pemberitaan Parlemen.

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan informasi, dilaksanakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019, Biro Pemberitaan Parlemen diberi mandat pada agenda perubahan 8 (delapan) yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana Biro Pemberitaan Parlemen harus mampu menyesuaikan dengan indikator spesifik dari pelayanan publik, seperti standart pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberitaan Parlemen, yaitu:

- a. Penerapan pelayanan publik terintegrasi;
- b. Penguatan kualitas pelayanan publik;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

Sedangkan Visi dan Misi Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

1) Visi

Rumusan visi dan misi Biro Pemberitaan Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus yang telah ditetapkan yaitu:

“PENYAMPAIAN BERITA DAN LAYANAN INFORMASI YANG KREDIBEL”.

2) Misi

Misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu :

- a. Meningkatnya pengelolaan informasi DPR di media cetak dan media sosial;
- b. meningkatnya pengelolaan penerangan dan pelayanan informasi publik yang profesional dan akuntabel.
- c. meningkatkan penyelenggaraan peliputan, pemberitaan mengenai kegiatan DPR dan Setjen dan BK DPR RI melalui media televisi dan radio secara akurat agar diketahui masyarakat.
- d. meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan penerbitan yang maju dan profesional.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pelayanan informasi, bila dikaitkan dengan visi dan misi di atas, maka Biro Pemberitaan Parlemen dalam penyelenggaraan pemberitaan dan pelayanan informasi harus kredibel, artinya informasi yang disampaikan berkualitas, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Biro Pemberitaan Parlemen didukung oleh 4 (empat) unit kerja sebagai berikut:

1) Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Menyusun bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media, melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media.

Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Media Cetak;
- b. Subbagian Media Sosial dan Website; dan
- c. Subbagian Analisis Media.

2) Bagian Humas

Mempunyai tugas melaksanakan penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik, melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik dan pelaksanaan kehumasan.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Penerangan; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi Publik.

3) Bagian Penerbitan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. Fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang penerbitan; pelaksanaan proses produksi; dan pelaksanaan distribusi produk terbitan.

Bagian Penerbitan terdiri atas:

- a. Subbagian Produksi; dan
- b. Subbagian Distribusi.

4) Bagian Televisi dan Radio (TVR) Parlemen

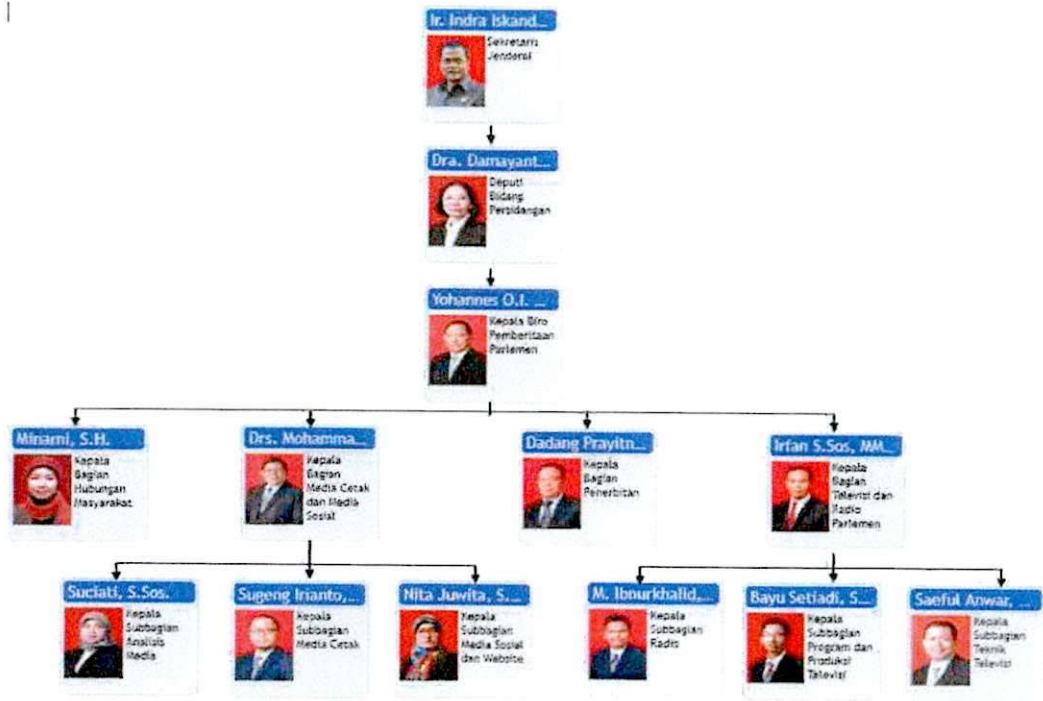
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan televisi dan radio. Fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; pengelolaan program dan produksi televisi; dan pengelolaan teknik televisi;

Bagian Televisi dan Radio Parlemen terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Produksi Televisi;
- b. Subbagian Teknik Televisi; dan
- c. Subbagian Radio.

Dari keempat unit kerja tersebut, yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemberitaan ada pada Bagian Media Cetak dan Media Sosial dan Bagian Televisi dan Radio Parlemen. Sementara yang memiliki peran dalam pelayanan informasi ada pada Bagian Humas.

C. Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen

D. Tupoksi Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Pasal 235 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, menyebutkan tugas Bagian Media Cetak dan Media Sosial adalah mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website, serta melaksanakan analisis media. Selanjutnya Pasal 236 menyatakan, dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- Menyusun bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- Melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;

- d. Melaksanakan dukungan pemberitaan di media cetak;
- e. Melaksanakan dukungan pemberitaan di media sosial dan website;
- f. Melaksanakan analisis media;
- g. Melaksanakan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan; dan
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;

Selanjutnya pada Pasal 237 dijelaskan Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas Sub Bagian Media Cetak, Sub Bagian Media Sosial dan Website, dan Sub Bagian Media Analisis. Lebih lanjut, Pasal 238 menerangkan tugas masing-masing Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Media Cetak : mengelola pemberitaan di media cetak
- b. Sub Bagian Media Sosial : mengelola pemberitaan di media sosial dan website
- c. Sub Bagian Analisis Media : melakukan analisis media dan melaksanakan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial

E. Tupoksi Sub Bagian Analis Media

Sebagaimana Pasal 238 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tugas pokok Sub Analis Media adalah melakukan analisis media dan melaksanakan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Untuk melaksanakan tugas dan pokok di atas, Sub Analis Media melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kliping berita
- 2. Analisis Media Cetak
- 3. Analisis Media Online
- 4. Ikhtisar Berita
- 5. Rekomendasi Isu Aktual
- 6. Agenda Setting

Kegiatan analisis media cetak dan media online dilaksanakan untuk menganalisis pemberitaan terkait fungsi dan tugas Dewan di 8 (delapan) media cetak nasional antara lain : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jawa Pos, Aktual, Rakyat Merdeka, dan Koran Sindo dan 8 (delapan) media online antara lain : antaranews.com, detik.com, vivanews.com, RMOL, CNNIndonesia, republika.co.id, tribunenews.com dan liputan6.com. Sementara kegiatan ikhtisar merupakan *summary* atas berita-berita terkait DPR di media-media tersebut.

Signifikansi dari kegiatan ini adalah analisis media dapat digunakan sebagai instrumen pembentuk *agenda setting* dan sebagai data pembanding untuk melakukan kajian dan analisis yang mendalam. Selanjutnya, hasil analisis media ini juga menjadi instrumen penting bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini Pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal DPR RI dan Biro Pemberitaan DPR RI. Analisis media yang disajikan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan sehingga akan mempermudah proses penyampaian informasi kepada publik. Analisis media juga membantu pemangku kepentingan untuk menilai berbagai tendensi media, bagaimana media membingkai berita tersebut yang kemudian berpengaruh kepada pembentukan opini publik.

Pada proyek perubahan ini, penulis memfokuskan pada kegiatan agenda setting. Kegiatan agenda *setting* yang outputnya adalah manajemen isu dilaksanakan setiap hari Jumat. Dalam penyusunan *agenda setting* dan manajemen isu terdapat beberapa hal yang dikaji diantaranya:

- a. *Hot issues* yaitu berita terkait masalah atau pokok persoalan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dalam media cetak, media online, dan media sosial.
- b. Agenda/isu internal DPR RI dalam seminggu, diantaranya isu fungsi pengawasan, legislasi, budgeting, dan isu fungsi lain-lain (di luar ketiga fungsi utama DPR dan terkait kesetjanaan DPR RI).
- c. Editorial di media massa.
- d. Potensi isu berlanjut dan potensi isu baru yang akan diangkat oleh media seminggu ke depan.
- e. Rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Biro Pemberitaan DPR dan seluruh jajaran Biro Pemberitaan DPR RI terkait untuk mempersiapkan materi terkait dengan potensi isu yang akan berkembang di media dan publik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Analis Media tersebut, ditemukan beberapa kondisi pada kegiatan agenda setting yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2016-2019, yaitu :

Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal Yang Diharapkan	Solusi
1.Kegiatan Agenda Setting merupakan kegiatan internal Analis Media	1.Kegiatan Agenda Setting merupakan kegiatan Biro Pemberitaan Parlemen	Mengoptimalkan kegiatan agenda setting dengan melibatkan seluruh unit penyelenggara pemberitaan di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen untuk menetapkan isu yang akan dikelola menjadi berita bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.
2.Penyelenggara pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen belum dilibatkan dalam kegiatan agenda setting	2.Kegiatan Agenda Setting melibatkan seluruh unit penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen	
3.Isu yang dihasilkan Kegiatan Agenda Setting Analis Media belum dijadikan materi isu dalam penyelenggaraan pemberitaan di media internal DPR	3.Isu yang ditetapkan di Kegiatan Agenda Setting menjadi isu utama dalam penyelenggaraan pemberitaan di media internal DPR, sehingga isunya sama di semua media internal DPR	
4.Isu yang dihasilkan kegiatan agenda setting dinilai tidak sesuai dengan kriteria isu media internal DPR	4.Isu yang ditetapkan pada kegiatan agenda setting merupakan isu yang bermanfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen	
5.Kurangnya variasi isu di media internal DPR, berita masih berdasarkan agenda kegiatan Dewan dan Setjen	5.Pemberitaan di media internal isunya bervariasi.	

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas, maka proyek perubahan ini mengambil **judul : Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu (Optik Setia).**

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Proyek Perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut :

- **Jangka Pendek (2 bulan)**

Terwujudnya kegiatan agenda setting yang melibatkan seluruh unit penyelenggara pemberitaan untuk menetapkan isu utama yang akan dikelola di media internal DPR secara optimal.

- **Jangka Menengah (6 bulan – 1 tahun)**

Adanya kesamaan isu dalam penyelenggaraan pemberitaan di semua media internal DPR.

- **Jangka Panjang (> 1 tahun)**

Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

Sementara proyek perubahan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain :

- 1) Meningkatkan kinerja Sub Analis Media dan seluruh penyelenggara pemberitaan;
- 2) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen;
- 3) Pemberitaan di media DPR memiliki isu yang sama;
- 4) Pemberitaan yang disampaikan kepada publik akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Berita yang disampaikan oleh media DPR dapat mempengaruhi persepsi publik pada dewan, dan merubah kepercayaan publik pada dewan.

Berita yang disampaikan secara komprehensif oleh seluruh media DPR menggambarkan bahwa DPR bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya. Informasi yang disampaikan kepada publik tersebut akan memasuki alam pikiran publik, disadari atau tidak dapat mempengaruhi persepsi masyarakat

tentang Dewan. Setelah persepsi masyarakat menjadi baik, tentunya kepercayaan publik pada Dewan pun akan berubah menjadi positif.

3. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh berbagai media yang menyampaikan ragam informasi dan berita yang kemudian memasuki alam pikiran kita. Disadari atau tidak, media terutama media massa mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa atau isu dalam masyarakat. Artinya media massa berkuasa mempengaruhi audience.

Banyak teori media yang menyatakan bahwa media massa berkuasa mempengaruhi audience, salah satunya Teori Agenda Setting Mc Combs & Shaw, yang menyatakan media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audience yang terkena terpaan informasi, dan media massa mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media.

Pendekatan Agenda Setting dimulai dari asumsi bahwa media massa menyaring berita, siaran, artikel, atau tulisan yang akan dipublikasikan. Seleksi ini dilakukan oleh para awak media.

Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul. Idealnya, media tak sekedar menjadi sumber informasi bagi publik. Namun juga memerankan fungsi untuk mampu membangun opini publik secara kontinyu tentang persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan satu persoalan secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan.

Menurut teori agenda setting, media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap tetapi dengan fungsinya sebagai *gate keeper* (penjaga gawang atau penyaring) yang memilih suatu topik dan persoalan tertentu dan mengabaikan yang lain. Dengan menonjolkan suatu persoalan tertentu dan mengesampingkan yang lain tersebut, media membentuk citra atau gambaran dunia seperti yang disajikan dalam media massa (Rakhmat, 1989:259-

260). Ini berarti media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang dan mempengaruhi persepsi khalayak tentang yang dianggap penting.

Saat ini media masa (cetak, elektronik dan siber) disingkat media, mudah diakses oleh siapa pun. Hal ini menjadikan media menjadi salah satu asset dalam menyebarluaskan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Informasi yang diakses masyarakat luas tersebut, juga tidak luput dari pemberitaan positif dan negatif tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Biro Pemberitaan Parlemen sebagai penyelenggara pemberitaan harus mampu berperan mengimbangi pemberitaan DPR di media. Bagaimana membangun kepercayaan publik dan memperbaiki citra lembaga DPR menjadi prioritas. Media Internal DPR/Media DPR (Buletin dan Majalah Parlementaria, TV dan Radio Parlemen, Website DPR dan Media Sosial DPR) di bawah Biro Pemberitaan Parlemen memegang peranan penting. DPR sebagai lembaga representatif harus dapat dipercaya.

Pesatnya perkembangan media massa saat ini, maka media DPR dituntut untuk lebih cepat dan akurat melakukan penyampaian informasi mengenai fungsi dewan yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini menuntut kecepatan dan keakuratan dari seluruh unit yang terkait dalam penyiapan, pengolahan dan penyampaian berita.

Terkait hal tersebut, sasaran Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen salah satunya adalah meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemberitaan DPR RI dan Setjen DPR RI melalui media cetak, sosial, televisi dan radio.

Sub Analis Media merupakan salah satu unit kerja dibawah Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Sub Analis Media memiliki tugas pokok menganalisis pemberitaan DPR di media cetak dan media online. Tujuan dari kegiatan analisis media adalah untuk mengetahui *trend* berita (*tone* berita, isu, *headlines*, jumlah berita, *newsmaker*) dan implikasi *trend* berita serta memberikan rekomendasi terkait dengan implikasi berita tersebut.

Analisis media merupakan pengkajian atas isu yang berkembang di media massa yang meliputi analisis atas *framing* dan *issue setting*, sehingga pengguna dapat membandingkan isi berita dari satu media dengan media lainnya, dan mendapatkan berita yang lebih berimbang. Signifikansi dari kegiatan ini adalah

analisis media dapat digunakan sebagai instrumen pembentuk *agenda setting* dan sebagai data pembanding untuk melakukan kajian dan analisis yang mendalam.

Dalam rangka mengikuti perkembangan pemberitaan media massa, analisis media menjadi instrumen penting bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini Pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal DPR RI dan Biro Pemberitaan DPR RI. Analisis media yang disajikan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan sehingga akan mempermudah proses penyampaian informasi kepada publik. Analisis media juga membantu pemangku kepentingan untuk menilai berbagai tendensi media, bagaimana media membingkai berita tersebut yang kemudian berpengaruh kepada pembentukan opini publik.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, kegiatan yang dilakukan Sub Analisis Media antara lain : menyiapkan pelayanan rekomendasi isu aktual yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, analisis media cetak, analisis media *online*, ikhtisar media, kliping media, agenda setting. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Kegiatan agenda *setting* yang outputnya adalah manajemen isu dilaksanakan setiap hari Jumat, terdapat beberapa hal yang dikaji antara lain *hot issues*, agenda/isu internal DPR RI dalam seminggu, editorial di media massa, potensi isu berlanjut dan potensi isu baru yang akan diangkat oleh media seminggu ke depan.

Manajemen Isu hasil kegiatan agenda setting dari Sub Analisis Media disampaikan kepada Pimpinan Dewan, Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemberitaan.

Menurut penulis, idealnya manajemen isu hasil kegiatan agenda setting ini ditetapkan menjadi isu yang akan dikelola dalam penyelenggaraan pemberitaan di media internal DPR. Sehingga berita yang disampaikan kepada publik oleh seluruh media DPR akan menyampaikan isu yang sama, sehingga akan terjadi konvergensi.

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan kemajuan media saat ini, dimana demi terwujudnya cita-cita yang ingin dicapai memanfaatkan peran multimedia. Kondisi konvergensi media dalam produksi berita merupakan kondisi yang umum dilakukan media.

Konvergensi berarti penyatuan antara media cetak, online, televisi dan radio yang menggunakan platform silang. Artinya, konten media dalam hal ini adalah isu dapat dimuat pada berbagai jenis media. Konvergensi mengubah cara pembuatan berita. Konten dapat dengan mudah dibagi antar media baik itu untuk cetak, sosial, web, radio dan televisi.

Menurut penulis upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen adalah mengoptimalkan kegiatan agenda setting di Sub Analis Media. Kegiatan agenda setting ini akan optimal, jika melibatkan dan didukung oleh seluruh elemen penyelenggara pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

Agar kegiatan ini didukung dan melibatkan penyelenggara pemberitaan, maka harus dibentuk dan disusun Tim Efektif atau Tim Kerja yang terdiri dari perwakilan seluruh penyelenggara pemberitaan yang akan melaksanakan tugas kegiatan agenda setting. Surat tugas ini agar mengikat pada anggota Tim, maka harus ditetapkan dengan sebuah surat tugas yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

Kegiatan agenda setting yang didukung dan melibatkan seluruh penyelenggara pemberitaan ini, akan menghasilkan materi isu yang lebih komprehensif baik dari sisi keaktualannya, nilai beritanya, pengaruhnya kepada organisasi maupun dampaknya kepada publik atau masyarakat luas. Kemudian isu yang ditetapkan dalam agenda setting ini akan dijadikan materi pokok dalam pengelolaan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen. Sehingga pemberitaan di semua media DPR isunya sama.

Selanjutnya penulis juga ingin menggambarkan, bahwa media DPR merupakan jendela informasi yang menginformasikan seluruh informasi tentang apa yang telah dilakukan dewan dan apa yang sedang diperjuangkan dewan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan bagi masyarakat luas. Namun kondisi saat ini, pemberitaan di seluruh media internal DPR masih didominasi berita kegiatan Dewan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, berita rilis dari Pimpinan dan Anggota Dewan. Pemberitaan media DPR masih minim isu. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu akibat belum adanya penetapan isu yang akan dikelola dalam penyampaian berita di media DPR.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- **Jangka Pendek**

1. Membentuk Tim Efektif
2. Melakukan Sosialisasi Proyek Perubahan kepada stakeholder internal
3. Melakukan Sosialisasi Proyek Perubahan kepada stakeholder eksternal
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama
5. Mewujudkan Surat Dukungan Proyek Perubahan
6. Menyusun Panduan/Petunjuk Teknis Kegiatan Agenda Setting
7. Melakukan uji coba kegiatan Agenda Setting
8. Melakukan uji coba Isu hasil kegiatan Agenda Setting bagi penyelenggaraan pemberitaan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agenda setting

- **Jangka Menengah**

Mengoptimalkan kegiatan agenda setting penetapan isu bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

- **Jangka Panjang**

Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen yang kredibel sesuai visi organisasi.

BAB II

DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

1. MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

Untuk memaksimalkan proyek perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu, akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan besar kegiatan beserta output yang dihasilkan, yaitu :

Jangka Pendek :

NO	MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PIC	OUTPUT	EVIDENCE	WAKTU
1	Membentuk Tim Efektif	1)Membuat Surat permintaan nama Tim Efektif dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen kepada Kabag Media Cetak dan Media Sosial, dan Kabag TV dan Radio Parlemen, dan Kabag Humas; 2)Mendistribusikan Surat Permintaan Nama Tim Efektif 3)Membuat Konsep Surat Tugas Tim Efektif 4)Final dan Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif 5)Pendistribusian Surat Tugas Tim Efektif	Staf Analisis Media	-Terbentuknya Tim Efektif	-Surat permintaan Nama Tim Efektif -Surat Tugas Tim Efektif	Kamis 16 Mei 2019
2	Rapat Tim Efektif dengan agenda : a.Sosialisasi Proyek Perubahan; b.Menyamakan persepsi;	1)Persiapan pertemuan 2)Membuat undangan rapat 3)Pendistribusian undangan 4)Membuat Daftar hadir 5)Pelaksanaan Rapat Tim Efektif	Staf Analisis Media (persiapan kegiatan) & Project	-Tersosialisasikannya Proper Terwujudnya Persepsi yang sama -	-Surat Undangan -Daftar hadir -Foto Rapat Tim -Notulen	Selasa, 21 Mei 2019

	c.Membangun komitmen bersama;		Leader (PL)	Terbangun nya Komitmen Bersama		
3	Rapat Tim Efektif dengan agenda menyusun petunjuk teknis/panduan kegiatan agenda setting	1)Persiapan pertemuan 2)Membuat undangan rapat 3)Pendistribusian undangan 4)Membuat Daftar hadir 5)Pelaksanaan Rapat Tim Efektif penyusunan panduan kegiatan	Staf Analis & PL	Draft Panduan / Petunjuk Teknis Agenda Setting	-Surat Undangan Rapat Tim -Daftar hadir -Foto Rapat Tim -Draft Panduan Agenda Setting -Notulen	Kamis, 23 Mei 2019
4	Membuat Surat Dukungan Proyek Perubahan	a.Membuat surat dukungan proyek perubahan b.Menghadap Mentor	Staf Analis Media & PL	-Surat Dukungan Proper	-Surat Dukungan Proyek Perubahan -Foto dengan Mentor	Jumat, 24 Mei 2019
5	Uji Coba (1) kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kepada Tim Efektif c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (1) kegiatan Agenda Setting	Staf Analis Media & PL	Draft Materi Isu (hasil uji coba 1)	-Surat Undangan -Daftar hadir -Foto -Notulen -Draft materi isu (Uji coba 1)	Jumat, 21 Juni 2019
6	Uji Coba (1) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media DPR	a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan; b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber	Redak - tur / Redak si	Berita di media DPR isunya sama	-Foto Berita di semua media DPR	Senin – Jumat, 24-28 Juni 2019

		(Pimpinan/Anggota DPR) c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi d.Redaktur/Redaksi melakukan pengeditan pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR				
7	Monitoring dan Evaluasi hasil uji coba (1) Rapat Agenda Setting Penetapan Isu	Melakukan monitoring dan evaluasi	Project Leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (1)	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (1)	Senin, 1 Juli 2019
8	Uji Coba (2) kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kepada Tim Efektif c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (2) kegiatan Agenda Setting	Staf Analis Media (untuk persiapan kegiatan) & PL	Draft Materi Isu (hasil uji coba 2)	-Surat Undangan -Daftar hadir -Foto -Notulen -Draft Materi Isu (hasil uji coba 2)	Jumat, 5 Juli 2019
9	Uji Coba (2) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media DPR	a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan; b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi d.Redaktur/Redaksi mengedit pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR	Redaktur / Redaksi	Berita di media DPR Isunya sama	-Foto Berita di semua media DPR	Senin – Jumat, 8-12 Juli 2019

10	Monitoring dan Evaluasi hasil uji coba (2) Rapat Agenda Setting Penetapan Isu	Melakukan monitoring dan evaluasi	Project Leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (2)	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (2)	Senin, 15 Juli 2019
----	---	-----------------------------------	----------------	--	--	---------------------

Jangka Menengah :

1	Mengoptimalkan kegiatan agenda setting penetapan isu bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen. (Sustainable)		-Berita di media internal DPR isunya sama
2	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh project leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring

Jangka Panjang :

1	Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik pada dewan.		Berita di media DPR semakin berkualitas
2	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh project leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring

2. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER, TIM EFEKTIF DAN TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

A. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder pada Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan

Parlemen melalui Penetapan Isu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu stakeholder Internal dan stakeholder eksternal.

Stakeholder internal pada proyek perubahan ini terdiri dari :

- Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
- Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
- Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen
- Kepala Sub Bagian Media Cetak
- Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website
- Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV Parlemen
- Kepala Sub Bagian Radio Parlemen
- Staf Analis Media
- Redaktur dan Reporter Media Cetak
- Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website
- Redaksi dan Reporter TV Parlemen
- Redaksi dan Reporter Radio Parlemen
- Pranata Humas

Stakeholder eksternal pada proyek perubahan ini terdiri dari :

- Pimpinan dan Anggota DPR RI
- Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI
- Masyarakat
- Media Massa

Dari identifikasi stakeholder kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori yang berpengaruh terhadap proyek perubahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kekuatan		Kepentingan		Kategori
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1.	Pimpinan dan Anggota DPR RI	V			V	<i>Latens</i>

2.	Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	V			V	<i>Latens</i>
3.	Deputi Persidangan	V			V	<i>Latens</i>
4.	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	V		V		<i>Promotor</i>
5.	Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial	V		V		<i>Promoter</i>
6.	Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen	V		V		<i>Promotor</i>
7.	Kepala Sub Bagian Media Cetak		V	V		<i>Defenders</i>
8.	Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website		V	V		<i>Defenders</i>
9.	Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
10.	Kepala Sub Bagian Radio Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
11.	Staf Analis Media		V	V		<i>Defenders</i>
12.	Redaktur dan Reporter Media Cetak		V	V		<i>Defenders</i>
13.	Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website		V	V		<i>Defenders</i>
14.	Redaksi dan Reporter TV Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
15.	Redaksi dan Reporter Radio Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
16.	Pranata Humas		V	V		<i>Defenders</i>
17.	Masyarakat		V		V	<i>Apathetics</i>
18.	Media Massa		V		V	<i>Apathetics</i>

Keterangan :

- 1) **Promotor** memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan besar untuk membantu membuatnya berhasil (menggagalkannya).
- 2) **Defenders** memiliki kepentingan besar terhadap program dan menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program.
- 3) **Latents** tidak memiliki kepentingan/minat khusus maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program.
- 4) **Apathetics** kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan.

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan setiap stakeholders pada proyek ini dapat dikelompokkan pada diagram kelompok stakeholders sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kepentingan	Tingkat Kepentingan (T/R)	Sikap Dukungan (+), (-), (+/-)	Peran yang diharapkan	Dampak terhadap Upaya/Posisi SH (P, L, D, A)	Strategi Komunikasi
Internal							
1	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	Memudahkan dalam mengambil kebijakan	Tinggi	+	Membantu mengkomunikasikan PP terhadap stakeholder	Promotor	Manage Closely (konsultasi intensif)
2	Kabag Media Cetak dan Media Sosial	Membantu dalam mengambil kebijakan dan koordinasi	Tinggi	+	Membantu dalam membuat keputusan dan koordinasi	Promotor	Manage Closely (diskusi, konsultasi intensif)
3	Kabag TV dan Radio Parlemen	Membantu dalam koordinasi	Tinggi	+	Membantu dalam koordinasi	Promotor	Manage Closely (diskusi, konsultasi intensif)
4	Kasubag Media Cetak	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, konsultasi, komunikasi intensif)
5	Kasubag Media Sosial dan Website	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, konsultasi,

		kegiatan					komunikasi intensif)
6	Kasubag Program dan Produksi TV Parlemen	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, konsultasi, Komunikasi intensif)
7	Kasubag Radio Parlemen	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, Konsultasi, Komunikasi intensif)
8	Staf Media Analisis	Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Tinggi	+/-	Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta berkontribusi pada isu	Defender	Manage Closely (diskusi, komunikasi intensif)
9	Redaktur dan Reporter Media Cetak	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, komunikasi intensif)
10	Redaktur dan Reporter Media Sosial & Website	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, komunikasi intensif)
11	Redaksi dan Reporter TV Parlemen	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, Komunikasi intensif)
12	Redaksi dan Reporter Radio Parlemen	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, Komunikasi intensif)
13	Pranata Humas	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu	Defender	Manage Closely (Diskusi, Komunikasi intensif)
Eksternal							

1	Pimpinan dan Anggota DPR	Sebagai Penerima manfaat	Tinggi	+	Memberikan dukungan pada kegiatan dan hasilnya	Laten	<i>Keep Informed</i> (Persuasif, Memberikan informasi)
2	Sekjen DPR	Bertanggung Jawab dalam memberikan dukungan	Tinggi	+	Memberikan dukungan kegiatan pemberitaan	Laten	<i>Keep Informed</i> (Persuasif, Memberikan informasi)
3	Deputi Persidangan	Bertanggung Jawab dalam memberikan dukungan	Tinggi	+	Memberikan dukungan kegiatan pemberitaan	Laten	<i>Keep Informed</i> (Persuasif, Memberikan informasi)
4	Masyarakat	Sasaran	Rendah	-	Dapat memberikan penilaian positif	Apathetic	Memberikan informasi secara terus-menerus
5	Media Massa	Sasaran	Rendah	-	Dapat memberikan penilaian positif	Apathetic	Memberikan informasi secara terus-menerus

B. Tim Efektif

Sumber Daya Tim

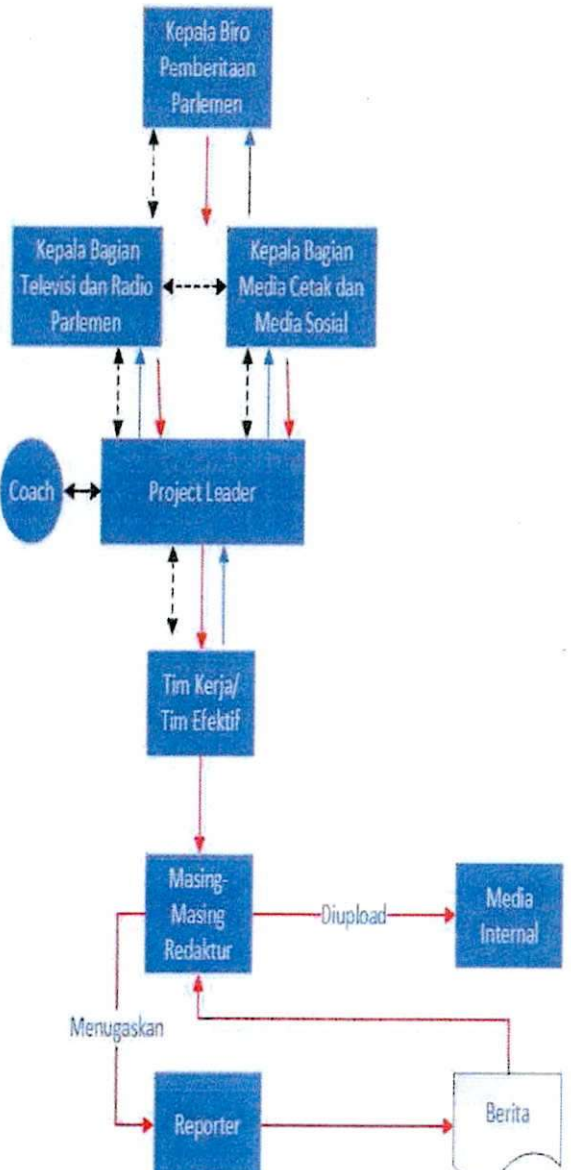
INTERNAL : 1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

1. Kepala Sub Bagian Media Cetak
2. Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website
3. Staf Analis Media
4. Redaktur dan Reporter Media Cetak
5. Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website

EKSTERNAL : 1. Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen

2. Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV Parlemen
3. Kepala Sub Bagian Radio Parlemen
4. Redaksi dan Reporter TV Parlemen
5. Redaksi dan Reporter Radio Parlemen
6. Pranata Humas

C. Tata Kelola Proyek Perubahan

STRUKTUR	DESKRIPSI
<p>Struktur tim / orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek perubahan :</p>  <pre> graph TD KBPP[Kepala Biro Pemberitaan Parlemen] <--> KBTRP[Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen] KBPP <--> KBMCMS[Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial] KBTRP <--> PL[Project Leader] KBMCMS <--> PL C((Coach)) <--> PL PL <--> TKE[Tim Kerja/ Tim Efektif] TKE --> MMRed[Masing-Masing Redaktur] MMRed -- Diupload --> MI[Media Internal] Reporter -- Menugaskan --> MMRed Reporter --> Berita[Berita] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen • Sponsor : 1. Kabag Media Cetak dan Media Sosial DPR 2. Kabag TV dan Radio Parlemen • Project Leader : Kasub Analis Media • Tim Kerja : Kasub Media Cetak dan Media Internal Sosial, Redaktur/Reporter Media Cetak dan Media Sosial, dan Staf Analis Media • Tim Kerja : Kasub Produksi dan Program, Eksternal Kasub Radio Parlemen, Redaksi/Reporter TV/Radio Parlemen • Coach : Widyaswara LAN (Ibu Puji Hastuti)

DESKRIPSI

1. Pembina : Memberikan persetujuan dan arahan dalam menyelesaikan proyek perubahan
2. Sponsor : Memberikan arahan, bimbingan dan fasilitasi kepada Project Leader dalam menyelesaikan proyek perubahan
3. Project leader : Eksekutor dalam pelaksanaan Proyek Perubahan.

4. Tim Kerja Internal : Tim kerja yang akan membantu project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan
5. Tim Kerja Eksternal: Tim kerja yang akan membantu project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan
6. Coach : Diharapkan coach dapat memberikan bimbingannya dan monitoring secara reguler kepada kegiatan peserta/project leader sampai terwujudnya proyek perubahan.

4. STRATEGI KOMUNIKASI

Setiap Stakeholders memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Oleh karena itu strategi komunikasi terhadap stakeholders juga diterapkan secara berbeda, yaitu sebagai berikut :

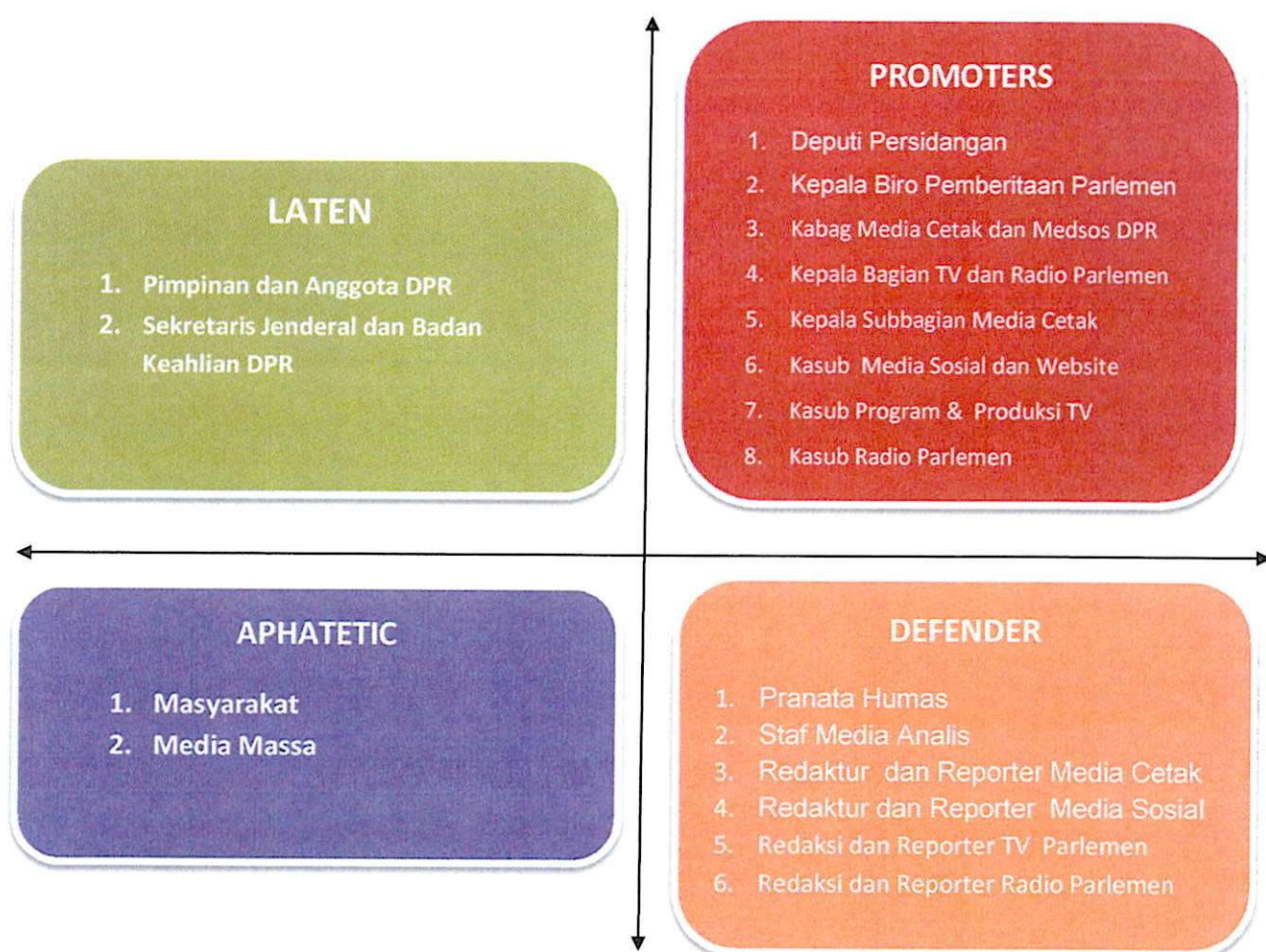
1. Promoters : Diskusi dan Konsultasi Efektif
2. Latens : Informatif dan Persuasif
3. Defenders : Informatif, Diskusi, dan Konsultasi Intensif
4. Apathetic : Informatif secara terus menerus

Strategi komunikasi yang dilakukan untuk masing-masing stakeholder yaitu:

No.	Stakeholder	Dukungan/Kuadran	Tindakan
1.	Pimpinan dan Anggota DPR	Latens/Positif (+)	Informatif
2.	Sekjen dan BK DPR	Latens/Positif (+)	Informatif
3.	Deputi Persidangan	Latens/Positif (+)	Informatif dan persuasif
4.	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	Promotor/Positif (+)	Konsultasi Intensif
5.	Kabag Media Cetak dan Media Sosial	Promotor/Positif (+)	Diskusi dan Konsultasi Intensif
6.	Kabag Televisi dan Radio Parlemen	Promotor/Positif (+)	Diskusi dan Konsultasi Intensif
7.	Kasubag Media Cetak	Defender/Positif (+)	Diskusi, Konsultasi, dan Komunikasi intensif
8.	Kasubag Media Sosial	Defender/Positif (+)	Diskusi, Konsultasi, dan Komunikasi Intensif
9.	Kasubag Program dan Produksi TV Parlemen	Defender/Positif (+)	Diskusi, Konsultasi, dan Komunikasi Intensif
10.	Kasubag Radio Parlemen	Defender/Positif (+)	Diskusi, Konsultasi, dan Komunikasi Intensif
11.	Staf Analis Media	Defender/Positif (+)	Diskusi dan Komunikasi Intensif
12.	Redaktur dan Reporter Media Cetak	Defender/Positif (+)	Diskusi dan Komunikasi Intensif

13.	Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website	Defender/Positif (+)	Diskusi dan Komunikasi Intensif
14.	Redaksi dan Reporter TV Parlemen	Defender/Positif (+)	Diskusi dan Komunikasi Intensif
15.	Redaksi dan Reporter Radio Parlemen	Defender/Positif (+)	Diskusi dan Komunikasi Intensif
16.	Pranata Humas	Defender/Positif (+)	Diskusi dan Komunikasi Intensif
17.	Masyarakat	Apathetic/Negatif (-)	Informatif
18.	Media Massa	Apathetic/Negatif (-)	Informatif

Melalui strategi komunikasi yang dilakukan selama pelaksanaan proyek perubahan, dukungan stakeholder setelah proyek perubahan menjadi sebagai berikut :



BAB III

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Proyek perubahan “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu” dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan sangat baik sesuai tahapan kegiatan jangka pendek yang direncanakan (16 Mei – 19 Juli 2019), dengan capaian 100%.

Proyek perubahan ini dapat tercapai dengan sangat baik berkat dukungan dan peran serta aktif seluruh Tim Agenda Setting, baik saat persiapan kegiatan agenda setting, saat kegiatan agenda setting dan implementasi hasil kegiatan agenda setting berupa isu utama yang akan dikelola dalam penyelenggaraan pemberitaan dan diupload di media internal DPR.

Seluruh Tim Agenda Setting sangat berperan aktif dan berkontribusi menyampaikan ide, gagasan dan pemikiran-pemikiran dalam penyusunan Panduan Agenda Setting, dan pada kegiatan agenda setting untuk menentukan isu utama yang akan dikelola menjadi pemberitaan di media internal DPR.

Proyek Perubahan ini dapat tercapai dengan sangat memuaskan, karena seluruh Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI memiliki persepsi yang sama bahwa kegiatan ini adalah kegiatan agenda setting untuk menetapkan isu bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan dan untuk meningkatkan kinerja seluruh unit di Biro Pemberitaan Parlemen.

Selain itu, penulis sebagai project leader telah berhasil membangun komitmen Tim Agenda Setting, bahwa kegiatan agenda setting ini bukan hanya kegiatan dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan penulis semata, tapi merupakan Kegiatan Biro Pemberitaan Parlemen.

Kegiatan Agenda Setting ini mulai dari uji coba (1) dan uji coba (2) sudah berjalan berkesinambungan dan berlanjut sebanyak 5 (lima) kali kegiatan agenda setting yang dilaksanakan setiap hari Jumat.

Keberhasilan proyek perubahan ini juga tidak terlepas dari peran Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai pembina dan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial sebagai Mentor.

Dalam pelaksanaan kegiatan proyek perubahan ini, ada beberapa perubahan jadwal sebagaimana telah disusun dalam Rancangan Proyek Perubahan, namun hal ini tidak mengurangi esensi pencapaian dari Proyek Perubahan itu sendiri, antara lain :

- a. Kegiatan membuat surat dukungan direncanakan pada Jumat, 24 Mei 2019. Untuk efisiensi waktu dan kegiatan disatukan dengan kegiatan milestone 1 yaitu pada Kamis, 16 Mei 2019.

- b. Rapat Tim Efektif/Agenda Setting dengan agenda membahas Panduan Agenda Setting direncanakan dilaksanakan pada Kamis, 23 Mei 2019, namun karena alasan keamanan Kantor Setjen dan BK DPR RI diliburkan, penulis sudah ada agenda kegiatan lain, dan sudah mendekati liburan Hari Raya Idul Fitri, maka pembahasan dilakukan secara informal melalui WA Group Agenda Setting yang sudah terbentuk dan japri langsung kepada seluruh anggota Tim.
- c. Uji Coba 2 kegiatan agenda setting sedianya dilaksanakan pada Jumat, 5 Juli 2019, namun untuk kontinuitas dan berkelanjutannya kegiatan ini dimajukan menjadi Jumat, 28 Juni 2019. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dengan sendirinya menyesuaikan sesuai jadwal uji coba implementasi hasil kegiatan agenda setting.

Di bawah ini merupakan capaian proyek perubahan "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu" sesuai milestone jangka pendek, antara lain sebagai berikut :

MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	WAKT U	REALISASI KEGIATAN	OUTPUT	EVIDENCE	CAPAI AN
1.Membentuk Tim Efektif & Membuat Surat Dukungan Proper	1)Membuat Surat permintaan nama Tim Efektif dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen kepada Kabag Media Cetak dan Media Sosial, Kabag TV dan Radio Parlemen, dan Kabag Humas; 2)Mendistribusikan Surat Permintaan Nama Tim Efektif 3)Membuat Konsep Surat Tugas Tim Efektif & Surat Dukungan 4)Final dan Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif 5)Pendistribusian Surat Tugas Tim Efektif	Kamis 16 Mei 2019 Senin, 20 Mei 2019	Terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan	Terbentuk-nya Tim Efektif & Surat Dukungan Proper	-Surat permintaan Nama Tim Efektif -Surat Tugas Tim Efektif -Surat Dukungan Proper	100%
2.Rapat Tim Efektif a.Sosialisasi Proper b.Menyamakan Persepsi c.Membangun komitmen bersama	1)Persiapan pertemuan 2)Membuat undangan rapat 3)Pendistribusian undangan 4)Membuat Daftar hadir 5)Pelaksanaan Rapat Tim Efektif	Selasa, 21 Mei 2019	Terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan	-Tersosialisasikannya Proper -Terwujudnya Persepsi yang sama -Terbangunnya	-Surat Undangan -Daftar hadir -Resume Rapat -Screen Shoot WA Group -Foto	100%

d.Membahas panduan agenda setting e.Membentuk WA Group Tim AgendaSetting				Komitmen Bersama - Terbentuknya WA Group		
3.Melakukan pembahasan secara informal ttg Panduan Agenda Setting	Pembahasan dilakukan lewat WA Group Agenda Setting dan Japri Anggota Ti Agenda Setting	Jumat 31 Mei 2019	Terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan	Terwujudnya Panduan Agenda Setting	-Draft Panduan Agenda Setting -Screen Shoot WA	100%
4.Uji Coba (1) kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kepada Tim Efektif c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (1) kegiatan Agenda Setting	Jumat, 21 Juni 2019	Terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan	Terlaksananya Uji Coba (1) Kegiatan Agenda Setting	-Surat Undangan -Daftar hadir -Draft Keputusan Rapat -Resume Rapat -Foto	100%
5.Uji Coba (1) Implementasi Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media DPR	a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan; b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber (Pimpinan/Anggota DPR) c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi d.Redaktur/Redaksi melakukan pengeditan pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR	Senin – Jumat, 24-28 Juni 2019	Terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan	Terimplementasikannya isu hasil uji coba 1 di media DPR	-Foto Berita di semua media DPR	100%
6.Monitoring dan Evaluasi hasil uji coba (1) Rapat Agenda Setting	Melakukan monitoring dan evaluasi	Senin, 24-28 Juni 2019	Terlaksana sangat baik	Berita di Media Internal DPR isunya sama	Draft Monitoring dan Evaluasi uji coba(1)	100%
7.Uji Coba (2) kegiatan Agenda Setting	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kepada Tim Efektif	Jumat, 28 Juni 2019	Terlaksana sesuai dengan	Terlaksananya Uji Coba (2) Kegiatan	-Surat Undangan -Daftar hadir	100%

	c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (2) kegiatan Agenda Setting		rencana kegiatan	Agenda Setting	-Draft Keputusan Rapat -Resume Rapat -Foto	
8.Uji Coba (2) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media DPR	a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan; b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi d.Redaktur/Redaksi mengedit pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR	Senin – Jumat, 1-5 Juli 2019	Terlaksana sesuai dengan rencana kegiatan	Terimplementasikannya isu hasil uji coba 2 di media DPR	-Foto Berita di semua media DPR	100%
9.Monitoring dan Evaluasi hasil uji coba (2) Rapat Agenda Setting	Melakukan monitoring dan evaluasi	Senin, 1-5 Juli 2019	Terlaksana sangat baik	Berita di media DPR isunya sama	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (2)	100%

2. KRITERIA KEBERHASILAN

1. Terlaksananya kegiatan agenda setting yang menetapkan isu yang akan dikelola menjadi berita dan diupload di seluruh media internal DPR.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

3. KENDALA/MASALAH DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA/MASALAH

NO	KENDALA /MASALAH	STRATEGI MENGATASI KENDALA / MASALAH
1	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja ke daerah dari Alat Kelengkapan Dewan (Komisi dan	Komunikasi intensif dan koordinasi. Meminta kepada Reporter yang ditugaskan untuk menghubungi

	Badan), menjadi kendala bagi Reporter untuk menghubungi narasumber (Anggota Dewan). Khususnya dialami oleh TV Parlemen yang memerlukan visual.	narasumber via telepon atau mengganti/mencari narasumber yang mudah dihubungi, dan mengusulkan untuk meminta bantuan pada Reporter yang ditugaskan mengikuti kunjungan kerja Komisi.
2	Kurang semangatnya Reporter untuk langsung membuat berita dari hasil wawancara dengan narasumber.	Melakukan pendekatan persuasif, sambil mendorong dan memotivasi agar semangat dalam membuat berita, karena ini untuk meningkatkan kinerja dan bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.
3	Rapat Tim Efektif Penyusunan Panduan Agenda Setting seyogyanya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 batal dilaksanakan karena kantor diliburkan alasan keamanan terkait demo hasil Keputusan KPU tentang Pilpres dan Pileg 2019.	Karena PL suda ada agenda lain dan mendekati libur Hari Raya Idul Fitri, pembahasan dioptimalkan dengan komunikasi dan diskusi via WA Group Tim Agenda Setting dan Japri langsung kepada anggota Tim Agenda Setting.
4	Kegiatan Membuat Surat Dukungan Proper sedianya direncanakan pada Jumat 24 Mei 2019.	Untuk efisien waktu disatukan dengan kegiatan membentuk Tim Efektif pada 16 Mei 2019
5	Kegiatan Uji Coba 2 Agenda Setting dan Implementasinya dimajukan menjadi tanggal 28 Juni 2019	Hal ini dimaksudkan, agar kegiatan rapat agenda setting berkesinambungan dan berkelanjutan.

4. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Manajemen :

Berupa kinerja tim yang solid dan optimal, penggunaan strategi kerja, komitmen dan kerjasama.

2. Organisasi :

Dukungan dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial sangat berperan dalam keberhasilan proyek perubahan ini.

3. Stakeholder Eksternal :

Dukungan dari seluruh stakeholder eksternal sangat berkontribusi pada keberhasilan yang besar.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Proyek perubahan penulis yang berjudul Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu (Optik Setia) berhasil, dan sangat bermanfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di seluruh media internal DPR, serta meningkatkan kinerja seluruh unit penyelenggara pemberitaan.

Informasi yang disampaikan media internal DPR sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang sedang diperjuangkan DPR dan apa yang telah dilakukan anggota dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, anggaran dan legislasi.

Melalui penyampaian informasi dari seluruh media internal DPR ini, diharapkan bisa merubah kepercayaan masyarakat kepada DPR menjadi lebih baik. Ketika kepercayaan masyarakat kepada dewan semakin positif niscaya citra dewan menjadi semakin baik.

Selanjutnya melalui kegiatan agenda setting penetapan isu juga, memudahkan redaksi dan redaktur media untuk memilih isu utama yang diangkat di masing-masing media internal DPR.

2. REKOMENDASI

- 1) Untuk jangka menengah dan jangka panjang, kegiatan agenda setting penetapan isu akan lebih baik jika dipimpin dan dihadiri oleh jajaran top manajemen di Biro Pemberitaan Parlemen, seperti Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial, dan Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen. Hal ini untuk menghasilkan isu yang benar-benar berkualitas dan mendapat pengakuan dari seluruh unit penyelenggaraan pemberitaan.
- 2) Untuk lebih efektifnya Rapat Tim agenda setting penetapan isu, dilakukan dua minggu sekali dalam sebulan.

LAMPIRAN
RANCANGAN PROYEK
PERUBAHAN



RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

**OPTIMALISASI KEGIATAN AGENDA SETTING
BAGI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMBERITAAN
DI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN MELALUI PENETAPAN ISU
(OPTIK SETIA)**

Disusun oleh :

Nama : Suciati, S.Sos.
NIP : 197207201994032002
INSTANSI : Sekretariat Jenderal DPR RI

**PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN
TINGKAT IV ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**



**LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

**OPTIMALISASI KEGIATAN AGENDA SETTING
BAGI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMBERITAAN
DI BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN MELALUI PENETAPAN ISU
(OPTIK SETIA)**

Disusun oleh :

Nama : Suciati, S.Sos.
NIP : 197207201994032002
INSTANSI : Sekretariat Jenderal DPR RI

Peserta Diklat


(Suciati, S.Sos)

Menyetujui

Mentor


(Drs. Mohammad Djazuli, M.Si)

Menyetujui

Coach


(Dra. Puji Hastuti, M.Pd.)

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

1. IDENTITAS PROYEK

**A. Judul : Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui “Penetapan Isu”
(OPTIK SETIA)**

B. Deskripsi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh berbagai media yang menyampaikan ragam informasi dan berita yang kemudian memasuki alam pikiran kita. Disadari atau tidak, media terutama media massa mempengaruhi pola pikir dan persepsi kita dalam memandang suatu peristiwa atau isu dalam masyarakat. Artinya media massa berkuasa mempengaruhi audience.

Banyak teori media yang menyatakan bahwa media massa berkuasa mempengaruhi audience, salah satunya Teori Agenda Setting Mc Combs & Shaw, yang menyatakan media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audience yang terkena terpaan informasi, dan media massa mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media.

Pendekatan Agenda Setting dimulai dari asumsi bahwa media massa menyaring berita, siaran, artikel, atau tulisan yang akan dipublikasikan. Seleksi ini dilakukan oleh para awak media. Dalam perkembangannya, Agenda Setting media massa menjadi mata rantai mekanisme komunikasi politik dalam beragam pesta demokrasi.

Agenda setting adalah upaya media untuk membuat pemberitaannya tidak semata-mata menjadi saluran isu dan peristiwa. Ada strategi, ada kerangka yang dimainkan media sehingga pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul. Idealnya, media tak sekedar menjadi sumber informasi bagi publik. Namun juga memerankan fungsi untuk mampu membangun opini publik secara

kontinyu tentang persoalan tertentu, menggerakkan publik untuk memikirkan satu persoalan secara serius, serta mempengaruhi keputusan para pengambil kebijakan.

Menurut teori agenda setting, media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk berubah sikap tetapi dengan fungsinya sebagai *gate keeper* (penjaga gawang atau penyaring) yang memilih suatu topik dan persoalan tertentu dan mengabaikan yang lain. Dengan menonjolkan suatu persoalan tertentu dan mengesampingkan yang lain tersebut, media membentuk citra atau gambaran dunia seperti yang disajikan dalam media massa (Rakhmat, 1989:259-260). Ini berarti media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang dipikirkan orang dan mempengaruhi persepsi khalayak tentang yang dianggap penting.

Saat ini media masa (cetak, elektronik dan siber) disingkat media, mudah diakses oleh siapa pun. Hal ini menjadikan media menjadi salah satu asset dalam menyebarkan informasi untuk membangun kepercayaan publik. Informasi yang diakses masyarakat luas tersebut, juga tidak luput dari pemberitaan positif dan negatif tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Biro Pemberitaan Parlemen sebagai penyelenggara pemberitaan harus mampu berperan mengimbangi pemberitaan DPR di media. Bagaimana membangun kepercayaan publik dan memperbaiki citra lembaga DPR menjadi prioritas. Media Internal DPR/Media DPR (Buletin dan Majalah Parlementaria, TV dan Radio Parlemen, Website DPR dan Media Sosial DPR) di bawah Biro Pemberitaan Parlemen memegang peranan penting. DPR sebagai lembaga representatif harus dapat dipercaya.

Pesatnya perkembangan media massa saat ini, maka media DPR dituntut untuk lebih cepat dan akurat melakukan penyampaian informasi mengenai fungsi dewan yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini menuntut kecepatan dan keakuratan dari seluruh unit yang terkait dalam penyiapan, pengolahan dan penyampaian berita.

Terkait hal tersebut, sasaran Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen salah satunya adalah meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan penyelenggaraan pemberitaan DPR RI dan Setjen DPR RI melalui media cetak, sosial, televisi dan radio.

Sub Analis Media merupakan salah satu unit kerja dibawah Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Sub Analis Media memiliki tugas pokok menganalisis

pemberitaan DPR di media cetak dan media online. Tujuan dari kegiatan analisis media adalah untuk mengetahui *trend* berita (*tone* berita, isu, *headlines*, jumlah berita, *newsmaker*) dan implikasi *trend* berita serta memberikan rekomendasi terkait dengan implikasi berita tersebut.

Analisis media merupakan pengkajian atas isu yang berkembang di media massa yang meliputi analisis atas *framing* dan *issue setting*, sehingga pengguna dapat membandingkan isi berita dari satu media dengan media lainnya, dan mendapatkan berita yang lebih berimbang. Signifikansi dari kegiatan ini adalah analisis media dapat digunakan sebagai instrumen pembentuk *agenda setting* dan sebagai data pembanding untuk melakukan kajian dan analisis yang mendalam.

Dalam rangka mengikuti perkembangan pemberitaan media massa, analisis media menjadi instrumen penting bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini Pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal DPR RI dan Biro Pemberitaan DPR RI. Analisis media yang disajikan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan sehingga akan mempermudah proses penyampaian informasi kepada publik. Analisis media juga membantu pemangku kepentingan untuk menilai berbagai tendensi media, bagaimana media membingkai berita tersebut yang kemudian berpengaruh kepada pembentukan opini publik.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, kegiatan yang dilakukan Sub Analisis Media antara lain : menyiapkan pelayanan rekomendasi isu aktual yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, analisis media cetak, analisis media *online*, ikhtisar media, kliping media, agenda setting. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Kegiatan *agenda setting* yang outputnya adalah manajemen isu dilaksanakan setiap hari Jumat, terdapat beberapa hal yang dikaji antara lain *hot issues*, agenda/isu internal DPR RI dalam seminggu, editorial di media massa, potensi isu berlanjut dan potensi isu baru yang akan diangkat oleh media seminggu ke depan.

Manajemen Isu hasil kegiatan agenda setting dari Sub Analisis Media disampaikan kepada Pimpinan Dewan, Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, dan seluruh pemangku kepentingan penyelenggara pemberitaan.

Menurut penulis, idealnya manajemen isu hasil kegiatan agenda setting ini ditetapkan menjadi isu yang akan dikelola dalam penyelenggaraan pemberitaan di media internal DPR. Sehingga berita yang disampaikan kepada publik oleh seluruh media DPR akan menyampaikan isu yang sama, sehingga akan terjadi konvergensi.

Hal ini juga sejalan dengan perkembangan kemajuan media saat ini, dimana demi terwujudnya cita-cita yang ingin dicapai memanfaatkan peran multimedia. Kondisi konvergensi media dalam produksi berita merupakan kondisi yang umum dilakukan media.

Konvergensi berarti penyatuan antara media cetak, online, televisi dan radio yang menggunakan platform silang. Artinya, konten media dalam hal ini adalah isu dapat dimuat pada berbagai jenis media. Konvergensi mengubah cara pembuatan berita. Konten dapat dengan mudah dibagi antar media baik itu untuk cetak, sosial, web, radio dan televisi.

Menurut penulis upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen adalah mengoptimalkan kegiatan agenda setting di Sub Analis Media. Kegiatan agenda setting ini akan optimal, jika melibatkan dan didukung oleh seluruh elemen penyelenggara pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

Agar kegiatan ini didukung dan melibatkan penyelenggara pemberitaan, maka harus dibentuk dan disusun Tim Efektif atau Tim Kerja yang terdiri dari perwakilan seluruh penyelenggara pemberitaan yang akan melaksanakan tugas kegiatan agenda setting. Surat tugas ini agar mengikat pada anggota Tim, maka harus ditetapkan dengan sebuah surat tugas yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

Kegiatan agenda setting yang didukung dan melibatkan seluruh penyelenggara pemberitaan ini, akan menghasilkan materi isu yang lebih komprehensif baik dari sisi keaktualannya, nilai beritanya, pengaruhnya kepada organisasi maupun dampaknya kepada publik atau masyarakat luas. Kemudian isu yang ditetapkan dalam agenda setting ini akan dijadikan materi pokok dalam pengelolaan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen. Sehingga pemberitaan di semua media DPR isunya sama.

Selanjutnya penulis juga ingin menggambarkan, bahwa media DPR merupakan jendela informasi yang menginformasikan seluruh informasi tentang kedewanan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan bagi masyarakat luas. Namun kondisi saat ini, pemberitaan di seluruh media internal DPR masih didominasi berita kegiatan Dewan, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, berita rilis dari Pimpinan dan Anggota Dewan.

Pemberitaan media DPR masih minim isu. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu akibat belum adanya penetapan isu yang akan dikelola dalam penyampaian berita di media DPR.

C. Mentor :

Nama : Drs. Mohammad Djajuli, M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

D. Project Leader :

Nama : Suciati, S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Analis Media

E. Sumber Daya Tim

INTERNAL : 1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

2. Kepala Sub Bagian Media Cetak
3. Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website
4. Staf Analis Media
5. Redaktur dan Reporter Media Cetak
6. Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website

EKSTERNAL : 1. Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen

2. Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV Parlemen
3. Kepala Sub Bagian Radio Parlemen
4. Redaksi dan Reporter TV Parlemen
5. Redaksi dan Reporter Radio Parlemen
6. Pranata Humas

2. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORMS)

A. Gambaran Organisasi

Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014, mengisyaratkan perubahan struktur organisasi dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Perubahan struktur organisasi tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI (Setjen dan BK DPR) adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut, Sekretaris Jenderal DPR telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Peraturan Sekretaris Jenderal tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016.

Sejak tahun 2016, Rencana Strategis (Renstra) Setjen dan BK DPR merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Renstra DPR RI. Oleh karena itu secara substansi penyusunan Renstra Setjen dan BK DPR merupakan penjabaran dari Renstra DPR RI 2014-2019 yang menginginkan “terwujudnya DPR sebagai Lembaga Perwakilan yang Modern, Berwibawa, dan Kredibel”. Ciri “Modern” ditandai dengan penggunaan teknologi informasi. Penyediaan teknologi informasi ini terkait dengan tugas dan fungsi Setjen dan BK DPR sebagai *supporting system* DPR.

Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang administrasi dan persidangan, Setjen DPR menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR serta perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi.

Deputi Bidang Persidangan merupakan salah satu Deputi dalam Struktur Organisasi Setjen DPR RI, memiliki tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR. Untuk terselenggaranya tugas tersebut, Deputi Persidangan didukung oleh 5 (lima) Biro,

yaitu : Biro Persidangan I; Biro Persidangan II; Biro Kerja Sama Antar Parlemen; Biro Kesekretariatan Pimpinan; dan Biro Pemberitaan Parlemen.

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan informasi, dilaksanakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.

Berdasarkan *roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015-2019, Biro Pemberitaan Parlemen diberi mandat pada agenda perubahan 8 (delapan) yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Dimana Biro Pemberitaan Parlemen harus mampu menyesuaikan dengan indikator spesifik dari pelayanan publik, seperti standart pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Setjen dan BK DPR RI pada tahun 2015-2019, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemberitaan Parlemen, yaitu:

- a. Penerapan pelayanan publik terintegrasi;
- b. Penguatan kualitas pelayanan publik;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

Sedangkan Visi dan Misi Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Rumusan visi dan misi Biro Pemberitaan Parlemen mengacu pada visi dan misi Deputi Bidang Persidangan, dengan fokus yang telah ditetapkan yaitu:

“PENYAMPAIAN BERITA DAN LAYANAN INFORMASI YANG KREDIBEL”

2. Misi

Misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu :

- a. meningkatnya pengelolaan informasi DPR di media cetak dan media sosial;
- b. meningkatnya pengelolaan penerangan dan pelayanan informasi publik yang profesional dan akuntabel.

- c. meningkatkan penyelenggaraan peliputan, pemberitaan mengenai kegiatan DPR dan Setjen dan BK DPR RI melalui media televisi dan radio secara akurat agar diketahui masyarakat.
- d. meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan penerbitan yang maju dan profesional.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pelayanan informasi, bila dikaitkan dengan visi dan misi di atas, maka Biro Pemberitaan Parlemen dalam penyelenggaraan pemberitaan dan pelayanan informasi harus kredibel, artinya informasi yang disampaikan berkualitas, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Biro Pemberitaan Parlemen didukung oleh 4 (empat) unit kerja sebagai berikut:

1. Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Menyusun bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media, melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media.

Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Media Cetak;
- b. Subbagian Media Sosial dan Website; dan
- c. Subbagian Analisis Media.

2. Bagian Humas

Mempunyai tugas melaksanakan penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik, melaksanakan fungsi pelayanan informasi publik dan pelaksanaan kehumasan.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Penerangan; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi Publik.

3. Bagian Penerbitan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian. Fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang penerbitan; pelaksanaan proses produksi; dan pelaksanaan distribusi produk terbitan.

Bagian Penerbitan terdiri atas:

- a. Subbagian Produksi; dan
- b. Subbagian Distribusi.

4. Bagian Televisi dan Radio (TVR) Parlemen

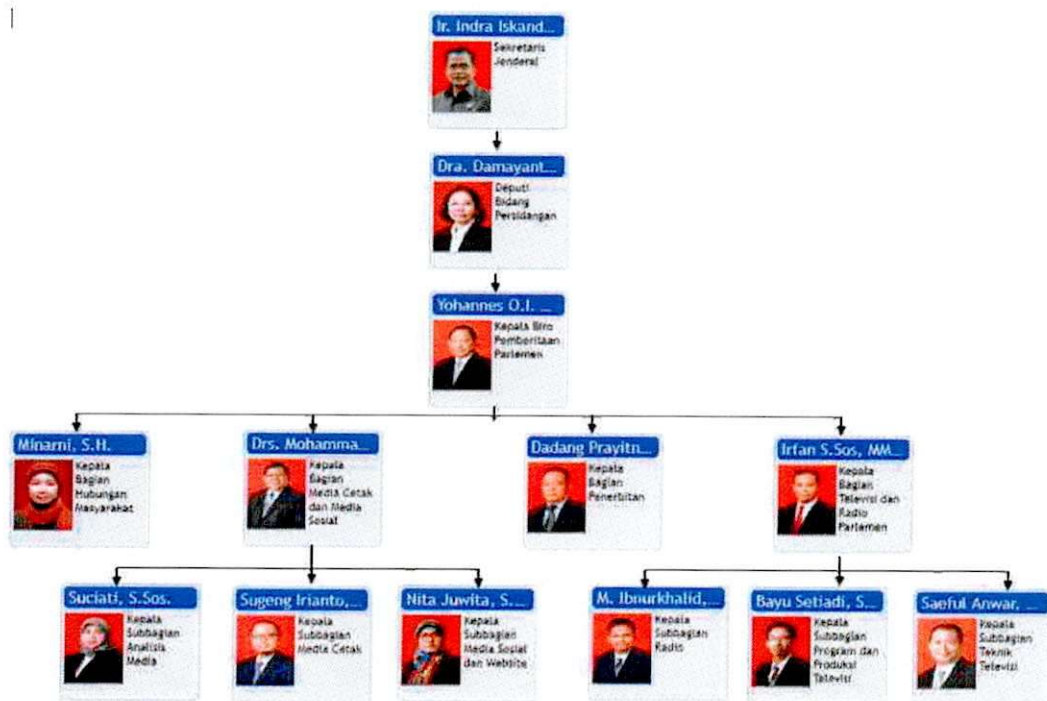
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan televisi dan radio. Fungsi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan televisi dan radio; pengelolaan program dan produksi televisi; dan pengelolaan teknik televisi;

Bagian Televisi dan Radio Parlemen terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Produksi Televisi;
- b. Subbagian Teknik Televisi; dan
- c. Subbagian Radio.

Dari keempat unit kerja tersebut, yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemberitaan ada pada Bagian Media Cetak dan Media Sosial dan Bagian Televisi dan Radio Parlemen. Sementara yang memiliki peran dalam pelayanan informasi ada pada Bagian Humas.

C. Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen

D. Tupoksi Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Pasal 235 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, menyebutkan tugas Bagian Media Cetak dan Media Sosial adalah mengelola pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website, serta melaksanakan analisis media. Selanjutnya Pasal 236 menyatakan, dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi :

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- Menyusun bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- Melaksanakan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, media sosial, website, dan analisis media;
- Melaksanakan dukungan pemberitaan di media cetak;

- e. Melaksanakan dukungan pemberitaan di media sosial dan website;
- f. Melaksanakan analisis media;
- g. Melaksanakan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan; dan
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen;

Selanjutnya pada Pasal 237 dijelaskan Bagian Media Cetak dan Media Sosial terdiri atas Sub Bagian Media Cetak, Sub Bagian Media Sosial dan Website, dan Sub Bagian Media Analisis. Lebih lanjut, Pasal 238 menerangkan tugas masing-masing Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Media Cetak : mengelola pemberitaan di media cetak
- b. Sub Bagian Media Sosial : mengelola pemberitaan di media sosial dan website
- c. Sub Bagian Analisis Media : melakukan analisis media dan melaksanakan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial

E. Tupoksi Sub Bagian Analis Media

Sebagaimana Pasal 238 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tugas pokok Sub Analis Media adalah melakukan analisis media dan melaksanakan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial. Untuk melaksanakan tugas dan pokok di atas, Sub Analis Media melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kliping berita
- 2. Analisis Media Cetak
- 3. Analisis Media Online
- 4. Ikhtisar Berita
- 5. Rekomendasi Isu Aktual
- 6. Agenda Setting

Kegiatan analisis media cetak dan media online dilaksanakan untuk menganalisis pemberitaan terkait fungsi dan tugas Dewan di 8 (delapan) media cetak nasional antara lain : Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, Jawa Pos, Aktual, Rakyat Merdeka, dan Koran Sindo dan 8 (delapan) media online antara lain :

antaranews.com, detik.com, vivanews.com, RMOL, CNNIndonesia, republika.co.id, tribunenews.com dan liputan6.com. Sementara kegiatan ikhtisar merupakan *summary* atas berita-berita terkait DPR di media-media tersebut.

Signifikansi dari kegiatan ini adalah analisis media dapat digunakan sebagai instrumen pembentuk *agenda setting* dan sebagai data pembanding untuk melakukan kajian dan analisis yang mendalam. Selanjutnya, hasil analisis media ini juga menjadi instrumen penting bagi pemangku kepentingan, dalam hal ini Pimpinan DPR, Sekretaris Jenderal DPR RI dan Biro Pemberitaan DPR RI. Analisis media yang disajikan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan sehingga akan mempermudah proses penyampaian informasi kepada publik. Analisis media juga membantu pemangku kepentingan untuk menilai berbagai tendensi media, bagaimana media membingkai berita tersebut yang kemudian berpengaruh kepada pembentukan opini publik.

Sementara itu, kegiatan *agenda setting* yang outputnya adalah manajemen isu dilaksanakan setiap hari Jumat. Dalam penyusunan *agenda setting* dan manajemen isu terdapat beberapa hal yang dikaji diantaranya:

- a. *Hot issues* yaitu berita terkait masalah atau pokok persoalan yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat dalam media cetak, media online, dan media sosial.
- b. Agenda/isu internal DPR RI dalam seminggu, diantaranya isu fungsi pengawasan, legislasi, budgeting, dan isu fungsi lain-lain (di luar ketiga fungsi utama DPR dan terkait kesetjanaan DPR RI).
- c. Editorial di media massa.
- d. Potensi isu berlanjut dan potensi isu baru yang akan diangkat oleh media seminggu ke depan.
- e. Rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala Biro Pemberitaan DPR dan seluruh jajaran Biro Pemberitaan DPR RI terkait untuk mempersiapkan materi terkait dengan potensi isu yang akan berkembang di media dan publik

Permasalahan :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub Analis Media tersebut, ditemukan beberapa kondisi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi Biro Pemberitaan Parlemen sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2016-2019. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kegiatan agenda setting;

Belum optimal, karena kegiatan agenda setting tidak melibatkan dan tidak didukung seluruh penyelenggara pemberitaan.

2. Hasil kegiatan agenda setting belum dijadikan sebagai materi pokok dalam pengelolaan pemberitaan di media internal DPR;

Belum dijadikan sebagai materi pokok dalam pengelolaan pemberitaan, karena hasil kegiatan ini belum ditetapkan menjadi materi yang akan diolah oleh media DPR.

3. Manajemen isu yang dihasilkan dari kegiatan agenda setting tidak sesuai dengan kriteria isu media internal DPR;

Dari hasil wawancara langsung dengan redaktur/redaksi media DPR, diperoleh informasi bahwa isu yang dihasilkan kegiatan agenda setting dinilai kurang memenuhi dari sisi nilai beritanya dan kurang berdampak pada masyarakat atau organisasi jika diolah menjadi berita.

4. Penyelenggara pemberitaan belum dilibatkan dalam kegiatan agenda setting;

Hal ini karena belum ada aturan yang mengatur dan mengikat bagi penyelenggara pemberitaan untuk turut berperan serta dan berkontribusi dalam kegiatan ini.

5. Kurangnya variasi berita di media internal DPR.

Media DPR masih banyak memberitakan kegiatan dewan dan rilis yang disampaikan dari Pimpinan/Anggota Dewan. Pemberitaan terkait isu aktual masih minim. Hal ini juga karena tidak ada ketentuan yang mengatur materi isu apa yang akan diangkat oleh media DPR.

Dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut, selanjutnya ditentukan isu aktualnya dengan kriteria memilih isu dengan menggunakan metode analisis APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak) terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, sebagai berikut :

NO.	ISU AKTUAL	KRITERIA				PRIORITAS
		A	P	K	L	
1	Belum optimalnya kegiatan agenda setting;	5	5	4	5	19
2	Hasil kegiatan agenda setting belum dijadikan sebagai materi dalam pengelolaan pemberitaan di media internal DPR	5	5	4	4	18
3	Manajemen isu yang dihasilkan dari kegiatan agenda setting tidak sesuai dengan kriteria isu media internal DPR.	5	4	4	4	17
4	Penyelenggara pemberitaan belum dilibatkan dalam kegiatan agenda setting	4	4	4	4	16
4	Kurangnya variasi berita di media internal DPR.	4	4	3	3	14

Dari hasil analisis APKL diperoleh 3 (tiga) isu aktual yang menjadi masalah di Sub Bagian Analis Media, yaitu :

1. Belum optimalnya kegiatan agenda setting;
2. Hasil kegiatan agenda setting belum dijadikan sebagai materi pokok dalam pengelolaan pemberitaan di media internal DPR;
3. Manajemen isu yang dihasilkan dari kegiatan agenda setting tidak sesuai dengan kriteria isu media internal DPR;

Dari ketiga isu aktual yang menjadi perhatian utama sebagaimana tersebut di atas, untuk pemilihan isu prioritas sebagai rancangan proyek perubahan yang akan dilaksanakan, selanjutnya dilakukan analisis USG (Urgency, Serious, Growth) terhadap permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi di Sub Bagian Analis Media sebagai implementasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut :

NO	SITUASI/KESERIOUSAN PENILAIAN	KRITERIA			TOTAL
		U	S	G	
1	Belum optimalnya kegiatan agenda setting;	5	5	4	14

2	Hasil kegiatan agenda setting belum dijadikan sebagai materi pokok dalam pengelolaan pemberitaan di media internal DPR;	5	4	4	13
3	Manajemen isu yang dihasilkan dari kegiatan agenda setting tidak sesuai dengan kriteria isu media internal DPR.	4	4	4	12

Keterangan :

Urgency

(Mendesak)

5=Sangat Penting

4=Penting

3=Cukup Penting

2=Kurang Penting

1=Tidak Penting

Seriousness

(Kegawatan)

5=Sangat Gawat

4=Gawat

3=Cukup Gawat

2=Kurang Gawat

1=Tidak Gawat

Growth

(Pertumbuhan)

5=Sangat Cepat

4=Cepat

3=Cukup Cepat

2=Kurang Cepat

1=Tidak Cepat

Berdasarkan pada hasil analisis USG di atas, maka proyek perubahan ini diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan prioritas yakni belum optimalnya kegiatan agenda setting. Untuk itu kegiatan agenda setting perlu dioptimalkan agar menghasilkan materi isu yang optimal dan dijadikan sebagai materi pokok dalam penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

Sementara itu, **kondisi ideal yang hendak dicapai** agar tujuan organisasi dapat terwujud adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya kegiatan agenda setting yang didukung dan melibatkan seluruh penyelenggara pemberitaan;
2. Isu hasil kegiatan agenda setting ditetapkan sebagai materi isu yang akan dikelola dan diolah dalam penyelenggaraan pemberitaan di media DPR;
3. Manajemen isu yang dihasilkan kegiatan agenda setting sesuai kriteria media DPR.

Berdasarkan diagnosis permasalahan dan kondisi ideal yang diharapkan sebagaimana tersebut di atas, maka proyek perubahan ini mengambil **judul : Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu.**

3. TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Proyek Perubahan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang sebagai berikut :

- **Jangka Pendek (2 bulan)**

Terwujudnya kegiatan agenda setting penetapan isu dan hasilnya secara optimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

- **Jangka Menengah (6 bulan – 1 tahun)**

Adanya kesamaan isu yang akan diolah dan dikemas menjadi berita kemudian dipublikasikan kepada publik oleh media DPR.

- **Jangka Panjang (> 1 tahun)**

Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen. Yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik pada Dewan.

4. MANFAAT

Proyek perubahan ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain :

- 1) Meningkatkan kinerja Sub Analis Media dan seluruh penyelenggara pemberitaan;
- 2) Pemberitaan di media DPR memiliki isu yang sama;
- 3) Pemberitaan yang disampaikan kepada publik akurat, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Berita yang disampaikan oleh media DPR dapat mempengaruhi persepsi publik pada dewan, dan kepercayaan publik pada dewan dapat meningkat.

Berita yang disampaikan oleh media DPR menggambarkan bahwa DPR bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya. Informasi yang disampaikan kepada publik tersebut akan memasuki alam pikiran publik, disadari atau tidak dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang Dewan. Setelah persepsi masyarakat menjadi baik, tentunya kepercayaan publik pada Dewan pun akan meningkat.

- 5) Pemberitaan yang disampaikan berdampak pada peningkatan citra dewan.

Ketika persepsi publik semakin baik dan kepercayaan publik pada dewan meningkat, maka citra dewan pun akan meningkat.

5. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- **Jangka Pendek**

1. Membentuk Tim Efektif
2. Melakukan Sosialisasi Proyek Perubahan kepada stakeholder internal
3. Melakukan Sosialisasi Proyek Perubahan kepada stakeholder eksternal
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk menyamakan persepsi & membangun komitmen bersama
5. Mewujudkan Surat Dukungan Proyek Perubahan
6. Menyusun Panduan/Petunjuk Teknis Kegiatan Agenda Setting
7. Melakukan uji coba kegiatan Agenda Setting
8. Melakukan uji coba Isu hasil kegiatan Agenda Setting bagi penyelenggaraan pemberitaan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan agenda setting

- **Jangka Menengah**

Mengoptimalkan kegiatan agenda setting dan hasilnya bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.

- **Jangka Panjang**

Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen yang kredibel sesuai visi organisasi.

6. OUTPUT KUNCI (KEY PROJECT DELIREABLES)

Nama	Deskripsi (Pengertiannya)
1.Pembentukan Tim Efektif	Terbentuknya Tim Efektif dan tersusunnya Panduan Kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu serta uji coba yang

2. Panduan/Petunjuk Teknis kegiatan Agenda Setting	dilakukan pada kegiatan tersebut menjadi kunci keberhasilan kegiatan agenda setting penetapan isu bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.
3. Uji coba kegiatan agenda setting	
4. Uji coba isu hasil kegiatan agenda setting	

7. PENTAHAPAN (MILESTONE)

Untuk memaksimalkan proyek perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan besar kegiatan beserta output yang dihasilkan, yaitu :

Jangka Pendek :

NO	MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	OUTPUT
1	Membentuk Tim Efektif / Tim Kerja	a. Membuat Surat kepada Stakeholder tentang permintaan Personil untuk Tim Efektif dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen kepada Kabag Media Cetak dan Media Sosial, dan Kabag TV dan Radio Parlemen; b. Mendistribusikan Surat Permintaan Nama Tim Efektif c. Membuat Konsep Surat Tugas Tim Efektif d. Final dan Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif e. Pendistribusian Surat Tugas Tim Efektif	-Surat Permintaan Nama Tim -Surat Tugas Tim Efektif

2	Rapat Tim Efektif dengan agenda : a.Sosialisasi Proyek Perubahan; b.Menyamakan persepsi; c.Membangun komitmen bersama;	a. Persiapan pertemuan b. Membuat undangan rapat c. Pendistribusian undangan d. Membuat Daftar hadir e. Pelaksanaan Rapat Tim Efektif	-Tersosialisasi kannya Proper. -Adanya Persepsi yang sama. -Terbangunnya komitmen bersama.
3	Rapat Tim Efektif dengan agenda menyusun petunjuk teknis/panduan kegiatan agenda setting	a. Persiapan pertemuan b. Membuat undangan rapat c. Pendistribusian undangan d. Membuat Daftar hadir e. Pelaksanaan Rapat Tim Efektif penyusunan panduan kegiatan	Draft Petunjuk Teknis / Panduan Kegiatan Agenda Setting
4	Membuat Surat Dukungan Proyek Perubahan	a.Membuat surat dukungan proyek perubahan b.Menghadap Mentor	-Surat Dukungan Proyek Perubahan
5	Uji Coba (1) pelaksanaan kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kegiatan Agenda Setting kepada Tim Efektif c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (1) kegiatan Agenda Setting	-Draft materi isu (hasil uji coba 1)
6	Uji Coba (1) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media internal DPR	a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan; b.Reporter wawancara narasumber (Pimpinan/Anggota DPR)	-Berita di media DPR isunya sama

		<p>c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi</p> <p>d.Redaktur/Redaksi mengedit berita pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR</p>	
7	Monitoring & Evaluasi hasil uji coba (1)	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh project leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring Uji Coba (1)
8	Uji Coba (2) pelaksanaan kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	<p>a.Persiapan Pertemuan</p> <p>b.Membuat Surat Undangan kegiatan Agenda Setting kepada Tim Efektif</p> <p>c.Pendistribusian Surat Undangan</p> <p>d.Membuat Daftar Hadir</p> <p>e.Pelaksanaan uji coba (2) kegiatan Agenda Setting</p>	-Draft materi isu (hasil uji coba 2)
9	Uji Coba (2) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media internal DPR	<p>a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan;</p> <p>b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber</p> <p>c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi</p> <p>d.Redaktur/Redaksi mengedit berita pada content dan meng-</p>	-Berita di media DPR isunya sama

		upload pada masing-masing media DPR	
10	Evaluasi dan Monitoring hasil uji coba (2)	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh project leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (2)

Jangka Menengah :

1	Lebih mengoptimalkan kegiatan agenda setting penetapan isu dan hasilnya bagi media DPR. (Sustainable)		-Berita di media DPR isunya sama
2	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh project leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring

Jangka Panjang :

1	Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, ditandai dengan meningkatnya opini publik pada dewan.		Berita di media DPR semakin berkualitas
2	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh project leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring

8. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

STRUKTUR	DESKRIPSI
<p>Struktur tim / orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proyek perubahan :</p> <pre>graph TD; KBPP[Kepala Biro Pemberitaan Parlemen] <--> KB1[Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial]; KBPP <--> KB2[Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial]; KB1 <--> KB2; KB1 <--> PL[Project Leader]; KB2 <--> PL; C((Coach)) <--> PL; PL <--> TE[Tim Kerja/ Tim Efektif]; TE --> MR[Masing-Masing Redaktur]; MR -- Diupload --> MI[Media Internal]; MR -- Menugaskan --> R[Reporter]; R --> B[Berita];</pre>	<ul style="list-style-type: none">• Pembina : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
	<ul style="list-style-type: none">• Sponsor : 1. Kabag Media Cetak dan Media Sosial DPR 2. Kabag TV dan Radio Parlemen
	<ul style="list-style-type: none">• Project : Kasub Analis Media Leader
	<ul style="list-style-type: none">• Tim Kerja : Kasub Media Cetak dan Media Internal Sosial, Redaktur/Reporter Media Cetak dan Media Sosial, dan Staf Analis Media
	<ul style="list-style-type: none">• Tim Kerja : Kasub Produksi dan Program, Eksternal Kasub Radio Parlemen, Redaksi/Reporter TV/Radio Parlemen
	<ul style="list-style-type: none">• Coach : Widyaswara LAN (Ibu Puji Hastuti)

DESKRIPSI

1. Pembina : Memberikan persetujuan dan arahan dalam menyelesaikan proyek perubahan
2. Sponsor : Memberikan arahan, bimbingan dan fasilitasi kepada project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan
3. Project leader: Eksekutor dalam pelaksanaan Proyek Perubahan
4. Tim Kerja Internal : Tim kerja yang akan membantu project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan
5. Tim Kerja Eksternal : Tim kerja yang akan membantu project leader dalam menyelesaikan proyek perubahan

6. Coach : Diharapkan coach dapat memberikan bimbingannya dan monitoring secara reguler kepada kegiatan peserta/project leader sampai terwujudnya proyek perubahan.

9.IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

A. Stakeholder Internal

Stakeholder internal pada proyek perubahan ini terdiri dari :

1. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
2. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
3. Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen
4. Kepala Sub Bagian Media Cetak
5. Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website
6. Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV Parlemen
7. Kepala Sub Bagian Radio Parlemen
8. Staf Analis Media
9. Redaktur dan Reporter Media Cetak
10. Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website
11. Redaksi dan Reporter TV Parlemen
12. Redaksi dan Reporter Radio Parlemen
13. Pranata Humas

B.Stakeholder Eksternal

Stakeholder eksternal pada proyek perubahan ini terdiri dari :

14. Pimpinan dan Anggota DPR RI
15. Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
16. Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI
17. Masyarakat
18. Media Massa

Dari identifikasi stakeholder kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori yang berpengaruh terhadap proyek perubahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kekuatan		Kepentingan		Kategori
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1.	Pimpinan dan Anggota DPR RI	V			V	<i>Latens</i>
2.	Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	V			V	<i>Latens</i>
3.	Deputi Persidangan	V			V	<i>Latens</i>
4.	Kepala Biro Persidangan	V		V		<i>Promoter</i>
5.	Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial	V		V		<i>Promoter</i>
6.	Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen	V		V		<i>Promoter</i>
7.	Kepala Sub Bagian Media Cetak		V	V		<i>Defenders</i>
8.	Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website		V	V		<i>Defenders</i>
9.	Kepala Sub Bagian Program dan Produksi TV Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
10.	Kepala Sub Bagian Radio Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
11.	Staf Analis Media		V	V		<i>Defenders</i>
12.	Redaktur dan Reporter Media Cetak		V	V		<i>Defenders</i>
13.	Redaktur dan Reporter Media Sosial dan Website		V	V		<i>Defenders</i>
14.	Redaksi dan Reporter TV Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>
15.	Redaksi dan Reporter Radio Parlemen		V	V		<i>Defenders</i>

16.	Pranata Humas		V	V		<i>Defenders</i>
17.	Masyarakat		V		V	<i>Apathetics</i>
18.	Media Massa		V		V	<i>Apathetics</i>

Keterangan :

1. **Promoters** memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan besar untuk membantu membuatnya berhasil (menggagalkannya).
2. **Defenders** memiliki kepentingan besar terhadap program dan menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program.
3. **Latents** tidak memiliki kepentingan/minat khusus maupun terlibat dalam program, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program.
4. **Apathetics** kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan.

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan setiap stakeholders pada proyek ini dapat dikelompokkan pada diagram kelompok stakeholders sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kepentingan	Tingkat Kepentingan (T/R)	Sikap Dukungan (+), (-), (+/-)	Peran yang diharapkan	Dampak terhadap Upaya/Posisi SH (P, L, D, A)	Strategi Komunikasi
Internal							
1	Kepala Biro Pemberitaan Parlemen	Memudahkan dalam mengambil kebijakan	Tinggi	+	Membantu mengkomunikasikan PP terhadap stakeholder	Promotor	<i>Manage Closely</i> (konsultasi intensif)
2	Kabag Media Cetak dan Media Sosial	Membantu dalam mengambil kebijakan dan koordinasi	Tinggi	+	Membantu dalam membuat keputusan dan koordinasi	Promotor	<i>Manage Closely</i> (diskusi, konsultasi intensif)
3	Kabag TV dan Radio Parlemen	Membantu dalam koordinasi	Tinggi	+	Membantu dalam koordinasi	Promotor	<i>Manage Closely</i> (diskusi, konsultasi intensif)
4	Kasubag Media Cetak	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	<i>Manage Closely</i> (diskusi, konsultasi,

							komunikasi intensif)
5	Kasubag Media Sosial dan Website	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, konsultasi, komunikasi intensif)
6	Kasubag Program dan Produksi TV Parlemen	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, konsultasi, Komunikasi intensif)
7	Kasubag Radio Parlemen	Membantu dalam kegiatan dan koordinasi hasil kegiatan	Tinggi	+	Membantu dalam mengkoordinasikan kegiatan dan hasilnya	Defender	Manage Closely (diskusi, Konsultasi, Komunikasi intensif)
8	Staf Media Analis	Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan	Tinggi	+/-	Membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan, serta berkontribusi pada isu	Defender	Manage Closely (diskusi, komunikasi intensif)
9	Redaktur dan Reporter Media Cetak	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, komunikasi intensif)
10	Redaktur dan Reporter Media Sosial & Website	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, komunikasi intensif)
11	Redaksi dan Reporter TV Parlemen	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, Komunikasi intensif)
12	Redaksi dan Reporter Radio Parlemen	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu dan pengolahan hasil penetapan isu sampai menjadi berita	Defender	Manage Closely (informatif, diskusi, Komunikasi intensif)

13	Pranata Humas	Berperan serta dalam kegiatan	Tinggi	+/-	Berkontribusi pada penetapan isu	Defender	<i>Manage Closely</i> (Diskusi, Komunikasi intensif)
Eksternal							
1	Pimpinan dan Anggota DPR	Sebagai Penerima manfaat	Tinggi	+	Memberikan dukungan pada kegiatan dan hasilnya	Laten	<i>Keep Informed</i> (Persuasif, Memberikan informasi)
2	Sekjen DPR	Bertanggung Jawab dalam memberikan dukungan	Tinggi	+	Memberikan dukungan kegiatan pemberitaan	Laten	Memberikan informasi, dan memperkuat interest agar dapat dipindahkan menjadi promotor
3	Deputi Persidangan	Bertanggung Jawab dalam memberikan dukungan	Tinggi	+	Memberikan dukungan kegiatan pemberitaan	Laten	Memberikan informasi, dan memperkuat interest agar dapat dipindahkan menjadi promotor
4	Masyarakat	Sasaran	Rendah	-	Dapat memberikan penilaian positif	Apathetic	Memberikan informasi secara terus-menerus
5	Media Massa	Sasaran	Rendah	-	Dapat memberikan penilaian positif	Apathetic	Memberikan informasi secara terus-menerus

10. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah, Resiko Dan Strategi Mengatasi Kendala/Masalah

NO	POTENSI KENDALA /MASALAH	RESIKO	STRATEGI MENGATASI KENDALA/MASALAH
1	Kurangnya Kerja sama dari Tim Efektif dalam kegiatan agenda setting;	Tidak terlaksananya kegiatan agenda setting	Membangun mindset yang sama bahwa kegiatan ini diperlukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberitaan
2	Kurangnya kesadaran tim akan pentingnya kegiatan	Terhambatnya peningkatan	Melakukan pendekatan persuasif, sambil mendorong dan memotivasi agar semangat

agenda setting bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan.	penyelenggaraan pemberitaan	dalam melaksanakan kegiatan agenda setting penetapan isu
--	-----------------------------	--

11. KRITERIA KEBERHASILAN

1. Terlaksananya kegiatan agenda setting bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui penetapan isu.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, yang ditandai dengan meningkatnya opini publik pada Dewan.

12. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Manajemen :

Berupa kinerja Tim yang solid dan optimal, penggunaan strategi kerja, komitmen dan kerjasama.

2. Organisasi :

Dukungan dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dan Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial sangat berperan dalam keberhasilan proyek perubahan ini.

3. Stakeholder Eksternal :

Dukungan dari segenap stakeholder eksternal akan memberi kontribusi keberhasilan yang besar.

13. JADWAL KEGIATAN LABORATORIUM PROYEK PERUBAHAN

Untuk memaksimalkan kegiatan proyek perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu bagi peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, akan dilaksanakan sebagaimana jadwal berikut ini :

NO	MILESTONE	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PIC	OUTPUT	EVIDENCE	WAKTU
1	Membentuk Tim Efektif	1) Membuat Surat permintaan nama Tim Efektif dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen kepada Kabag Media Cetak dan Media Sosial, dan Kabag TV dan Radio Parlemen;	Staf Analis Media	-Terbentuknya Tim Efektif -Surat Tugas Tim Efektif	-Surat permintaan Nama Tim Efektif -Surat Tugas Tim Efektif	Kamis 16 Mei 2019

		2) Mendistribusikan Surat Permintaan Nama Tim Efektif 3) Membuat Konsep Surat Tugas Tim Efektif 4) Final dan Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif 5) Pendistribusian Surat Tugas Tim Efektif				
2	Rapat Tim Efektif dengan agenda : a. Sosialisasi Proyek Perubahan; b. Menyamakan persepsi; c. Membangun komitmen bersama;	1) Persiapan pertemuan 2) Membuat undangan rapat 3) Pendistribusian undangan 4) Membuat Daftar hadir 5) Pelaksanaan Rapat Tim Efektif	Project Leader (PL)	- Tersosialisasikannya Proper - Terwujudnya Persepsi yang sama - Terbangunnya Komitmen Bersama	- Surat Undangan - Daftar hadir - Foto Rapat Tim - Notulen	Selasa, 21 Mei 2019
3	Rapat Tim Efektif dengan agenda menyusun petunjuk teknis/panduan kegiatan agenda setting	1) Persiapan pertemuan 2) Membuat undangan rapat 3) Pendistribusian undangan 4) Membuat Daftar hadir 5) Pelaksanaan Rapat Tim Efektif penyusunan panduan kegiatan	Project Leader	Draft Panduan / Petunjuk Teknis Agenda Setting	- Surat Undangan Rapat Tim - Daftar hadir - Foto Rapat Tim - Draft Panduan Agenda Setting - Notulen	Kamis, 23 Mei 2019
4	Membuat Surat Dukungan Proyek Perubahan	a. Membuat surat dukungan proyek perubahan b. Menghadap Mentor	Staf Analis Media & PL	- Surat Dukungan Proper	- Surat Dukungan Proyek Perubahan - Foto dengan Mentor	Jumat, 24 Mei 2019

5	Uji Coba (1) kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kepada Tim Efektif c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (1) kegiatan Agenda Setting	Staf Analis Media (untuk persiapan kegiatan) & PL	Draft Materi Isu (hasil uji coba 1)	-Surat Undangan -Daftar hadir -Foto -Notulen -Draft materi isu (Uji coba 1)	Jumat, 21 Juni 2019
6	Uji Coba (1) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media DPR	a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan; b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber (Pimpinan/Anggota DPR) c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi d.Redaktur/Redaksi melakukan pengeditan pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR	Redaktur / Redaksi	Berita di media DPR isunya sama	-Foto Berita di semua media DPR	Senin – Jumat, 24-28 Juni 2019
7	Evaluasi dan Monitoring hasil uji coba (1) Rapat Agenda Setting Penetapan Isu	Melakukan monitoring dan evaluasi	Project Leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (1)	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (1)	Senin, 1 Juli 2019
8	Uji Coba (2) kegiatan Agenda Setting Penetapan Isu	a.Persiapan Pertemuan b.Membuat Surat Undangan kepada Tim Efektif c.Pendistribusian Surat Undangan d.Membuat Daftar Hadir e.Pelaksanaan uji coba (2) kegiatan Agenda Setting	Staf Analis Media (untuk persiapan kegiatan) & PL	Draft Materi Isu (hasil uji coba 2)	-Surat Undangan -Daftar hadir -Foto -Notulen -Draft Materi Isu (hasil uji coba 2)	Jumat, 5 Juli 2019

9	Uji Coba (2) Isu hasil kegiatan Agenda Setting diolah oleh media DPR	<p>a.Redaktur/Redaksi menugaskan Reporter untuk melakukan wawancara kepada narasumber sesuai isu yang sudah ditetapkan;</p> <p>b.Reporter melakukan wawancara dengan narasumber</p> <p>c.Reporter membuat berita dan disampaikan kepada Redaktur/Redaksi</p> <p>d.Redaktur/Redaksi mengedit pada content dan meng-upload pada masing-masing media DPR</p>	Redaktur / Redaksi	Berita di media DPR Isunya sama	-Foto Berita di semua media DPR	Senin – Jumat, 8-12 Juli 2019
10	Evaluasi dan Monitoring hasil uji coba (2) Rapat Agenda Setting Penetapan Isu	Melakukan monitoring dan evaluasi	Project Leader	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (2)	Draft Laporan Evaluasi dan Monitoring uji coba (2)	15 Juli 2019

**PENJELASAN PENGUJI
TENTANG KEMAMPUAN PESERTA DALAM PERENCANAAN INOVASI**

Nama Peserta Diklatpim Tingkat IV : **Suciati, S.Sos.**
Nomor Absen : **5**

Saya menilai peserta dengan nama **Suciati, S.Sos.**

Sangat Mampu/Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan Perencanaan Inovasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Peserta mampu

- Judul belum menunjukkan inovasi sehingga proper meski materi cukup
= inovatif

- Mentor sangat mendukung

- Perlu perbaikan: Tujuan - Latar belakang - faktor kunci pelaksanaan
keberhasilan

Penguji,



Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
NIP. 196004191988032001

PENJELASAN MENTOR TENTANG KEMAMPUAN PESERTA DALAM PERENCANAAN INOVASI

Nama Peserta Diklatpim Tingkat IV : **Suciati, S.Sos.**
Nomor Absen : 5

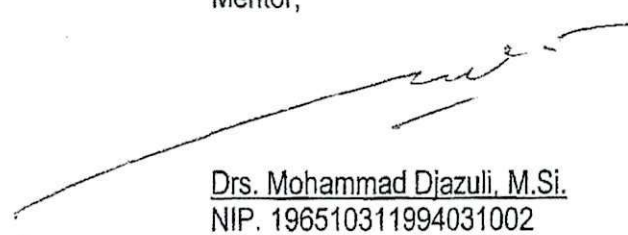
Saya menilai peserta dengan nama **Suciati, S.Sos.**

~~Sangat Mampu/Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu~~ melaksanakan Perencanaan Inovasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

agenda setting merupakan salah satu perencanaan isu yg akan dijadikan acuan dalam pemberitaan DPR melalui media yang di miliki yaitu TV, Radio, Majalah, Buletin dan media pendidikan masyarakat.

Dengan optimalisasi proses penyusunan agenda setting yg melibatkan Silwani stake Halder diharapkan mampu memutarakan isu wawa yg akan diangkat minggu depan melalui media yg di miliki. sangat mendukung peoper ini agar layang dapat di terapkan oleh silwani media.

Mentor,



Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 196510311994031002

PENJELASAN COACH TENTANG KEMAMPUAN PESERTA DALAM PERENCANAAN INOVASI

Nama Peserta Diklatpim Tingkat IV : **Suciati, S.Sos.**
Nomor Absen : 5

Saya menilai peserta dengan nama **Suciati, S.Sos.**

Sangat Mampu/Mampu/Kurang Mampu/Tidak Mampu melaksanakan Perencanaan Inovasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Sangat mampu -

- Judul: merajut masalah yang diangkat PO
- L B : dilihat barang apa saja ada - L B -
- Masalah } sd. Manfaat
- Tujuan }
- Manfaat }
- Output : isu yang braili longgi, aktual. mempengaruhi publik budayanya pada keluarga.
- MS - OK
- SH - OK.
- jadwal Kegiatan : OK Rincin

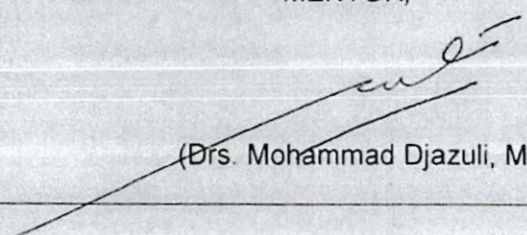
Coach,



Dra. Puji Astuti, M.Pd.

NIP. 195910141981032001

**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

1. Nama Peserta	: Suciati, S.Sos.
2. Unit Kerja	: Bagian Media Cetak dan Media Sosial
3. Gagasan Perubahan	: 1. Peningkatan Penyampaian Berita dan Pelayanan Informasi di Biro Pemberitaan Parlemen 2. Pemanfaatan Isu oleh Pimpinan DPR
Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta	
<p><i>gagasan perubahan untuk meningkatkan penyampaian layanan informasi kepada pimpinan melalui perubahan yang signifikan agar bisa DPR dapat lebih cepat layanan informasi dari DPR dan langsung di sampaikan oleh pimpinan ke publik</i></p>	
<p>Rekomendasi</p> <p><i>lebih lebih cepatnya gagasan nomor 1 (cepat) untuk peningkatan penyampaian berita pelayanan informasi di Biro Pemberitaan Parlemen</i></p>	
<p>Jakarta, 15 April 2019 MENTOR,</p> <p style="text-align: center;"> (Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.)</p>	

LAMPIRAN MILESTONE 1



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nota Dinas

Nomor : 472 / BP.01 / 5 / 2019

KEPADA : 1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
2. Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

DARI : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

PERIHAL : Permintaan Nama Tim Efektif

TANGGAL : 16 Mei 2019

Bersama ini kami beritahukan, bahwa dalam rangka mendukung kegiatan proyek perubahan Kepala Sub Analis Media dengan judul: "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Berkenaan dengan hal tersebut, kami minta Saudara untuk mengirimkan nama, 1 (satu) orang Kepala Sub (masing-masing sub bagian Media Cetak, Media Sosial, Program dan Produksi TV Parlemen, Radio Parlemen) dan 2 (dua) orang redaksi/reporter, 2 (dua) orang Pranata Humas untuk diikutsertakan ke dalam Tim Efektif, paling lambat hari Jum'at, 17 Mei 2019 ke Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen


Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si
NIP. 196010021982031004 -



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor: 140/BP.03/Kunker/V/2019

Kepada Yth. : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Dari : Kepala Bagian TVR Parlemen

Perihal : Penyampaian Nama Peliput

Tanggal : 15 Mei 2019

Berikut kami sampaikan nama peserta yang akan menghadiri kegiatan proyek perubahan Kepala Sub Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu", sebagai berikut :

1. M. Marlina Tampubolon (Reporter/ PPNPN TV Parlemen)
2. Farkhan Fajar Ilhami (Reporter/ PPNPN TV Parlemen)

Demikian kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian TVR Parlemen

Irfan, S. Sos. M. MSI

NIP. 19650910 198702 1 006

Tembusan:

-Kepala Biro Pemberitaan Parlemen



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NOMOR : 009/BP.02/05/2019

KEPADA YTH : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
DARI : Kepala Bagian Humas
HAL : Penyampaian Nama Tim Efektif
TANGGAL : 16 Mei 2019

Menindaklanjuti nota dinas dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dengan Nomor: 472/BP.01/5/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa Bagian Humas menugaskan 2 (dua) orang Pranata Humas untuk mendukung kegiatan proyek perubahan Kepala Sub Analis Media dengan judul: "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu, yaitu :

NO.	NAMA	NIP
1	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	198812172014022003
2	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom	199104262018011003

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Humas,

Minarni, S.H.

NIP. 19650620 199302 2 001



Ical Baru



MAY 15, 2019

Morning bang ical 8:56 AM ✓✓

2 orang dr Radio siapa yg mau dimasukin namanya u tim efektif saya

8:56 AM ✓✓

Tim radio cuman 4 orang hehe 9:02 AM

Ak sama Ratna aja ya? 9:02 AM

Suratnya bang ical 9:02 AM ✓✓

ditujukan ke Kabag Metaksos 9:02 AM ✓✓

Ratna Hapsari ya 9:03 AM ✓✓

Roy ngga 9:03 AM ✓✓

Ok Ratna ya....tp klo Ratna berhalangan bisa diganti Roy ya

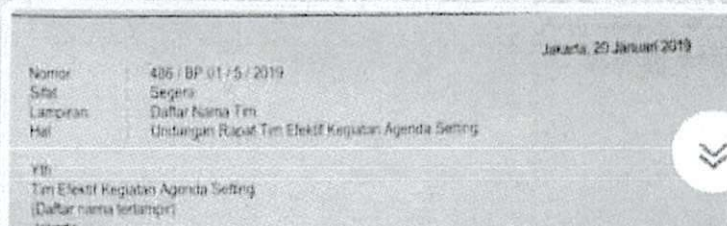
9:04 AM ✓✓

Roy bukan radio lagi. 9:06 AM

Ud balik ke TV 9:06 AM

Ohhh jadinya ada siapa aja 9:06 AM ✓✓

Ada Edo 9:13 AM



Type a message





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 476/BP.01/V/2015

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan agenda setting untuk menetapkan isu yang akan dikelola dan diolah menjadi berita di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
3. Surat Tugas Nomor PL/213/SETJEN DAN BK DPR RI/PL.02/03/2019 tentang Penugasan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara;

MENUGASKAN

Kepada :

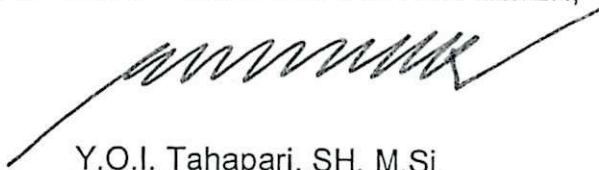
NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Suciati, S.Sos.	197207201994032002	Kasubag Analis Media (Project Leader)
2.	Nita Juwita, S.Sos.	198110182005022001	Kasubag Media Sosial & Website
3.	Sugeng Irianto, S.Sos.	198105032005021002	Kasubag Media Cetak

4.	Bayu Setiadi, S.IP.	197903262005021002	Kasubag Program & Produksi Televisi
5.	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	196802271997031002	Kasubag Radio
6.	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	198812172014022003	Pranata Humas
7.	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom	199104262018011003	Pranata Humas
8.	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	199410182018012003	Analisis Media
9.	Erman Suhendri, S.Sos.	198509242018011001	Reporter Media Cetak
10.	Ahyar Tibi, S.H.	PPNPN	Redaktu Analisis Media
11.	Mohamad Rizki Nugroho	PPNPN	Analisis Media
12.	Larissa Amanda Indianti	PPNPN	Analisis Media
13.	Deprisa Citra Akbari	PPNPN	Analisis Media
14.	Sunarya	PPNPN	Analisis Media
15.	Safitri Restu Widyowati	PPNPN	Analisis Media
16.	Fahmi Harfa	PPNPN	Analisis Media
17.	Singgih Kinanti Rimbani	PPNPN	Redaktur Media Sosial
18.	Siti Nadia	PPNPN	Reporter Media Sosial
19.	Sofyan Efendi	PPNPN	Redaktur Media Cetak
20.	Rahayu Setyowati	PPNPN	Reporter Media Cetak
21.	Hendra Sunandar	PPNPN	Reporter Media Cetak
22.	M. Marlina Tampubolon	PPNPN	Redaksi TV Parlemen
23.	Farkhan Fajar Ilhami	PPNPN	Reporter TV Parlemen
24.	Ratna Hapsari	PPNPN	Redaksi Radio Parlemen

Untuk : Melaksanakan dan berkontribusi dalam kegiatan agenda setting setiap hari Jumat dan menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut untuk dipublikasikan di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta, 20 Mei 2018
KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN,


Y.O.I. Tahapari, SH. M.Si.
NIP. 196010011982031004

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu”.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2019

Yang membuat pernyataan,

LAMPIRAN

MILESTONE 2



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Jakarta, 20 Januari 2019

Nomor : 486 / BP.01 / 5 / 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Daftar Nama Tim
Hal : Undangan Rapat Tim Efektif Kegiatan Agenda Setting

Yth
Tim Efektif Kegiatan Agenda Setting
(Daftar nama terlampir)
Jakarta


Dalam rangka mendukung kegiatan proyek perubahan Kepala Sub Analis Media dengan judul: "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu", bahwa akan diadakan Rapat Tim Efektif kegiatan Agenda Setting, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019.
Tempat : Ruang Rapat Radio Parlemen
Pukul : 13.00 WIB - Selesai.
Acara : 1. Sosialisasi Proyek Perubahan
2. Menyamakan Presepsi
3. Membangun Komitmen Bersama

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat turut serta pada kegiatan tersebut.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Pemberitaan
Parlemen,


Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si.
NIP: 196010021982031004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 476/BP.01/V/2015

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan agenda setting untuk menetapkan isu yang akan dikelola dan diolah menjadi berita di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
3. Surat Tugas Nomor PL/213/SETJEN DAN BK DPR RI/PL.02/03/2019 tentang Penugasan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara;

MENUGASKAN

Kepada :

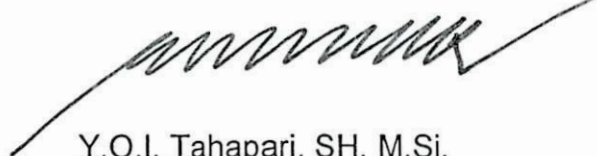
NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Suciati, S.Sos.	197207201994032002	Kasubag Analis Media (Project Leader)
2.	Nita Juwita, S.Sos.	198110182005022001	Kasubag Media Sosial & Website
3.	Sugeng Irianto, S.Sos.	198105032005021002	Kasubag Media Cetak

4.	Bayu Setiadi, S.IP.	197903262005021002	Kasubag Program & Produksi Televisi
5.	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	196802271997031002	Kasubag Radio
6.	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	198812172014022003	Pranata Humas
7.	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom	199104262018011003	Pranata Humas
8.	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	199410182018012003	Analisis Media
9.	Erman Suhendri, S.Sos.	198509242018011001	Reporter Media Cetak
10.	Ahyar Tibi, S.H.	PPNPN	Redaktu Analisis Media
11.	Mohamad Rizki Nugroho	PPNPN	Analisis Media
12.	Larissa Amanda Indianti	PPNPN	Analisis Media
13.	Deprisa Citra Akbari	PPNPN	Analisis Media
14.	Sunarya	PPNPN	Analisis Media
15.	Safitri Restu Widyowati	PPNPN	Analisis Media
16.	Fahmi Harfa	PPNPN	Analisis Media
17.	Singgih Kinanti Rimbani	PPNPN	Redaktur Media Sosial
18.	Siti Nadia	PPNPN	Reporter Media Sosial
19.	Sofyan Efendi	PPNPN	Redaktur Media Cetak
20.	Rahayu Setyowati	PPNPN	Reporter Media Cetak
21.	Hendra Sunandar	PPNPN	Reporter Media Cetak
22.	M. Marlina Tampubolon	PPNPN	Redaksi TV Parlemen
23.	Farkhan Fajar Ilhami	PPNPN	Reporter TV Parlemen
24.	Ratna Hapsari	PPNPN	Redaksi Radio Parlemen

Untuk : Melaksanakan dan berkontribusi dalam kegiatan agenda setting setiap hari Jumat dan menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut untuk dipublikasikan di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta, 20 Mei 2018
KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN,


Y.O.I. Tahapari, SH. M.Si.
NIP. 196010011982031004



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Proyek Perubahan Kepala Sub Analis Media Dengan Judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan Di Biro Pemberitaan Parlemen Melalui Penetapan Isu"

HARI/TANGGAL: Selasa, 21 Mei 2019

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
1	Suciati, S.Sos.	Kasubag Analis Media (Project Leader)	
2	Nita Juwita, S.Sos.	Kasubag Media Sosial & Website	
3	Sugeng Irianto, S.Sos.	Kasubag Media Cetak	
4	Bayu Setiadi, S.IP.	Kasubag Program & Produksi Televisi	
5	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	Kasubag Radio	
6	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	Pranata Humas	
7	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom.	Pranata Humas	
8	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	Analis Media	
9	Erman Suhendri, S.Sos.	Reporter Media Cetak	
10	Ahyar Tibi, S.H.	Redaktur Analis Media	
11	Mohamad Rizki Nugroho	Analis Media	
12	Larissa Amanda Indianti	Analis Media	
13	Deprisa Citra Akbari	Analis Media	
14	Sunarya	Analis Media	
15	Safitri Restu Widyowati	Analis Media	



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Proyek Perubahan Kepala Sub Analis Media Dengan Judul “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan Di Biro Pemberitaan Parlemen Melalui Penetapan Isu”

HARI/TANGGAL: Selasa, 21 Mei 2019

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
16	Fahmi Harfa	Analisis Media	
17	Singgih Kinanti Rimbani	Redaktur Media Sosial	
18	Siti Nadia	Reporter Media Sosial	
19	Sofyan Efendi	Redaktur Media Cetak	
20	Rahayu Setyowati	Reporter Media Cetak	
21	Hendra Sunandar	Reporter Media Cetak	
22	M. Marlina Tampubolon	Redaksi TV Parlemen	
23	Farkhan Fajar Ilhami	Reporter TV Parlemen	
24	Ratna Hapsari	Redaksi Radio Parlemen	
25	Jaka	Redaksi	
26	Husen	Media Cetak	
27	Ryan Hidayat	Media Sosial	
28			
29			
30			

RESUME

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2019

Pukul : 13.00 – 14.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Radio dan Televisi DPR RI

Acara : 1. Sosialisasi Proyek Perubahan
2. Menyamakan Persepsi
3. Membangun Komitmen Bersama

Rapat dibuka dan
ditutup oleh : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Drs. Muhamad Djazuli, M.Si.

Rapat dipimpin oleh : Kepala Sub Bagian Analis Media
Suciati, S.Sos.

Rapat dihadiri : 24 orang Tim Agenda Setting

1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Metaksos) sebagai Menthor membuka rapat agenda setting. Menyampaikan Tim Agenda Setting yang dibentuk ini bukan hanya untuk tujuan Proyek Perubahan dari Kepala Sub Bagian Analis Media, tapi merupakan Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen.
2. Kabag Metaksos juga menyampaikan Rapat Agenda Setting yang akan dilaksanakan nantinya pun tidak berhenti sampai Diklat Kepemimpinan Kasubag Analis Media selesai, tapi akan berkelanjutan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen.
3. Kepala Sub Bagian Analis Media sebagai Project Leader menyampaikan bahwa Proyek Perubahannya berjudul “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu” disingkat OPTIK SETIA.

4. Sebagaimana judulnya, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di media internal DPR di bawah Biro Pemberitaan Parlemen, baik di Media Cetak, Media Sosial dan Website, TV Parlemen maupun di Radio Parlemen.
5. Project Leader menyampaikan, kegiatan agenda setting yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat dan didukung oleh seluruh unit penyelenggara pemberitaan yang sudah terbentuk dalam Tim Agenda Setting ini adalah untuk menetapkan isu sepekan bagi pengelolaan berita media internal DPR.
6. Project Leader menyampaikan Tata Kelola Proyek Perubahan OPTIK SETIA, bahwa isu yang ditetapkan pada Rapat Agenda Setting akan disampaikan kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, distribusikan kepada seluruh media internal DPR. Kemudian Redaksi/Redakstur menugaskan Reporter untuk melakukan peliputan/wawancara pada narasumber terkait isu yang ditetapkan, selanjutnya Reporter membuat berita, yang akan disampaikan kepada Redaksi/Redaktur, kemudian Redaksi/Redaktur melakukan pengeditan sampai di upload di masing-masing media internal DPR.
7. Project Leader menyampaikan uji coba pertama agenda setting akan dilaksanakan pada Jumat, tanggal 21 Juni 2019 dan implementasi hasil agenda setting pada pekan keempat Juni (24 – 28 Juni 2019), namun sebelumnya akan diselenggarakan rapat Tim Agenda Setting untuk menyusun Pedoman Rapat Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen pada Kamis, 23 Juni 2019.
8. Reporter Media Cetak mengusulkan untuk membentuk WA Group Agenda Setting, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi diantara anggota Tim Agenda Setting.
9. Project Leader menyetujui usulan tersebut, dan meminta kepada semua anggota tim agenda setting untuk aktif dan memberikan masukan terhadap isu-isu yang akan dibahas dalam rapat agenda setting baik melalui rapat agenda setting maupun melalui grup whatsapp, untuk yang tidak hadir diharapkan dapat menyampaikan usulannya melalui WA Group Agenda Setting;
10. Kepala Subbagian Radio Parlemen mengusulkan, setiap perwakilan yang terlibat dalam pemberitaan harus datang dalam agenda harian (rapat rekomendasi), sementara untuk agenda mingguan (Rapat Agenda Setting) wajib dihadiri oleh pejabat;
11. Kepala Subbagian TV Parlemen mengusulkan agar Kepala Sub Bagian Analis Media untuk menghadiri rapat redaksi di TV Parlemen, guna mengetahui kondisi dan situasi rapat redaksi TVR Parlemen, dan mengusulkan agar Project Leader untuk mengkonsep hasil produk yang akan dipresentasikan saat ujian agar dapat dipersiapkan sedini mungkin;
12. Pranata Humas mengusulkan untuk mengangkat isu Pemilu 2019, sebab isu tersebut diperkirakan masih “panas” dibahas karena sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia, dan mengusulkan untuk membuat media mapping, seperti contoh Kompas lebih pro ke salah satu fraksi;
13. Redaktur Analis Media mengusulkan panduan agenda setting yang akan disusun memasukkan batasan-batasan isu yang akan diangkat;
14. Redaktur TV Parlemen mengusulkan pada pedoman agenda setting agar diperjelas apakah isu yang akan diangkat adalah isu aktual atau yang timeless sebagai dasar pemberitaan DPR, seperti: check and balances nawacita presiden (Infrastruktur).

Jakarta, 21 Mei 2019



Tim Agenda Setting

Aga Prahum, Anne, Ayu, Bayu, dena, Dena,...



MAY 21, 2019

🔒 Messages to this group are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info.

You created group "Tim Agenda Setting"

Selamat Malam Bapak2/Ibu2.....sy
buat group Tim Agenda Setting....u
kita saling komunikasi dan koordinasi
dalam menetapkan isu bagi media kita
bersama.....smoga dukungan dan peran
serta teman2 dapat meningkatkan
kinerja kita di biro pemberitaan dan
meningkatkan kepercayaan publik
kepada lembaga DPR dr berita yg kita
publikasikan....amiiin

8:19 PM ✓✓

You added dena humas and Dena Humas2

Ada yg punya no nya Ratna dan
Agra....mohon dishare

8:21 PM ✓✓

Dan Farhan TV Parle

8:21 PM ✓✓

Dena Humas2



**Aga Prahum DPR RI
and 1 other contact**

8:21 PM



[View all](#)

Monaco bu Suci. 8:21 PM



Type a message





Rapat Tim Efektif Agenda Setting dengan agenda Sosialisasi Proper, Menyamakan Persepsi, dan Membangun Komitmen Bersama, Selasa, 21 Mei 2019 di Ruang Rapat Radio Parlemen.

LAMPIRAN MILESTONE 3



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Panduan Rapat Agenda Setting

Penetapan Isu bagi Media Internal Dewan


-
1. Rapat *agenda setting* penetapan isu bagi media internal DPR RI (Media Cetak, Media Sosial dan Website, TV Parlemen, dan Radio Parlemen) dilaksanakan setiap hari Jumat (setelah rapat agenda setting dan manajemen isu sub analisis media).
 2. Rapat *agenda setting* penetapan isu dihadiri antara lain :
 - a. Kasubag Analis Media (Project Leader)
 - b. Kasubag Media Cetak
 - c. Kasubag Media Sosial dan Website
 - d. Kasubag TV Parlemen
 - e. Kasubag Radio Parlemen
 - f. Pranata Humas
 - g. Staf Analis Media
 - h. Redaktur Media Cetak
 - i. Redaktur Media Sosial
 - j. Redaksi TV Parlemen
 - k. Redaksi Radio Parlemen
 3. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan isu yang akan diolah menjadi berita di media internal DPR, antara lain :
 - a. Penetapan isu bagi media internal DPR adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Dewan dan untuk meningkatkan Citra Dewan.
 - b. Isu yang dipilih untuk mengcounter dan mengimbangi pemberitaan negatif tentang Dewan.
 - c. Isu yang dipilih tidak berisfat Politis dan tidak terkait salah satu Partai Politik, karena di DPR terdiri dari banyak Partai Politik.
 - d. Posisi DPR adalah sebagai check and balances terhadap pemerintahan, oleh karena itu isu yang dipilih bukan untuk menyudutkan pemerintah tapi untuk mengawasi kinerja pemerintah.
 - e. Isu yang dipilih bukan isu regional, tapi nasional.
 - f. Isu yang dipilih adalah isu aktual, dan isu yang berkembang di alat kelengkapan dewan yang dampak dan pengaruhnya pada masyarakat luas.
 - g. Isu yang dipilih adalah terkait fungsi dewan yaitu anggaran, pengawasan, legislasi, diplomasi dan penyerapan aspirasi.

- h. Ketika DPR ingin menggoalkan sesuatu, misalkan RUU, maka ini menjadi isu utama yang diangkat.
 - i. Diharapkan tidak memfollow isu, tapi media internal meng-create isu.
 - j. Dalam pemilihan Isu juga harus diperhatikan waktu, agar tidak menjadi berita yang basi.
 - k. Rapat agenda setting penetapan isu juga menentukan dari sudut mana/angle isu tersebut akan diolah menjadi berita.
4. Draft isu yang ditetapkan bersama pada rapat agenda setting, akan disampaikan kepada Kepala Biro Pemberitaan melalui Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial dan/atau Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen untuk mendapatkan persetujuan.
- Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Biro Pemberitaan Parlemen akan disampaikan ke masing-masing Kepala Sub Bagian dan Redaktur/Redaksi media internal Dewan untuk ditindaklanjuti sampai menjadi berita dan diupload di masing-masing media dalam waktu sepekan.

Demikian panduan rapat agenda setting penetapan isu ini dibuat, untuk dijadikan panduan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan.

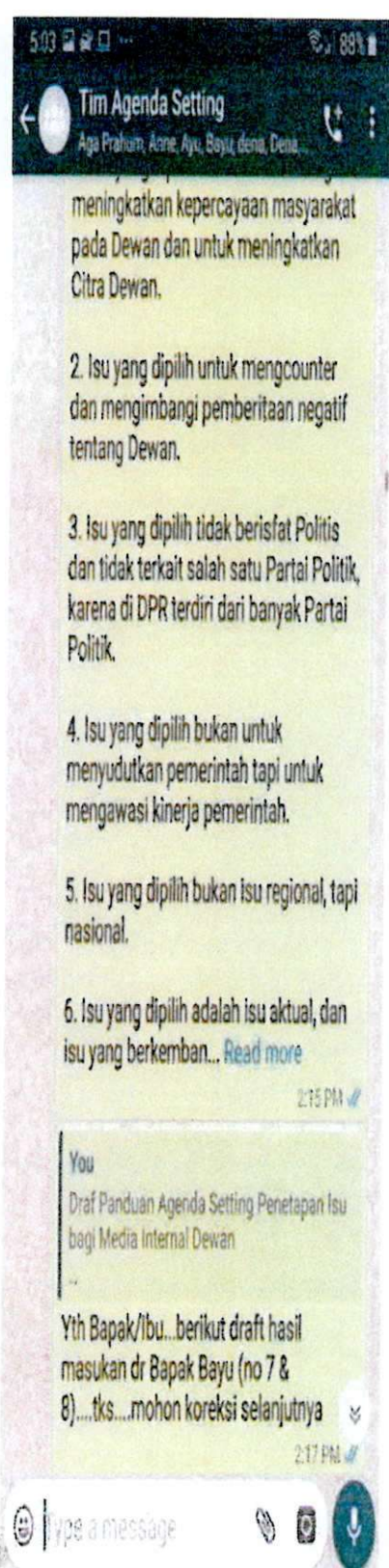
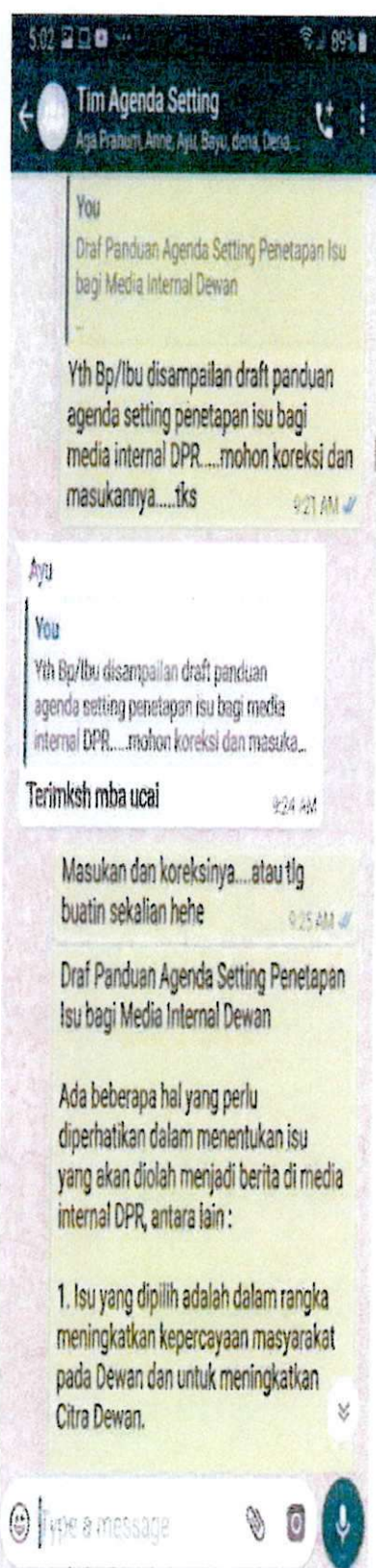
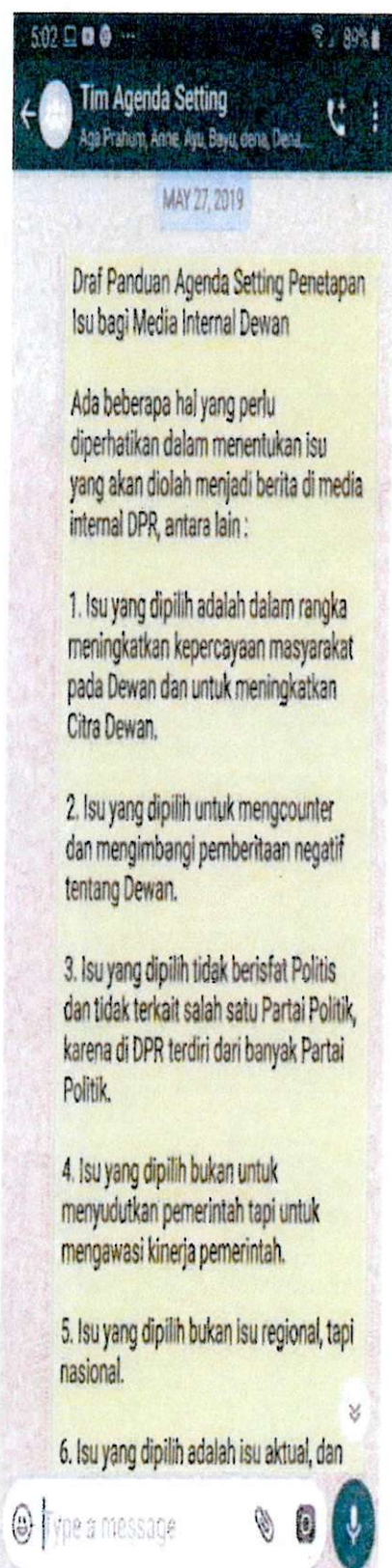
Jakarta, 31 Mei 2019

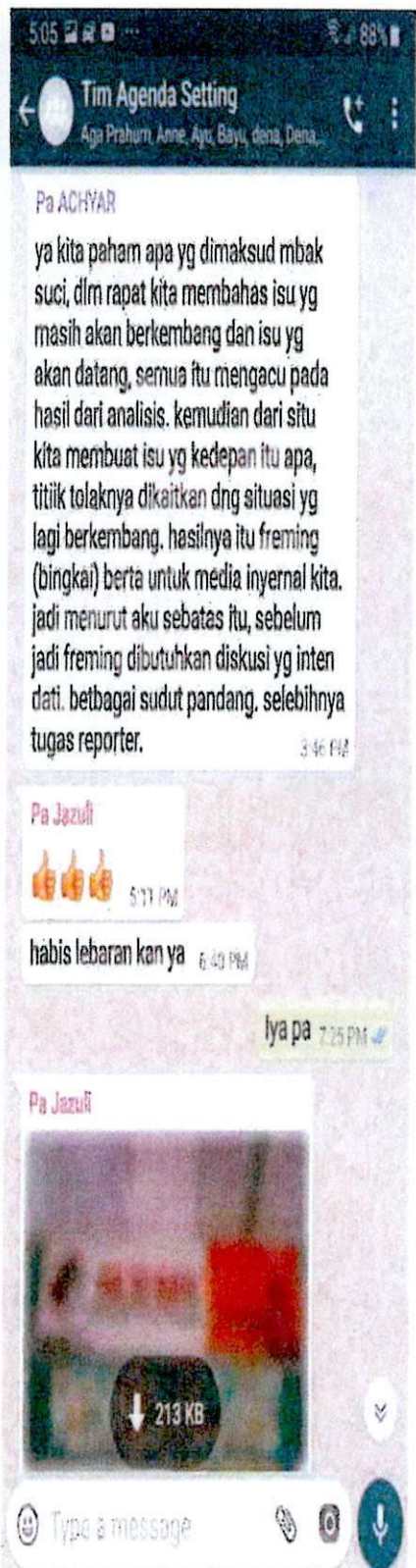
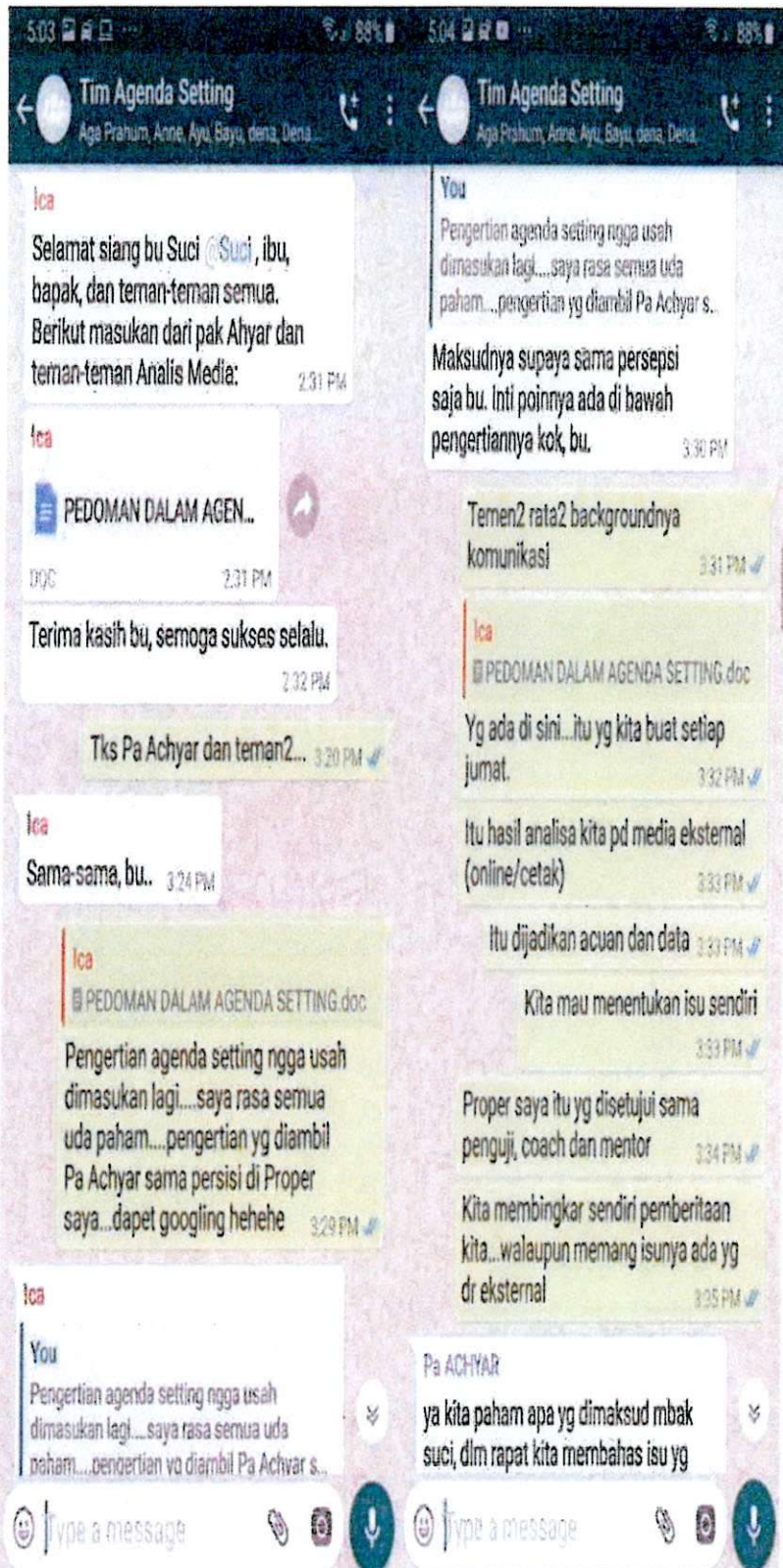
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,

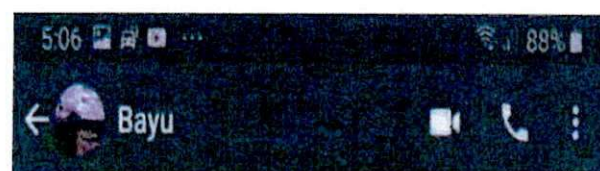


Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si.

NIP. 19601001 198203 1 004







karena di DPR terdiri dari banyak Partai Politik.

4. Isu yang dipilih bukan untuk menyudutkan pemerintah tapi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

5. Isu yang dipilih bukan isu regional, tapi nasional.

6. Isu yang dipilih adalah isu aktual, dan isu yang berkembang... [Read more](#)

11:05 AM

Yth Bp/Ibu disampailan draft panduan agenda setting penetapan isu bagi media internal DPR.....mohon koreksi dan masukannya.....tnks

11:05 AM

No 7 ditambahin : penyerapan aspirasi dan diplomasi

2:03 PM

No 8. Ketika dpr ingin menggoalkan sesuatu, misalkan ruu, maka ini menjadi isu yang diangkat

2:04 PM

Mungkin itu dari gw ya ci

2:05 PM

Terimakasih 🙏

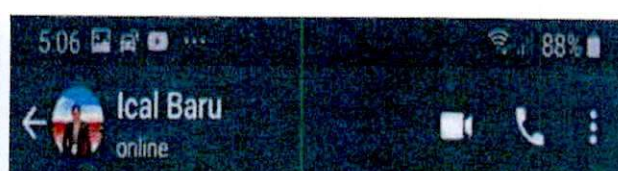
2:05 PM

Tks papa bay

2:12 PM

Sama2 ci

2:12 PM



2. Isu yang dipilih untuk mengcounter dan mengimbangi pemberitaan negatif tentang Dewan.

3. Isu yang dipilih tidak berisfat Politis dan tidak terkait salah satu Partai Politik, karena di DPR terdiri dari banyak Partai Politik.

4. Isu yang dipilih bukan untuk menyudutkan pemerintah tapi untuk mengawasi kinerja pemerintah.

5. Isu yang dipilih bukan isu regional, tapi nasional.

6. Isu yang dipilih adalah isu aktual, dan isu yang berkembang... [Read more](#)

2:12 PM

Yth Bp/Ibu disampailan draft panduan agenda setting penetapan isu bagi media internal DPR.....mohon koreksi dan masukannya.....tnks

2:12 PM

Hehe kepanjangan lagi lemot mikir..

2:44 PM

Puase hehe.. 😊

2:44 PM

Hehrhr

3:17 PM



LAMPIRAN MILESTONE 4



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Rabu, 19 Juni 2019

Nomor : 540 / BP.01 / 6 / 2019
Sifat : Segera
Lampiran : (Daftar Nama Terlampir)
Hal : Undangan Rapat Agenda Setting

Yth
Tim Agenda Setting
(Daftar nama terlampir)
Jakarta


Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, Biro Pemberitaan Parlemen akan mengadakan Rapat Agenda Setting yang akan di selenggarakan:

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2019
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Acara : Rapat Agenda Setting
Tempat : Ruang Fansus B Lt. 3 Gd. Nusantara II DPR RI

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat turut serta pada kegiatan tersebut.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,


Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si
NIP. 196010021982031004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 476/BP.01/V/2015

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan agenda setting untuk menetapkan isu yang akan dikelola dan diolah menjadi berita di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;

3. Surat Tugas Nomor PL/213/SETJEN DAN BK DPR RI/PL.02/03/2019 tentang Penugasan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara;

MENUGASKAN

Kepada :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Suciati, S.Sos.	197207201994032002	Kasubag Analis Media (Project Leader)
2.	Nita Juwita, S.Sos.	198110182005022001	Kasubag Media Sosial & Website
3.	Sugeng Irianto, S.Sos.	198105032005021002	Kasubag Media Cetak

4.	Bayu Setiadi, S.IP.	197903262005021002	Kasubag Program & Produksi Televisi
5.	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	196802271997031002	Kasubag Radio
6.	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	198812172014022003	Pranata Humas
7.	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom	199104262018011003	Pranata Humas
8.	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	199410182018012003	Analisis Media
9.	Erman Suhendri, S.Sos.	198509242018011001	Reporter Media Cetak
10.	Ahyar Tibi, S.H.	PPNPN	Redaktu Analisis Media
11.	Mohamad Rizki Nugroho	PPNPN	Analisis Media
12.	Larissa Amanda Indianti	PPNPN	Analisis Media
13.	Deprisa Citra Akbari	PPNPN	Analisis Media
14.	Sunarya	PPNPN	Analisis Media
15.	Safitri Restu Widyowati	PPNPN	Analisis Media
16.	Fahmi Harfa	PPNPN	Analisis Media
17.	Singgih Kinanti Rimbani	PPNPN	Redaktur Media Sosial
18.	Siti Nadia	PPNPN	Reporter Media Sosial
19.	Sofyan Efendi	PPNPN	Redaktur Media Cetak
20.	Rahayu Setyowati	PPNPN	Reporter Media Cetak
21.	Hendra Sunandar	PPNPN	Reporter Media Cetak
22.	M. Marlina Tampubolon	PPNPN	Redaksi TV Parlemen
23.	Farkhan Fajar Ilhami	PPNPN	Reporter TV Parlemen
24.	Ratna Hapsari	PPNPN	Redaksi Radio Parlemen

Untuk : Melaksanakan dan berkontribusi dalam kegiatan agenda setting setiap hari Jumat dan menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut untuk dipublikasikan di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta, 20 Mei 2018
KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN,



Y.O.I. Tahapari, SH. M.Si.

NIP. 196010011982031004



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Proyek Perubahan Kepala Sub Analis Media Dengan Judul “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan Di Biro Pemberitaan Parlemen Melalui Penetapan Isu”

HARI/TANGGAL: Jum'at, 21 Juni 2019

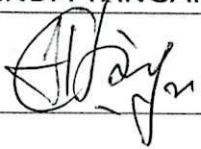

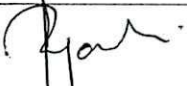
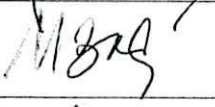

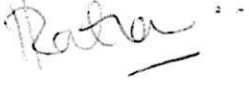



No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
1	Suciati, S.Sos.	Kasubag Analis Media (Project Leader)	
2	Nita Juwita, S.Sos.	Kasubag Media Sosial & Website	
3	Sugeng Irianto, S.Sos.	Kasubag Media Cetak	
4	Bayu Setiadi, S.IP.	Kasubag Program & Produksi Televisi	
5	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	Kasubag Radio	
6	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	Pranata Humas	
7	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom.	Pranata Humas	
8	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	Analis Media	
9	Erman Suhendri, S.Sos.	Reporter Media Cetak	
10	Ahyar Tibi, S.H.	Redaktur Analis Media	
11	Mohamad Rizki Nugroho	Analis Media	
12	Larissa Amanda Indianti	Analis Media	
13	Deprisa Citra Akbari	Analis Media	
14	Sunarya	Analis Media	
15	Safitri Restu Widyowati	Analis Media	



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Proyek Perubahan Kepala Sub Analis Media Dengan Judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan Di Biro Pemberitaan Parlemen Melalui Penetapan Isu"

HARI/TANGGAL: Jum'at, 21 Juni 2019

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
16	Fahmi Harfa	Analisis Media	
17	Singgih Kinanti Rimbani	Redaktur Media Sosial	
18	Siti Nadia	Reporter Media Sosial	
19	Sofyan Efendi	Redaktur Media Cetak	
20	Rahayu Setyowati	Reporter Media Cetak	
21	Hendra Sunandar	Reporter Media Cetak	
22	Devi Iriandi	Reporter Media Cetak	
23	Muhammad Husen	Reporter Media Cetak	
24	M. Marlina Tampubolon	Redaksi TV Parlemen	
25	Farkhan Fajar Ilhami	Reporter TV Parlemen	
26	Ratna Hapsari	Redaksi Radio Parlemen	
27	Nafisa Hanum	Reporter Media Sosial	
28	Djazzuli	Lab media	
29	Zoel Arif	Humas	
30			



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Keputusan Rapat Tim Agenda Setting

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019

Pukul : 14.30 – 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR RI

Acara : Penetapan Isu bagi Media Internal DPR RI

Rapat dibuka dan
ditutup oleh : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

Rapat dipimpin oleh : Kepala Sub Bagian Analis Media
Suciati, S.Sos.

Rapat dihadiri : 19 orang Tim Agenda Setting

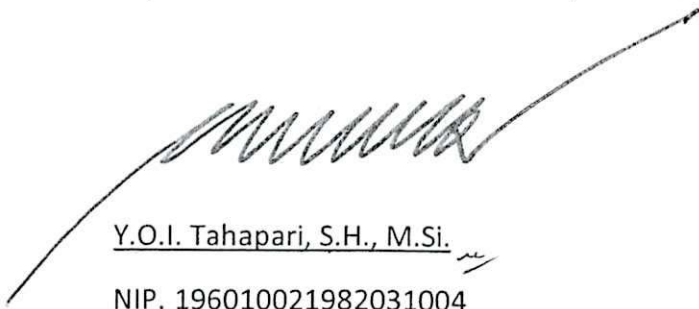
Keputusan : 1) Rapat Tim Agenda Setting telah menetapkan isu yang akan diolah dan diangkat menjadi pemberitaan di media internal DPR RI pekan ketiga Juni 2019, adalah : Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.
2) Media Interna DPR RI akan focus pada sudut antara lain :
a. Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,
b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah,

- c. Sistem Zonasi untuk menghapus adanya stigma 'sekolah unggulan',
 - d. Masih adanya daerah 'blank spot',
 - e. Pemerataan pendidikan (siswa kurang mampu dan siswa yang mampu memiliki peluang yang sama),
 - f. Berbagai masalah yang timbul dan dialami Siswa/i dan orangtua dengan adanya sistem zonasi.
- 3) Agar lebih efektif, Tim Media Internal DPR akan melakukan peliputan bersama terkait isu Sistem Zonasi pada PPDB Tahun 2019.

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berakhir dan ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2019

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,



Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si.

NIP. 196010021982031004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

RESUME

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen

Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juni 2019

Pukul : 14.30 – 15.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II DPR RI

Acara : Penetapan Isu bagi Media Internal DPR RI

Rapat dibuka dan
ditutup oleh : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

Rapat dipimpin oleh : Kepala Sub Bagian Analis Media
Suciati, S.Sos.

Rapat dihadiri : 19 orang Tim Agenda Setting

1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Metaksos) sebagai Menthor membuka rapat agenda setting. Kabag Metaksos mengingatkan kembali bahwa Rapat Agenda Setting ini adalah Rapat Koordinasi Biro Pemberitaan Parlemen bukan hanya terkait untuk menyelesaikan Proyek Perubahan semata, untuk menentukan isu sepekan yang akan diolah menjadi berita di media lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen antara lain media cetak, media social dan website DPR, TV Parlemen dan Radio Parlemen.
2. Kabag Metaksos menyerahkan kepada Kepala Sub Analis Media sebagai *project leader* untuk memimpin Rapat Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen.
3. Kepala Sub Analis menjelaskan, isu yang ditetapkan pada Rapat Agenda Setting akan dilaporkan kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, setelah mendapatkan persetujuan akan disampaikan kepada seluruh Redaksi/Redaktur media internal DPR untuk ditindaklanjuti sampai menjadi berita yang diupload di media internal DPR.

4. Disampaikan hasil koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Produksi dan Redaksi TV Parlemen, kegiatan peliputan baik media cetak, media sosial dan TV Parlemen akan dilakukan secara bersamaan.
5. Kepala Sub Analis Media mengusulkan isu yaitu : Pemotongan Anggaran Kementerian dan Lembaga dan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sementara KABag Metaksos mengusulkan Target 6 RUU yang akan diselesaikan DPR diakhir periode.
6. Seluruh anggota tim agenda setting yang hadir aktif memberikan masukan isu-isu yang akan diangkat bagi penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Redaksi TV Parlemen memberikan masukan isu sistem zonasi PPDB yang menjadi *hot issue*, bahwa sistem zonasi ini untuk menghilangkan stigma sekolah favorite, siswa yang mampu dan yang kurang mampu mempunyai peluang yang sama.
 - b. Redaksi Radio Parlemen memberikan masukan isu sistem zonasi PPDB dilihat dari sudut pandang pada kendala-kendala dalam sistem zonasi. Ia mengusulkan Isu RUU Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Karena hasil dari Dialog di RRI banyak masyarakat yang merespon dibandingkan ketika mengangkat isu RUU Lembaga Pemasyarakatan;
 - c. Reporter Media Cetak setuju isu sistem zonasi PPDB, dan memberikan masukan media internal untuk fokus pada sisi pengawasan dimana masih adanya zona blank spot pada sistem zonasi dan masih kurangnya dan belum meratanya sekolah negeri. Selain itu, ia mengusulkan isu tentang 'mengembalikan Bulog sebagai lembaga Nirlaba'. Isu ini berdasarkan hasil RDP Komisi IV DPR RI bersama Perum Bulog;
 - d. Reporter Media Sosial menyampaikan isu sistem zonasi paling banyak diperbincangkan saat ini di media social. Ia mengusulkan media internal focus pada sudut pandang pemerintah dan orangtua wali murid yang putra/i akan mendaftarkan sekolah;
 - e. Pranata Humas meminta penjelasan terkait sudut pandang Agenda Setting, serta memberikan masukan terkait perlunya peran DPR pada sistem zonasi PPDB untuk menaikkan citra DPR menjadi lebih baik;
 - f. Tim Analis Media memberikan masukan isu terkait 'sistem zonasi PPDB' namun dilihat dari implementasi Permendikbud nomor 51 tahun 2018 dan perlunya sosialisasi;
 - g. Kepala Sub Bagian Produksi TV Parlemen mengusulkan untuk pekan depan isu sistem zonasi dan media internal selain focus sebagaimana yang disampaikan Tim Agenda Setting juga focus pada tujuan dari Sistem Zonasi itu sendiri.

7. Kepala Sub Bagian Analis Media menyetujui usul mengangkat isu Sistem Zonasi. Menyampaikan isu pemotongan anggaran sebagaimana hasil rapat-rapat di semua alat kelengkapan DPR, Kementerian dan Lembaga menerima pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah. Dan menyampaikan jika media internal mengangkat isu target penyelesaian RUU itu bagi menepuk air dalam dulang mengenai muka sendiri.
8. Rapat Tim Agenda hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 menetapkan isu "Sistem Zonasi" untuk penyelenggaran pemberitaan di media internal DPR pekan depan, dengan fokus pada antara lain : Payung hukum Permendikbud Nomor 51 tahun 2018, Kurangnya Sosialisasi, tujuan sistem zonasi dan realita di lapangan, anggaran, masalah yang timbul pada saat pelaksanaan yang dimulai Senin 24 Juni 2019 dan bagaimana solusinya.

Jakarta, 21 Juni 2019



Rapat Uji Coba 1 Agenda Setting Penetapan Isu, yang menetapkan isu Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019, Jumat, 21 Juni 2019 di Ruang Rapat Pansus B.

LAMPIRAN MILESTONE 5

OTI WhatsApp | Parlemenaria Terkini - Dawa... | dpr.go.id/berita/index/kegiatan/komisi10/2

Mari | Pencarian | Webmail | Kontak

PPID | TVR Parlemen | Layanan | En

Ferdiansyah Terima Audiensi Mahasiswa Universitas Galuh Ciamis
26 Juni 2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menerima audiensi mahasiswa dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial (FIPS) Universitas Galuh Ciamis, Jawa...

Stigma Sekolah Favorit Harus Ditanggalkan
26 Juni 2019 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Latifah Sohib menjelaskan, stigma sekolah favorit dan non-favorit dapat ditanggalkan masyarakat, bila semua sekolah...

Penja Sarpras Pendidikan Dukung Pemerintah Segera Bentuk Skala Prioritas
26 Juni 2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Latifah Sohib menjelaskan apabila pelaksanaan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berhasil berarti ingin berjalan...

Masyarakat Sepatutnya Tanggalkan Stigma Sekolah Favorit
26 Juni 2019 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Latifah Sohib menjelaskan masyarakat untuk saling mendukung membantu Pemerintah menghilangkan stigma sekolah favorit, ia tidak...

Mendikbud Diminta Perhatikan Sekolah Inklusi

FORUM SLATURAHIM 215 '17
+62 815 0660-5171 | 12 Stroke
FORUM SLATURAHIM 215 '17

OTI Khasidja | Parlemenaria Terkini - Dawa... | dpr.go.id/berita/index/kegiatan/komisi10/2

Mari | Pencarian | Webmail | Kontak

PPID | TVR Parlemen | Layanan | En

Perubahan Sistematis RUU Ekraf Disepakati
25 Juni 2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI dan Pemerintah menandatangani perubahan sistematis Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Kreatif (Ekraf). Perubahan tersebut meliputi...

Komisi X Dukung Penambahan Anggaran Kemendikbud
25 Juni 2019 / KOMISI X
Komisi X DPR RI akan mendukung penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1,2 triliun...

PPDB Zonasi Ditinjau Balik, Tapi Terlarut Terbunuh
25 Juni 2019 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fatah meminta hadirnya lembaga Perantara Nomen Pembinaan dan Kebudayaan (Permenbud) Nomor 51 tahun...

Lemahnya Sosialisasi Penyebab Kieruknya Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi

Facebook post from DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dated 1 jam (1 hour) ago. The post features a video of a woman speaking at a podium, likely during a press conference or public hearing. The text of the post reads: [VIDEO] Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Rini Marlinawati terkait Revisi Permentdikbud 51/2018 tentang jalur prestasi di lingkungan menjadi 15 persen dalam Penyerapan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi. #Komisi10 #PPDB #JalurZonasiPPDB. The post has 1 Like and 1 Comment. The right sidebar shows the 'Tentang' (About) section for DPR RI, including contact information and a 'Transparansi Halaman' (Page Transparency) section. The bottom right corner indicates 'Obrolan (27)' (Chats 27).

Facebook post from DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dated 6 jam (6 hours) ago. The post features a video of a man speaking at a podium, likely during a press conference or public hearing. The text of the post reads: [VIDEO] Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih terkait Revisi Permentdikbud 51/2018 tentang jalur prestasi di lingkungan menjadi 15 persen dalam Penyerapan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi. #Komisi10 #PPDB #JalurZonasiPPDB. The post has 1 Like and 1 Comment. The right sidebar shows the 'Komunitas' (Communities) section, including a list of groups and a 'Tentang' (About) section. The bottom right corner indicates 'Obrolan (27)' (Chats 27).

**DPR RI**
@DPR_RI

[VIDEO] Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi. [#Komisi10](#) [#PPDB](#) [#JalurZonasiPPDB](#)

[Terjemahkan Tweet](#)

1.022 penayangan

13.31 - 25/06/19 - [Twitter Media Studio](#)[Tambahkan Tweet lain](#)**DPR RI**
@DPR_RI

[VIDEO] Tanggapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih terkait Revisi Permendikbud 51/2018 tentang jalur prestasi ditingkatkan menjadi 15 persen dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi. [#Komisi10](#) [#PPDB](#) [#JalurZonasiPPDB](#)

[Terjemahkan Tweet](#)

774 penayangan

[Tambahkan Tweet lain](#)

DPR RI
@DPR_RI

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi X
DPR RI Ferdiansyah terkait Revisi
Permendikbud nomor 51 tahun 2018
tentang PPDB yang masih
menimbulkan polemik. #Komisi10
#PPDB #JalurZonasiPPDB

Terjemahkan Tweet

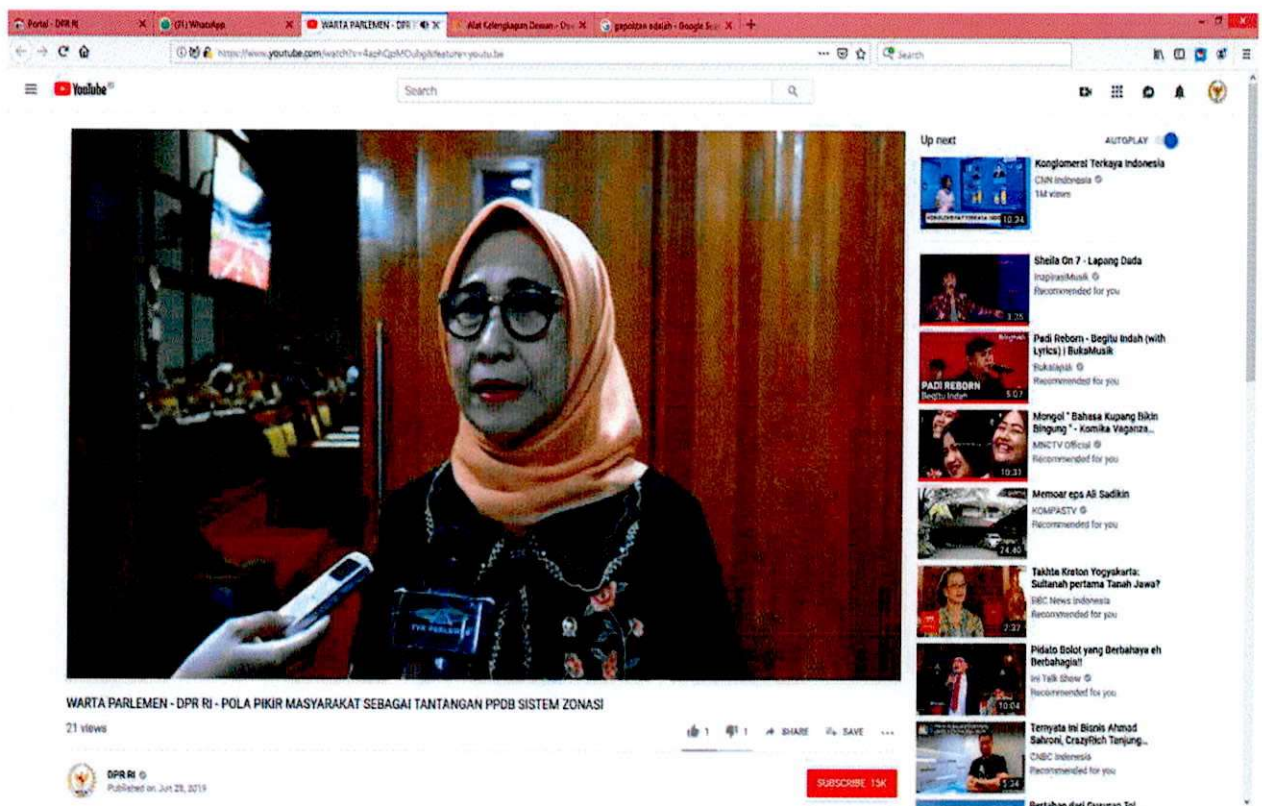
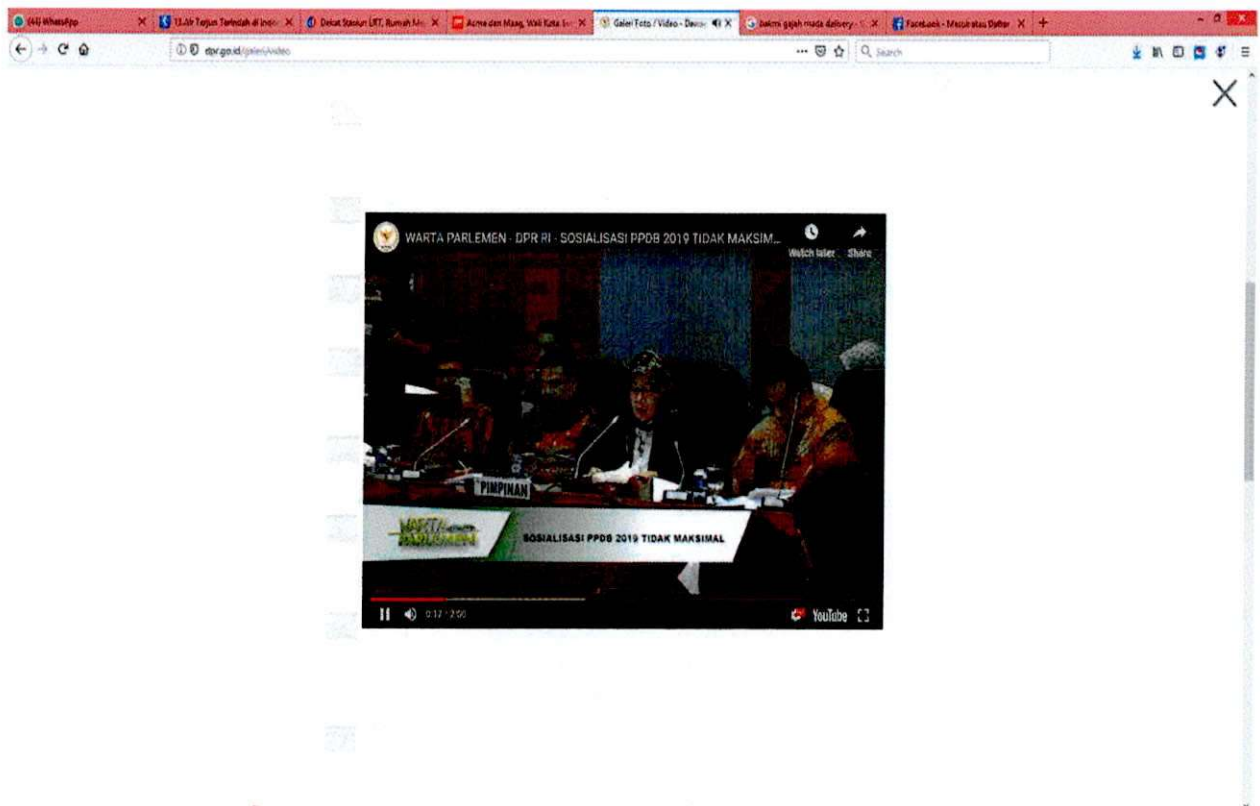


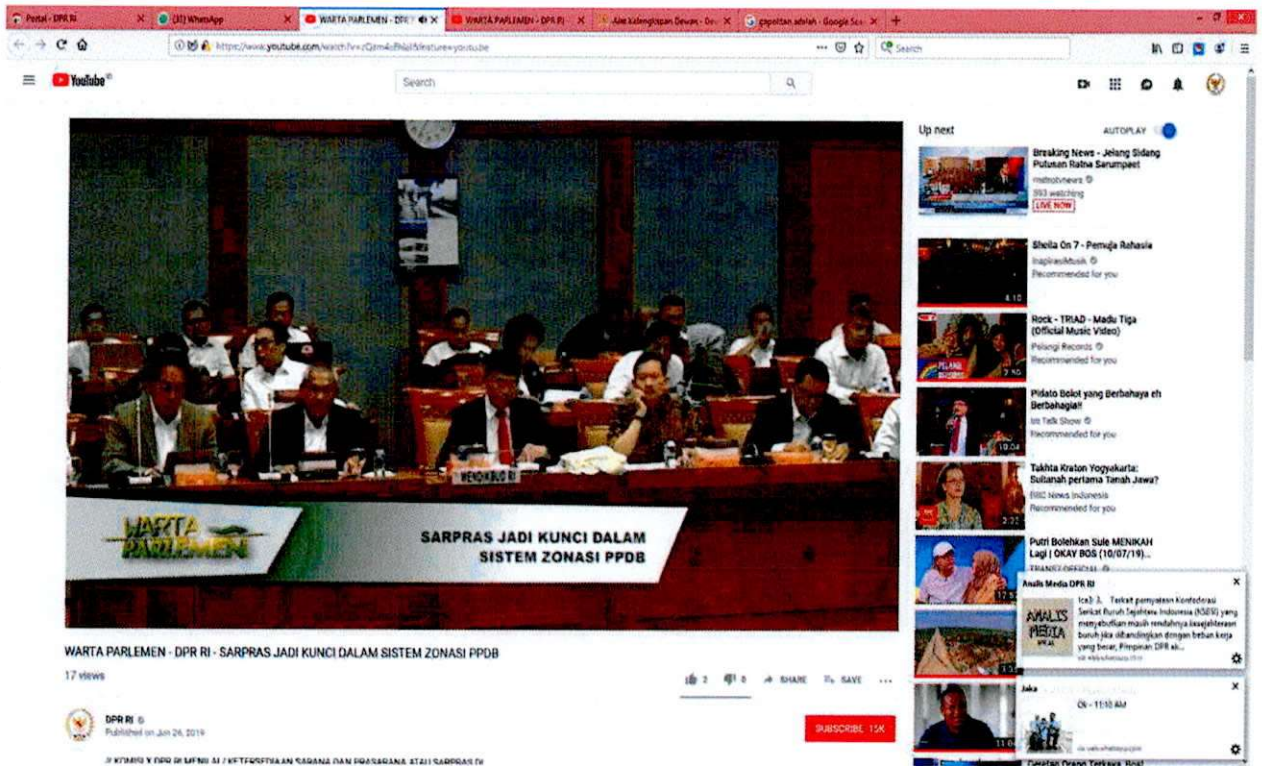
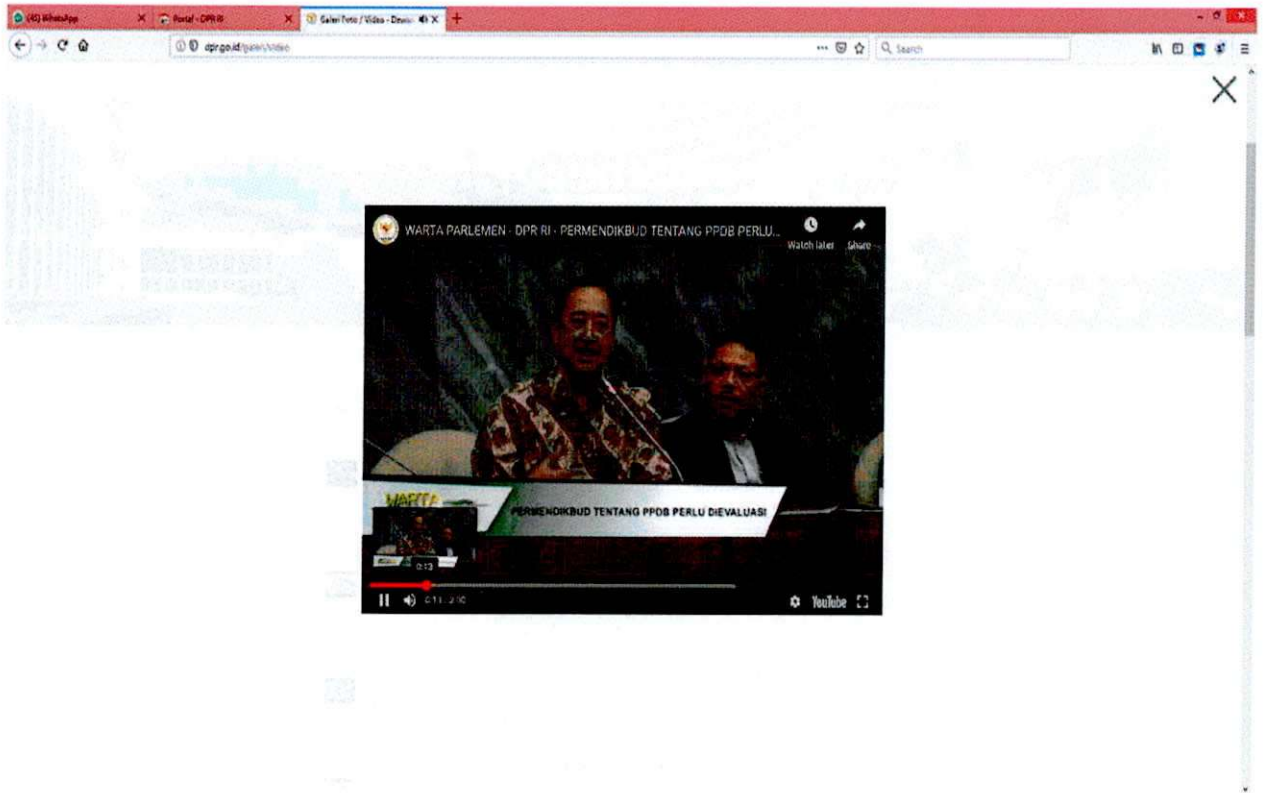
770 penayangan

23.42 - 26/06/19 - Twitter Media Studio

Tambahkan Tweet lain







Portal - DPR RI | (3) WhatsApp | WARTA PARLEMEN - DPR RI | WARTA PARLEMEN - DPR RI | Alim Erlangstapan Dewan - D... | gipartem adalah - Google Su... |

https://www.youtube.com/watch?v=Q8dMAGT1LzQ&feature=youtu.be

YouTube

Search



Up next

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PENETAPAN HPP GABAH...
DPR RI · 15 views

Shola On 7 - Mudah Saja
Indrawati · Recommended for you

UPS SALAH - Ceri Jodoh
TRANSY OFFICIAL · Recommended for you

Catatan Nawa Part 1 - Dari Kampung Jaki Millener (Cerita...
Nawa Sholah · Recommended for you

Bertahan dari Gusuhan Tol pojagan - Brebes
Kompas.com · Recommended for you

Pidato Bolot yang Berbahaya eh Berbahagialah!
Ini Talk Show · Recommended for you

Takhta Kraton Yogyakarta: Sultanah pertama Tanah Jawa?
BBC News Indonesia · Recommended for you

Celotehan Popong di Panasnya Sidang Paripurna
KOMPASTV · Recommended for you

Maka Nalun - Maknanya Maknanya

WARTA PARLEMEN - DPR RI - PERMENDIKBUD TENTANG PPDB BELUM SEPENUHNYA DIPAHAMI
16 views

DPR RI · Published on Jun 26, 2019

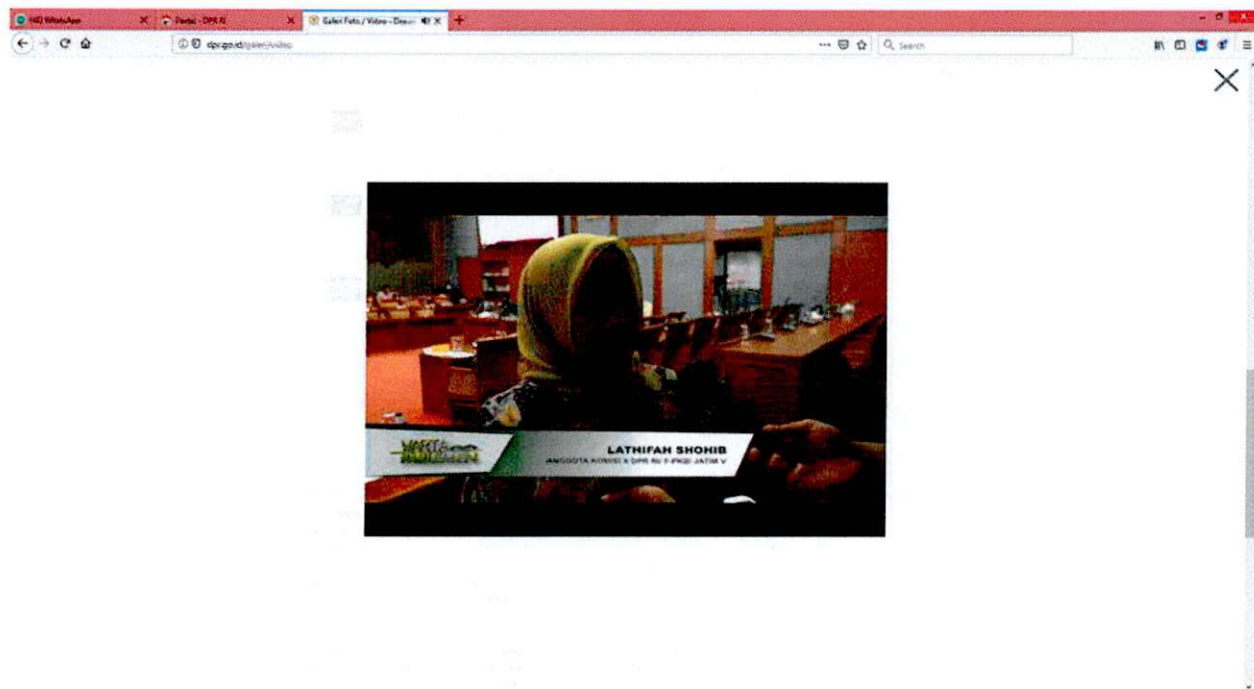
SUBSCRIBE 1.1K

WhatsApp | Portal - DPR RI | Galeri Foto / Video - DPR RI

dpr.go.id/galeri/video

Search





WhatsApp

Portal - DPR RI

Desain Pembelian Fisik

(527 unread) - smacan@y... X

https://mail.yahoo.com/id/frames/1/messages/14760?ind=id&lang=id-ID&partner=none&src=ip

YAHOO! MAIL

Find messages, documents, photos or more

Messages

Archive More Delete Spam

Settings

Compose

Back Forward

Radio Parlemen / Warta Parlemen / 25062019

radiohapsariTVR - citralap.sachipr@indosat.net.id

Tel: smacan@yahoo.com

Jun 23 at 10:26 PM

Zonasi dalam Penetapan Peserta Didik Baru kembali menjadi polemik yang memisahkan, sejak dilakukan pada tahun 2017 lalu PPDB zonasi masih juga menimbulkan kontroversi. Sistem Zonasi tahun 2019 dengan sistem radius jarak dari sekolah tanpa disertai pemerataan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta fasilitas sarana dan prasarana perlu ditinjau kembali faktor kesulitan mendaftar online bagi siswa / tentu saja menjadi poin poin yang membuat sistem zonasi ini layak ditinjau kembali!

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Fagih menegaskan agar sistem Zonasi ini ditinjau ulang dan diperlukan sosialisasi ke setiap elemen masyarakat secara menyeluruh / misalnya melalui posko komunikasi PPDB demi memperlancar sosialisasi dan menampung keluhan masyarakat agar tidak lagi masyarakat dan anak anak generasi muda menjadi korban sistem zonasi.!!

soundbite: Abdul Fikri Fagih / Wakil Ketua Komisi X / FPKS / Jateng IX

25.54 ini ada permasalahan meski belum terbit... ini dibuka komunikasi untuk pbitan kedepan

Pentingnya sosialisasi dan kajian secara kelurahan juga ditegaskan anggota Komisi X daerah pemilihan Jawa Barat IV / Rem Martawati.!!

41.25 Masih belum tuntas nye sosialisasi, banyak pemerintah daerah yang belum memahami. Informasi yg masuk ke HP saya 41.45

50.58 kebijakan yang akan dirumuskan dipasialan pd kajian teoritis. Kajian teoritis secara kelurahan sudah memungkinkan belum 50.58

Ada pepatah mengatakan / memerlukan satu desa untuk mendidik seorang anak / hal ini menggambarkan bahwa mengedukasi dan meningkatkan kualitas edukasi di Indonesia membutuhkan peran serta tak hanya DPR RI dan Pemerintah semata / tetapi masyarakat yang aktif memberikan masukan demi perbaikan sistem penerimaan peserta didik baru di Indonesia.!!

Ratna Hapsari / Edo Davinci / Rado Parlemen.!!

...

Update time zone

Ratna HapsariTVR

ratnahapsari@indosat.net.id

SORABEL

Kuliah S1 S2 Jadwal Fleksibel

Postara

Dengan jadwal fleksibel, tetap berkarir sambil kuliah kini mudah dengan blended learning

BUKA



Buletin Parlementaria

Nomor 1059/I/VIII/2019 • Juli 2019



4TH

MENUJU
INDONESIA
UNGUL

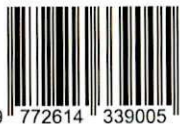
Sektor Industri Minim Pengawasan



5 Kerja Sama Militer
Indonesia - Tiongkok
Perlu Ditingkatkan



6 Honor Petugas Pemilu
Harus Meningkatkan



Filosofi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Langkah Awal Benahi Dikdasmen Berkeadilan

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan filosofi yang menjadi pijakan dasar dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 sudah benar adanya. Menurutnya, Permendikbud tersebut layak sebagai langkah awal bagi perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) guna mewujudkan keadilan untuk semua anak didik.

Meski demikian, Bamsoet, sapaan akrabnya, juga setuju dengan pernyataan penerapan Permendikbud itu pada tahun ini masih memerlukan evaluasi, karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Di sisi lain ia tetap berharap agar pemerintah konsisten menerapkan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi itu.



Ketua DPR RI
Bambang Soesatyo.
Foto: Odyen/OD

"Dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat. Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil," tandasnya.

Menurutnya, kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

"Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjabaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa-siswi yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat," ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menegaskan, anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggi harus diakomodasi oleh negara. Oleh karenanya negara harus bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi demikian.

"Yang terpenting, tidak boleh ada anak didik yang haknya dirampas oleh pola PPDB yang tidak berkeadilan. Karena itu, DPR berharap agar Presiden Joko Widodo bersama Mendikbud Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan," tegas Bamsoet. ■ dep/es



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphani, S.H, M.Si (Karo Pembinaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, S.H., Rizka Anindya, S.Sos, Erlangga Paraji Samudro, S.ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Inandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Rini Sari Budiaty, Arief Rachman,
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widnywati

INFOGRAFI

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.I.P., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Anif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Kerja Sama **Militer Indonesia - Tiongkok** Perlu Ditingkatkan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menilai kerja sama antara

Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di bidang pertahanan dan militer masih kurang. Padahal, Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara besar di kawasan masing-masing.

"Kita mengagumi kemajuan Tiongkok sangat luar biasa. Tetapi ada satu yang menjadi pertanyaan saya, kerja sama di bidang militer masih kurang bahkan boleh dikatakan belum ada," papar Asril di sela-sela Kunjungan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Republik Rakyat Tiongkok Ji Bingxuan beserta delegasi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (21/6).

Ia menuturkan, selama ini kerja sama di bidang militer selalu berkiblat pada negara Barat. Padahal, sejarah mencatat Vietnam pernah mengalahkan militer Amerika dalam Perang Vietnam. "Orientasi kita ke negara Barat yang kita pikir lebih maju. Nah, kita melihat Cina telah menjadi salah satu negara super-power dunia, kenapa tidak kita mencari tahu juga teknik dan taktik bertempurnya. Itu yang saya rasa sangat kurang selama ini," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia mendorong ke depannya, Indonesia - Tiongkok terus membangun komunikasi dan persahabatan, guna terjalinnya kerjasama pertahanan dan militer atas dasar saling percaya dan tetap menghargai

”

**KITA MELIHAT
CINA TELAH
MENJADI SALAH
SATU NEGARA
SUPER-POWER
DUNIA, KENAPA
TIDAK KITA
MENCARI TAHU
JUGA TEKNIK
DAN TAKTIK
BERTEMPURNYA.**

kedaulatan masing-masing. Apalagi, kedua negara adalah salah satu negara besar di kawasan sehingga dinilai mampu menjaga stabilitas kawasan, seperti di Laut Cina Selatan.

Senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) Republik Rakyat Tiongkok Ji Bingxuan, ia berharap kerjasama dan komunikasi militer kedua negara bisa segera dibuka. "Saya akan menyampaikan saran ini kepada pihak militer Tiongkok. Saya juga mengajak Duta Besar RRT untuk Indonesia agar mendukung dan memberikan bantuan terkait usulan ini," imbuhnya.

Selain membahas pertahanan, pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto ini juga membahas perkembangan Jalur

Sutra Modern yang dijalankan RRT melalui program *Belt and Road Initiative* (BRI). Diyakini, BRI dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan di negara berkembang yang dilalui jalur tersebut. ■ ann/es

Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Asril Hamzah Tanjung. Foto: Andri/OD



2020 Ditargetkan Ada Tiga Lapas Dengan Pengamanan Maksimal



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik. Foto: Eko/OD

”

...KHUSUS MISALNYA BANDAR NARKOBA, GEMBONG TERORISME, KITA BERHARAP PALING TIDAK ADA TIGA LAPAS DENGAN *MAXIMUM SECURITY* BARU DI TAHUN INI.

Komisi III DPR RI dengan Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 di setiap Indonesia bagian timur, tengah, dan barat setidaknya memiliki satu lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan pengamanan maksimal (*maximum security*). Dengan tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyampaikan dukungannya kepada Kementerian Hukum dan HAM yang merencanakan Lapas kelas II A Manado akan menjadi bagian dari lapas *maximum security*.

“Kita mau di setiap Indonesia bagian barat, tengah, timur itu paling tidak ada minimal satu yang difokuskan (lapas *maximum security*) untuk khusus misalnya bandar narkoba, gembong terorisme, kita berharap paling tidak ada tiga lapas

dengan *maximum security* baru di tahun ini. Paling tidak dimulai dari tahun 2020,” jelas Erma usai meninjau Lapas Kelas II A Manado, Sulawesi Utara, Jumat (21/6).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan dengan *maximum security* dibutuhkan SDM yang mumpuni. Erma mengatakan sipir yang ditugaskan menjaga harus dididik secara khusus dengan penguasaan sistem keamanan yang bagus. “Dibutuhkan kesiapan SDM, karena tidak bisa dan enggak bisa sembarangan dari sipir yang tidak memiliki kapasitas untuk menjaga lapas *maximum security*,” tandasnya.

Setelah Tim Kunspek Komisi III DPR RI melihat langsung Lapas Manado, Erma mengungkapkan, lapas tersebut

bagian dari perencanaan untuk menjadi lapas *maximum security*, maka kedepan akan banyak perubahan-perubahan pada lapas tersebut. Saat ini di DPR RI sedang dilakukan pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2020, jadi diharapkan Lapas Manado termasuk yang diberi perhatian untuk dilakukan perbaikan.

“Kita mengecek kondisi ruang-ruang tahanan, sistem pencahayaan bagus, sirkulasi udara untuk warga binaan juga bagus. Namun ada catatan, masih ada banjir, kita sedang pikirkan bagaimana caranya, sekarang ini sedang dilakukan penataan lapas. Rapat dengan Menkumham pada minggu depan mudah-mudahan bisa menjadi catatan untuk perbaikan kedepannya,” ungkap legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat itu. ■ eko/es

Komisi V Salurkan Bantuan Perumahan BSPS

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya berupa perumahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diterima langsung oleh perwakilan kepala desa dari kedua kabupaten tersebut.

"Kami memberikan secara simbolis bantuan program kemasyarakatan dari Kementerian PUPR, berupa perumahan swadaya atau perumahan BSPS kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Program

ini dilaksanakan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk pemberian materi sebesar Rp. 17,5 juta per kepala keluarga," ujar Fary saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI di Gedung Bupati Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/6).

Dengan adanya bantuan perumahan BSPS ini, Fary berharap agar masyarakat bisa bekerja secara gotong royong untuk memiliki rumah yang layak serta bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk lebih giat bekerja. Jika program ini berjalan dengan baik, tambah Fary, ke depannya kemungkinan kuotanya akan ditambah.

Selain itu Komisi V DPR RI juga menyerahkan secara simbolis Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), khususnya program edukasi kepada para kelompok penerima air sebesar Rp. 195 juta kepada setiap kelompok.

"Kita sudah berikan ke Sumba Barat ada 20 kelompok, dan ke Sumba Barat Daya ada 10 kelompok. Setiap kelompok masing-masing menerima sebesar Rp 195 juta. Ini juga dikerjakan secara gotong royong dan kita harap setelah selesai, mereka pelihara, dan ujungnya kita harap ada peningkatan hasil panen dari Sumba Barat dan Sumba Barat Daya," ujar Fary. ■ eno/es



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menyalurkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Foto: Kresno/OD

Komisi V Ajak Menteri PUPR Tinjau Infrastruktur Terdampak Banjir Konawe

Komisi V DPR RI memfasilitasi pertemuan pemerintah pusat yang dihadiri langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan Pemerintah Daerah Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara guna meninjau langsung sarana dan prasarana serta infrastruktur pasca banjir bandang yang melanda daerah tersebut.

"Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengidentifikasi jalan, jembatan, infrastruktur jalan dan hal strategis lainnya yang rusak akibat banjir bandang di Sulawesi Tenggara," kata Anggota Komisi V

DPR RI Ridwan Bae ketika memimpin Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI ke Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (20/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan setelah melihat beberapa titik yang terdampak banjir tersebut, sejumlah rencana perbaikan kawasan sungai dan infrastruktur akan segera dilakukan oleh Menteri PUPR. "Kami sangat mengapresiasi rencana jangan pendek dan jangka panjang akan dilakukan Menteri PUPR, kami akan kawal terus ini," tegasnya.

Namun untuk mengetahui pemicu dari banjir tersebut, legislator dapil Sulawesi Tenggara itu

meminta tujuh kementerian yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertanian untuk turun ke lokasi menganalisa penyebab banjir tersebut.

"Di sini ada aktivitas tambang, makanya dengan turunnya tujuh kementerian secara bersama-sama diharapkan dapat mengatasi permasalahan serta membantu pemulihan bagi masyarakat yang terdampak. Sebab salah satu penyebab banjir adalah kerusakan alam," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kunjungan ini untuk melihat, merespon dan menangani secara langsung daerah yang terdampak banjir. "Kami sudah melihat kondisi pasca banjir ini mulai dari Kendari sampai di Bendungan Wawotobi. Ada beberapa hal mengenai banjir yang bisa kita tangani. Untuk jangka pendek kita akan membuat tanggul-tanggul khusus di daerah pemukiman," jelasnya.

"Kemudian, kami juga akan merlebarkan Jembatan Ameroro yang lebih kecil dari Bendungan Wawotobi. Sehingga ruang basah sungainya tidak tercekik seperti sekarang ini. Mudah-mudahan tahun ini kita tenderan secara langsung karena kerangkanya sudah ada dan akan segera kita tangani," pungkasnya. ■ rnm/es



Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kunjungan Spesifik di Konawe, Sulawesi Tenggara.
Foto: Rha/OD

Perlu Keseimbangan Perusahaan BUMN dengan Swasta

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam meminta pemerintah menyeimbangkan serapan pasar antara perusahaan di bawah naungan BUMN dengan perusahaan swasta. Menurut Ridwan, keseimbangan itu penting terutama untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Diketahui saat ini perusahaan BUMN sudah menguasai pasar dalam negeri hingga lebih dari 50 persen, tentu saja perusahaan swasta merasa dirugikan.

"Dengan adanya kebijakan sinergi BUMN, sehingga proyek-proyek pemerintah memakai produk-produk BUMN juga. Ini perlu menjadi perhatian, pemerintah juga perlu memperhatikan

perusahaan swasta, karena jika perusahaan swasta turun bisa mengakibatkan ekonomi kita goyang," ungkap Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Pabrik Semen Besowa, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/6).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, ekonomi yang ideal seharusnya roda perekonomian sepertiga dijalankan oleh negara (BUMN) serta selebihnya dikelola oleh swasta. Karena negara harus menjadi lokomotif penggerak perekonomian. "Jangan BUMN menjadi lokomotif sekaligus juga menjadi gerbongnya, yang seharusnya gerbongnya menjadi milik rakyat (swasta)," tambah Ridwan.

Legislator dapil Jawa Timur V ini

mencontohkan penggunaan semen pada proyek infrastruktur, dimana pemerintah menggunakan semen di bawah naungan BUMN. Memang sinergi BUMN berdampak positif, namun tanpa harus mengesampingkan pihak swasta yang selama ini menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan PT. Semen Besowa Subhan Aksha Mahmud menyampaikan bahwa Pabrik Semen Bosowa memiliki kapasitas produksi sekitar 2,8 juta ton per tahun. Produksi semen menurutnya sudah *Over supply* sekitar 35 persen tahun ke tahun dari serapan produksi.

Subhan Aksha juga berharap perlunya sektor transportasi yang mumpuni seperti ketersediaan kapal internasional. Contohnya di Vietnam dan Singapura yang mempunyai cost pengangkutan lebih murah dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mereka yang lebih rendah.

"Tentunya di bagian cost yang selama ini menghambat Kapal Cargo Indonesia, yaitu keterbatasan harga BBM, Jumlah *quantity* ekspor, sektor pelabuhan dan lainnya," pungkasnya.

■ skr/es



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Pabrik Semen Bosowa, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Foto: Singgih/OD

Anggaran Kemenag Naik, Komisi VIII Pertanyakan Pemerataan Kualitas Pendidikan Agama

Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan, Komisi VIII DPR RI sudah melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Agama beserta jajarannya dengan membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, selama dua pekan terakhir. Komisi VIII DPR RI menyepakati usulan tambahan sebesar Rp 6,1 triliun, atas Pagu Indikatif Kemenag sebesar Rp 65,2 triliun untuk TA 2020. Anggaran Kemenag naik secara signifikan dari Rp 62 triliun pada tahun 2019 lalu.

Usulan anggaran TA 2020 dengan total Rp 71,3 triliun ini didominasi untuk dua mata anggaran, yaitu Program Bimbingan Masyarakat Agama dengan dan paling besar untuk Program Pendidikan Islam yang mencapai 80 persen, naik 6,28 persen dari alokasi tahun lalu. Meski terjadi kenaikan, Ali Taher menilai sebaran anggaran harus merata di berbagai lapisan pendidikan yang diselenggarakan baik pemerintah, maupun swasta.

"Misalnya pada Pendidikan Islam, pesantren dan madrasah kita itu jumlahnya lebih dari 90.000. Sementara yang baru bisa terakreditasi hanya 53.000, sisanya belum. Ini akan berdampak pada tidak meratanya pelayanan publik termasuk kualitas tenaga sumber daya manusia, termasuk tenaga pendidik dan kependidikan, serta sarana

dan prasarana pendidikan," tandas Politisi F-PAN ini usai memimpin Raker dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Ali Taher juga menilai tambahan anggaran belum cukup untuk bisa menjalankan pendidikan yang berkualitas dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, problematika pendidikan agama di Indonesia sangat bervariasi. "Kota besar tentu berbeda dengan kota kecil. Jangankan swasta, Pemerintah saja punya klaster A, B, dan C. Madrasah Aliyah Negeri juga ada klaster A, B, C. Sebaran anggaran tidak merata inilah yang nantinya mengganggu proses

pendidikan," tambah legislator dari Banten ini.

Zonasi, menjadi sistem yang diharapkan untuk turut meningkatkan meratanya kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Ali berharap dengan adanya sistem zonasi, makas seluruh prospek pendidikan dapat meningkat secara merata di tanah air. "Zonasi itu kan tujuannya meningkatkan kualitas dan juga memunculkan peran serta masyarakat dan mutu yang secara seimbang," jelasnya. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap besaran usulan tambahan dan Pagu Indikatif Kemenag RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2020.

■ alw/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong. Foto: Azka/OD

PPDB Zonasi Dinilai Baik, Tapi Terlalu Terburu-buru

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai hadirnya kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Foto: Andri/OD

zonasi terlalu terburu-buru.

"Salah satu penyebab terjadinya masalah di tengah masyarakat karena munculnya Permendikbud yang dinilai mendadak, sehingga kurang sosialisasi kepada pemerintah daerah, pelaksana dan masyarakat," jelas Fikri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6).

Fikri menilai, jika dilihat dari tujuannya zonasi memang baik, karena untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit di tengah masyarakat. "Jadi tujuannya itu membuat akses pendidikan jadi merata. Sistem ini diyakini akan menghilangkan stigma sekaligus diskriminasi dalam pendidikan," tuturnya.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, tujuan dari penerapan zonasi ini bagus. Namun jika sarana prasarana pendidikan dan persebaran guru belum merata,

penerapan zonasi akan sulit diterima masyarakat.

"Jadi, benahi dulu ini sampai ke masyarakat, kalau pelayanan pendidikan di Indonesia semuanya sudah sama. Dan kalau peserta didik dibuat sistem zonasi, guru juga *dong* buat sistem zonasi. jadi tidak menumpuk," saran legislator dapil Jawa Tengah IX itu.

Selain itu, yang menyebabkan terjadinya problematika di daerah karena tata kelola daerah yang berbeda. Di Solo misalnya, tata kelola di sana dibagi ada zona pemerintahan, zona perdagangan dan zona pendidikan. "Jadi penerapan sistem zonasi ini akan beririsan dengan tata kelola daerah yang seperti ini. Seperti ini yang perlu dipikirkan juga," tutupnya.

■ alw/sf

BTN Didesak Selesaikan Kasus Temuan BPK

Menyusul audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan dalam proyek perumahan yang dilakukan Bank Tabungan Negara (BTN), Komisi XI DPR RI medesak agar temuan itu segera diselesaikan dengan baik. Kinerja keuangan BTN juga diimbau untuk dibenahi.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, terungkap setidaknya ada 22 temuan penyimpangan dalam pengelolaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) pada tahun 2017. Kepada Komisi XI DPR, Dirut BTN Maryono menyampaikan, dari 22 kasus hasil audit BPK, baru 15 kasus yang diselesaikan. Tujuh kasus sisanya hingga kini belum terselesaikan.

"Komisi XI DPR RI meminta kepada Direksi PT. Bank BTN menyelesaikan



JUMLAHNYA 38 KASUS DAN BARU DISELESAIKAN 29 KASUS.

temuan hasil Badan Pemeriksa Keuangan yang masih dalam proses penyelesaian," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6). Marwan menambahkan, "BTN juga harus meningkatkan kinerja keuangan perusahaan."

Di antara temuan kasus itu adalah proyek perumahan di Manado, Sulawesi Utara dan banyaknya kredit

macet. Selain itu, ada pula kasus pengelolaan KUR BTN tahun 2012, 2013, dan Semester I 2014 yang bermasalah. Jumlahnya 38 kasus dan baru diselesaikan 29 kasus. Belum lagi, banyak ribuan rumah bersubsidi tak dihuni pemiliknya lantaran kualitas rumahnya yang kurang layak, terutama akses ketersediaan air bersih dan listrik.

■ alw/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan. Foto: Andri/OD

Sistem Kuota Rokok Bebas Cukai Harus Dihapus

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Pertembakauan Firman Soebagyo menyoroti pemberlakuan sistem kuota produk rokok bebas cukai. Firman menyebut, hal tersebut justru memberikan peluang besarnya peredaran rokok ilegal. Maka, Firman mengimbau, sistem kuota tersebut dihapuskan dan diganti dengan penerapan cukai untuk seluruh produk tanpa terkecuali.

“Semakin besar kuota rokok yang mendapatkan pembebasan cukai, maka semakin besar peluang rokok ilegal untuk beredar. Kuota ini bisa menjadi *grey area*. Oleh karena itu, kalau sistem kuota bisa menimbulkan kerawanan, maka lebih baik kita menerapkan prinsip bahwa semua produk tanpa terkecuali harus dikenakan cukai,” ujar Firman, usai memimpin Kunjungan Kerja Pansus RUU Pertembakauan ke Batam, Kepulauan Riau, Senin (24/6/).

Politisi Partai Golkar itu optimis, jika hal itu diberlakukan, maka berdampak positif pada penerimaan negara. Lebih lanjut, upaya monitornya juga begitu mudah dilakukan karena jika ada rokok yang beredar tanpa cukai, maka dengan mudah bisa teridentifikasi bahwa rokok tersebut merupakan kategori produk ilegal.

“Jadi itu salah satu yang menjadi catatan kami dalam membuat aturan dasar hukum. Tentunya, ini semua akan tetap dengan dilakukan sinkronisasi terhadap UU yang sudah terlebih dulu ada. Sehingga, tidak ada tumpang tindih UU yang satu dengan yang lain. RUU ini betul-betul diupayakan memberikan sebuah solusi yang komprehensif,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah itu.

Sebelumnya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal dan Bea Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto menyatakan, berdasarkan penelitian KPK, ditemukan adanya kebocoran anggaran negara akibat kuota pembebasan cukai itu. “Dengan kuota pembebasan cukai, maka bagi yang masuk kuota ada kebijakan untuk tidak membayar cukai. Namun, berdasarkan penelitian KPK, ditemukan kebocoran di sektor itu,” tuturnya.

Nirwala menambahkan, terjadi disparitas rokok mencapai 62 persen antara yang membayar cukai dengan yang tidak membayar. Sehingga, setelah diteliti ulang, pihaknya dengan data terakhir menemukan bahwa rokok yang sudah terlanjur menggunakan fasilitas kuota

pembebasan cukai dan kemudian masuk ke Batam, ternyata jumlahnya cukup untuk menyuplai keperluan Batam selama enam bulan.

“Produk rokok yang sudah terlanjur masuk ke Batam dengan menggunakan fasilitas kuota pembebasan cukai ini, berdasarkan penemuan dengan data terakhir ternyata jumlahnya cukup mencengangkan. Jika ditotal, maka jumlahnya cukup untuk menyuplai keperluan Batam selama 6 bulan. Ini dapat diartikan bahwa kuota yang diberikan saat ini terlalu besar. Namun demikian, rekan kami di BP Batam mengklaim bahwa per tanggal 17 Mei 2019 sudah mencabut kuota pembebasan cukai tersebut,” tutup Nirwala. ■ pun/sf



Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Pertembakauan DPR RI mengunjungi PT Fantastik Internasional di Batam. Foto: Purno/OD

Indonesia- Iran Berkomitmen Merdekakan Palestina

Indonesia dan Iran sampai kini masih tetap berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Palestina. Tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina selalu jadi perhatian kedua negara. Baik Indonesia maupun Iran tak memandang agama apapun yang dipeluk rakyat Palestina. Tapi, hak asasi manusia yang begitu masif dilanggar dan menimpa rakyat Palestina jadi perhatian yang terus disuarakan di forum-forum internasional.

Persoalan tersebut mengemuka saat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima tamu kehormatan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6). “Kedua negara berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Palestina. Bukan karena mereka itu muslim, tapi karena mereka diperlakukan tanpa pemberlakuan hak asasi manusia,” tegasnya.

Kebetulan beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sudah berkunjung ke Iran untuk menguatkan kembali komitmen ini dengan Presiden Iran. Karena begitu banyak tragedi kemanusiaan, kata Nurhayati di hadapan Dubes Iran, dunia saat ini butuh *leadership by example*, yaitu kepemimpinan dengan memberi ketauladanan.

“Di forum-forum internasional saya selalu sampaikan, ketika kita menolong orang tidak perlu kita menanyakan apa agamanya. Kita harus tolong dulu terlepas dari agama, ras, ataupun etnisnya,” tandas politisi Partai Demokrat ini usai pertemuan. Kepada Nurhayati, Dubes Iran juga menyampaikan keprihatinan atas



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menerima tamu kehormatan Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi. Foto: Gerald/OD

sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Iran. Namun, Nurhayati meyakinkan bahwa Iran pasti bisa segera mengatasi segalanya.

Nurhayati menambahkan, DPR RI akan menjadi tuan rumah *World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)* ke-3 di Bali, September 2019 mendatang. Dalam forum itu, ia menekankan agar dunia memberikan perhatian kepada perubahan iklim. Perubahan iklim ternyata lebih banyak menyita korban jiwa daripada aksi terorisme. Akibat perubahan iklim, banyak terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

“Kami memberi penekanan, Indonesia punya dua pengalaman, yaitu perubahan iklim dan terorisme. Indonesia punya pengalaman

keduanya, baik perubahan iklim maupun terorisme yang harus dibagi kepada dunia. Kami ingin dunia menaruh komitmen kuat terhadap perubahan iklim ini, karena Indonesia punya pengalaman dengan perubahan iklim yang menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Korbannya jauh lebih banyak daripada terorisme,” imbuhnya.

Kunjungan Dubes Iran ini sekaligus juga ingin berpamitan, karena tugasnya di Indonesia segera berakhir. Namun, hubungan baik Indonesia-Iran tetap berlanjut dengan Dubes penggantinya nanti. “Dubes Iran ingin mengakhiri masa tugasnya dan berpamitan. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini dilakukan serta hubungan baiknya antara Parlemen Iran dan Indonesia,” tutup legislator dapil Jawa Timur V itu. ■ mh/sf

BURT DPR Apresiasi Pelayanan Kesehatan RS AL Dr. Ramelan Surabaya

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing, mengapresiasi pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Angkatan Laut (RS AL) Dr. Ramelan, Surabaya, Jawa Timur, kepada pasiennya. Anthon juga menyatakan, peran PT. Jasindo sebagai operator layanan Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) juga sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPR RI.

"(Fasilitasnya) Sangat bagus dan positif. Makanya kita minta Jasindo dapat meningkatkan kerja sama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut ini," kata Anthon se usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan jajaran Pejabat dan Manajemen RS AL Dr. Ramelan, di Surabaya, Jatim, Jumat (21/6). Dalam kesempatan itu, Tim Kunker BURT DPR RI juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana RS AL Dr. Ramelan, Surabaya.

Selain itu, Anthon menilai fasilitas serta sarana dan prasarana RS AL Dr. Ramelan sudah menggunakan peralatan medis yang modern. Di samping itu, menurut Anthon, faktor pendukung lainnya yang membuat pelayanan kesehatan RS AL Dr. Ramelan sangat baik, dari hasil pemantauan, Sumber Daya Manusia (SDM) RS AL Dr. Ramelan memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan bertanggung jawab.

"Di rumah sakit ini saya rasa juga sudah termasuk (memiliki) peralatan yang modern. Di samping itu juga, disiplin (SDM) semua itu bisa berjalan dengan baik, apalagi Angkatan Laut tenaga ahlinya bagus," puji legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Hal senada diungkapkan Anggota BURT DPR RI Indah Kurnia. Ia mengatakan, fasilitas RS AL Dr. Ramelan sangat lengkap, mulai dari adanya *helipad*, penataan ruang-ruang pelayanan kesehatan yang baik, SDM yang berkualitas, dan

satu-satunya RS yang memiliki pelayanan *Chamber Hiperbarik* (terapi oksigen) di Surabaya.

"Fasilitasnya sangat lengkap dan peralatan juga lengkap. Tapi yang terutama adalah SDM mereka sudah dengan tekad memberikan layanan yang terbaik. Masih banyak tempat-tempat yang penuh dengan udara udara yang segar. Dan satu lagi, ada layanan *Chamber Hiperbarik* bagi orang-orang yang memerlukan pelayanan itu," kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Wakabin RS AL Dr. Ramelan Tjatur Bagus Gunarto mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, ke depannya pihaknya berencana untuk membangun beberapa sarana dan prasarana, seperti membangun gedung bedah sentral, pelayanan onkologi terpadu atau *oncology center*, dan gedung 5 lantai khusus untuk anggota TNI dan keluarganya.

■ qq/sf



Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing dan Anggota BURT foto bersama jajaran Pejabat dan Manajemen RS AL Dr. Ramelan, di Surabaya. Foto: Rizki/OD

LAMPIRAN MILESTONE 6

Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Isu di Media Internal DPR RI
24 – 28 Juni 2019

1. Rapat Agenda Setting, hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 menetapkan isu Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menjadi isu utama yang akan dikelola dan diolah menjadi isu utama di seluruh media internal DPR yaitu media cetak, media social dan website, TV Parlemen dan Radio Parlemen.
2. Setelah ditandatangani Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, project leader menginformasikan kepada redaksi dan redaktur untuk menindaklanjuti isu tersebut.
3. Media internal, sebagaimana keputusan rapat agenda setting akan memfokuskan isu sistem zonasi ini pada :
 - Tujuan sistem zonasi (pemerataan pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit, dll)
 - Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,
 - Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah,
 - Anggaran
 - Berbagai kendala dan masalah yang timbul (masih adanya daerah blank spot) dan dialami Siswa/i dan orangtua dengan adanya sistem zonasi.
4. Project leader, setiap hari mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan fokus/angle peliputan terkait isu yang ditetapkan pada kegiatan agenda setting kepada masing-masing redaktur dan redaksi sebagaimana yang telah ditetapkan, agar dalam seminggu pemberitaannya tetap ada di media internal.
5. Berdasarkan hasil monitoring, semua media internal menyuarakan isu yang sama. Implementasi untuk minggu ini dinilai sukses dan maksimal, karena memang pas momentnya dengan pelaksanaan PPDB yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2019 secara serempak di seluruh Indonesia.
6. Hasil maksimal ini dicapai karena berdasarkan keputusan rapat agenda setting kegiatan peliputan dilakukan secara bersama-sama seluruh media internal DPR, baik Media Cetak, Media Sosial dan Televisi Parlemen.
7. Tidak ada kendala, karena masing-masing reporter media internal yang ditugaskan saling berkoordinasi dan melakukan komunikasi dalam peliputannya.

Jakarta, 28 Juni 2019

LAMPIRAN MILESTONE 7



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Rabu, 26 Juni 2019

Nomor : 561 / BP.01 / 6 / 2019
Sifat : Segera
Lampiran : (Daftar Nama Tim Agenda *Setting*)
Hal : Undangan Rapat Agenda *Setting*

Yth
Tim Agenda Setting
(Daftar nama terlampir)
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, Biro Pemberitaan Parlemen akan mengadakan Rapat Agenda Setting yang akan di selenggarakan:

Hari/Tanggal : Jum'at, 28 Juni 2019
Pukul : 13.00 WIB – Selesai
Acara : Rapat Agenda Setting
Tempat : Ruang Radio Parlemen, Gd Nusantara II, Lt. 1

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat turut serta pada kegiatan tersebut.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,


Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si
NIP. 196010021982031004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : 476/BP.01/V/2015

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan agenda setting untuk menetapkan isu yang akan dikelola dan diolah menjadi berita di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
3. Surat Tugas Nomor PL/213/SETJEN DAN BK DPR RI/PL.02/03/2019 tentang Penugasan Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Lembaga Administrasi Negara;

MENUGASKAN

Kepada :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Suciati, S.Sos.	197207201994032002	Kasubag Analis Media (Project Leader)
2.	Nita Juwita, S.Sos.	198110182005022001	Kasubag Media Sosial & Website
3.	Sugeng Irianto, S.Sos.	198105032005021002	Kasubag Media Cetak

4.	Bayu Setiadi, S.IP.	197903262005021002	Kasubag Program & Produksi Televisi
5.	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	196802271997031002	Kasubag Radio
6.	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	198812172014022003	Pranata Humas
7.	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom	199104262018011003	Pranata Humas
8.	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	199410182018012003	Analisis Media
9.	Erman Suhendri, S.Sos.	198509242018011001	Reporter Media Cetak
10.	Ahyar Tibi, S.H.	PPNPN	Redaktur Analisis Media
11.	Mohamad Rizki Nugroho	PPNPN	Analisis Media
12.	Larissa Amanda Indianti	PPNPN	Analisis Media
13.	Deprisa Citra Akbari	PPNPN	Analisis Media
14.	Sunarya	PPNPN	Analisis Media
15.	Safitri Restu Widyowati	PPNPN	Analisis Media
16.	Fahmi Harfa	PPNPN	Analisis Media
17.	Singgih Kinanti Rimbani	PPNPN	Redaktur Media Sosial
18.	Siti Nadia	PPNPN	Reporter Media Sosial
19.	Sofyan Efendi	PPNPN	Redaktur Media Cetak
20.	Rahayu Setyowati	PPNPN	Reporter Media Cetak
21.	Hendra Sunandar	PPNPN	Reporter Media Cetak
22.	M. Marlina Tampubolon	PPNPN	Redaksi TV Parlemen
23.	Farkhan Fajar Ilhami	PPNPN	Reporter TV Parlemen
24.	Ratna Hapsari	PPNPN	Redaksi Radio Parlemen

Untuk : Melaksanakan dan berkontribusi dalam kegiatan agenda setting setiap hari Jumat dan menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut untuk dipublikasikan di media internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta, 20 Mei 2018
KEPALA BIRO PEMBERITAAN PARLEMEN,



Y.O.I. Tahapari, SH. M.Si.

NIP. 196010011982031004



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Proyek Perubahan Kepala Sub Analis Media Dengan Judul “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan Di Biro Pemberitaan Parlemen Melalui Penetapan Isu”

HARI/TANGGAL: Jum'at, 28 Juni 2019

No.	NAMA	BAGIAN/UNIT	TANDA TANGAN
1	Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.	Kabag Media Cetak dan Media Sosial	
2	Suciati, S.Sos.	Kasubag Analis Media (Project Leader)	
3	Nita Juwita, S.Sos.	Kasubag Media Sosial & Website	
4	Sugeng Irianto, S.Sos.	Kasubag Media Cetak	
5	Bayu Setiadi, S.IP.	Kasubag Program & Produksi Televisi	
6	M. Ibnurkhalid, S.Pd.	Kasubag Radio	
7	Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.	Pranata Humas	
8	Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom.	Pranata Humas	
9	Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.	Analis Media	
10	Erman Suhendri, S.Sos.	Reporter Media Cetak	
11	Ahyar Tibi, S.H.	Redaktur Analis Media	
12	Mohamad Rizki Nugroho	Analis Media	
13	Larissa Amanda Indianti	Analis Media	
14	Deprisa Citra Akbari	Analis Media	
15	Sunarya	Analis Media	



DAFTAR HADIR KEGIATAN

Proyek Perubahan Kepala Sub Analis Media Dengan Judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan Di Biro Pemberitaan Parlemen Melalui Penetapan Isu"

HARI/TANGGAL: Jum'at, 28 Juni 2019

16	Safitri Restu Widyowati	Analisis Media	
17	Fahmi Harfa	Analisis Media	
18	Singgih Kinanti Rimbani	Redaktur Media Sosial	
19	Siti Nadia	Reporter Media Sosial	
20	Sofyan Efendi	Redaktur Media Cetak	
21	Rahayu Setyowati	Reporter Media Cetak	
22	Hendra Sunandar	Reporter Media Cetak	
23	Devi Iriandi	Reporter Media Cetak	
24	Muhammad Husen	Reporter Media Cetak	
25	M. Marlina Tampubolon	Redaksi TV Parlemen	
26	Farkhan Fajar Ilhami	Reporter TV Parlemen	
27	Ratna Hapsari	Redaksi Radio Parlemen	
28	Puntho Prunowo Wianshyu	Reporter Media Cetak	
29	Edo Davinci Zakti	RADIO PARLEMEN	
30	Alfi Widoretno	Reporter Media Cetak	

Bryan Hidayat

—

h11



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Keputusan Rapat Tim Agenda Setting

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang diselenggarakan pada :

- Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019
- Pukul : 13.30 – 14.45 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Radio Parlemen Gedung Nusantara II DPR RI
- Acara : Penetapan Isu bagi Media Internal DPR RI
- Rapat dipimpin oleh : Kepala Sub Bagian Analis Media
Suciati, S.Sos.
- Rapat dihadiri : 19 orang Tim Agenda Setting
- Keputusan : 1) Rapat Tim Agenda Setting telah menetapkan isu yang akan diolah dan diangkat menjadi pemberitaan di media internal DPR RI pekan kesatu Juli 2019, yaitu :
- Harga tiket pesawat per-1 Juli 2019, pemerintah meminta maskapai Low Cost Carrier (LCC) untuk menurunkan harga tiket pesawat.
 - Persiapan pelaksanaan haji 2019 dan pengawasan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 dikhususkan bagi haji reguler yang lanjut usia (lansia)
 - Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

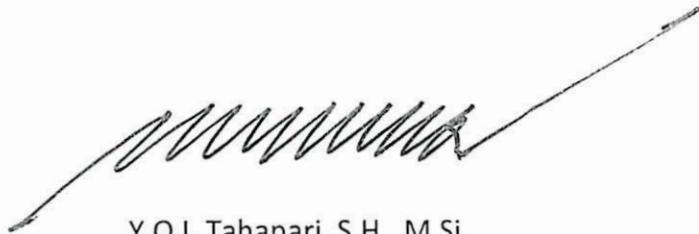
2) Terkait ketiga isu tersebut, Media Internai DPR RI akan fokus pada antara lain :

- a. Fokus isu Harga tiket pesawat adalah pada :
 - Dampaknya ke masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia timur yang lebih banyak menggunakan pesawat.
 - Dampaknya pada dunia usaha dan pariwisata.
 - Belum adanya standarisasi harga ticket pesawat.
 - Beban biaya maskapai LCC dan premier sama.
- b. Fokus isu Persiapan pelaksanaan haji 2020 adalah pada :
 - Kesiapan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH)
 - Persiapan sarana dan prasarana bagi jamaah Indonesia di Mekah
 - Pengawasan pembagian penambahan quota 10.000 ke seluruh Indonesia terutama bagi Jamaah Reguler dan Lansia
- c. Fokus isu Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 adalah pada :
 - Program pembangunan kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 - Roadmap anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.
 - Sasaran Anggaran Pendidikan.

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berakhir dan ditutup pukul 14.45 WIB.

Jakarta, 28 Juni 2019

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen,



Y.O.I. Tahapari, S.H., M.Si.

NIP. 196010021982031004



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

RESUME

Rapat Tim Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2019

Pukul : 13.30 – 15.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Radio dan Televisi DPR RI

Acara : Penetapan Isu bagi Media Internal DPR RI

Rapat dibuka dan
ditutup oleh : Kepala Sub Bagian Analisis Media
Suciati, S.Sos.

Rapat dipimpin oleh : Kepala Sub Bagian Analis Media
Suciati, S.Sos.

Rapat dihadiri : 22 orang Tim Agenda Setting

1. Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial (Metaksos) sebagai Menthor membuka rapat agenda setting. Kabag Metaksos mengingatkan kembali bahwa Rapat Agenda Setting ini adalah Rapat Koordinasi Biro Pemberitaan Parlemen bukan hanya terkait untuk menyelesaikan Proyek Perubahan semata, untuk menentukan isu sepekan yang akan diolah menjadi berita di media lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen antara lain media cetak, media sosial dan website DPR, TV Parlemen, dan Radio Parlemen.
2. Kepala Sub Analis Media sebagai *project leader* untuk memimpin Rapat Agenda Setting Biro Pemberitaan Parlemen.
3. Kepala Sub Analis menjelaskan, isu yang ditetapkan pada Rapat Agenda Setting akan dilaporkan kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, setelah mendapatkan persetujuan akan disampaikan kepada seluruh Redaksi/Redaktur media internal DPR untuk ditindaklanjuti sampai menjadi berita yang diupload di media internal DPR.

4. Disampaikan hasil koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Produksi dan Redaksi TV Parlemen, kegiatan peliputan baik media cetak, media sosial dan TV Parlemen akan dilakukan secara bersamaan.
5. Kepala Sub Analis Media menyampaikan beberapa usul isu, yaitu :
 - Diputusnya kerja sama BPJS Kesehatan dengan Rumah Sakit-Rumah Sakit pada akhir Juni 2019;
 - Harga tiket pesawat per-1 Juli 2019, pemerintah memintai maskapai *Low Cost Carrier* (LCC) untuk menurunkan harga tiket pesawat;
 - Patroli *whatsapp*;
 - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres;
 - Pengawasan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 dikhususkan bagi haji reguler yang lanjut usia (lansia).
6. Seluruh anggota tim agenda setting yang hadir aktif memberikan masukan isu-isu yang akan diangkat bagi penyelenggaraan pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen, antara lain sebagai berikut :
 - a. Reporter media cetak memberikan beberapa masukan. Diantaranya terkait anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2020, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan dukungan melalui anggaran, evaluasi anggaran RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga), prosedur keselamatan kerja dengan contoh kasus kecelakaan kerja di Pabrik Korek, Sumatra Utara (berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi IX DPR). Terkait usulan isu mengenai anggaran Kemendikbud 2020, pembahasan dapat difokuskan kepada road mapnya, agar anggaran-anggaran yang digunakan nantinya dapat tepat sasaran;
 - b. Reporter media sosial memberikan masukan isu yang sedang berkembang di medsos, yaitu perdebatan netizen terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penyusunan kabinet, dan pertemuan Presiden Jokowi dalam KTT G-20. Selain itu, reporter media sosial juga isu terkait anggaran Kemendikbud 2020 dikarenakan tahun 2020 harus sudah mulai berfokus pada pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Redaksi TV Parlemen menyetujui isu patroli *whatsapp* dan rencana penurunan harga tiket pesawat. Dari isu harga tiket pesawat, dapat langsung berdampak ke masyarakat sebagai pengguna, terutama masyarakat yang berada di Indonesia Timur, mengingat transportasi menuju ke sana banyak menggunakan transportasi udara, sehingga dapat mempengaruhi situasi perekonomian dan juga pariwisata;
 - d. Redaksi Radio Parlemen menyetujui isu terkait anggaran Kemendikbud 2020 dan memberikan masukan tambahan mengenai rencana penurunan harga tiket pesawat, yaitu pentingnya koordinasi antara pihak maskapai dengan pemerintah dan anggota dewan, sehingga didapati kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan keputusan maskapai semata. Selain itu, terkait anggaran pendidikan juga seharusnya digunakan untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan;

- e. Pranata Humas memberikan masukan terkait isu persiapan dan pengawasan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 yang dikhususkan bagi haji reguler yang lanjut usia (lansia). Isu tersebut bisa menjadi isu yang cukup strategis apabila dilakukan pendalaman dan dapat direalisasikan. Kemudian, terkait isu anggaran Kemendikbud 2020 juga perlu untuk didalami;
 - f. Tim Analis Media memberikan masukan terkait isu-isu yang berpotensi berkembang, di antaranya yaitu ibadah haji 2019, pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN 2020, rekonsiliasi pasca putusan MK, serta produksi beras dan kekeringan. Sedangkan untuk isu ada dua yaitu pasca penurunan harga tiket pesawat dan efisiensi anggaran KL 2020. Tim Analis Media setuju dengan dinaikannya isu ibadah haji untuk minggu ini. Kesiapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) perlu didalami. Kemudian anggaran pendidikan juga perlu untuk dibahas. Perlu pengawasan terhadap anggaran pendidikan, jangan sampai penambahan tersebut sia-sia (tidak tepat sasaran);
 - g. Kepala Sub Bagian Produksi TV Parlemen menyampaikan bahwa isu terkait putusan MK sebaiknya tidak perlu diangkat dalam isu DPR minggu ini dan fokus kepada pembahasan anggaran Kemendikbud 2020.
7. Kepala Sub Bagian Analis Media menyetujui usul mengangkat tiga isu pada minggu ini. Ketiga isu tersebut yaitu pemerintah memintai maskapai *Low Cost Carrier* (LCC) untuk menurunkan harga tiket pesawat per-1 Juli 2019, persiapan dan pengawasan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 dikhususkan bagi haji reguler yang lanjut usia (lansia), dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Ketiga isu tersebut diambil dikarenakan berdasarkan hasil rapat, ketiga isu tersebut yang paling banyak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu evaluasi dari penetapan isu minggu lalu, isu di minggu ini dapat lebih dari satu isu agar keseragaman isu antar bagian menjadi lebih terlihat.
8. Rapat Tim Agenda hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019 menetapkan tiga isu, yaitu pemerintah memintai maskapai *Low Cost Carrier* (LCC) untuk menurunkan harga tiket pesawat per-1 Juli 2019, persiapan dan pengawasan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 dikhususkan bagi haji reguler yang lanjut usia (lansia), dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 untuk penyelenggaraan pemberitaan di media internal DPR pekan depan. Fokus isu yang akan dibahas antara lain yaitu implementasi kebijakan penurunan harga tiket LCC, pengawasan pelaksanaan terhadap kuota haji, khususnya kepada lansia, dan *road map* anggaran Kemendikbud 2020.

Jakarta, 28 Juni 2019



Rapat Uji Coba 2 Agenda Setting Penetapan Isu, yang menetapkan isu Pemerintah Meminta Maskapai LCC Menurunkan Harga Tiket, Anggaran Kementerian Pendidikan, dan Pengawasan Pelaksanaan Haji, Jumat, 28 Juni 2019 di Ruang Rapat Radio Parlemen.

LAMPIRAN MILESTONE 8

Parlemen Kita - Berita

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Pemerintah Dituntut Serius Selesaikan RUU Ekraf

Ketua DPR RI mengemukakan harapan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Ditribusi Kualitas Guru Harus Merata

Anggota Komisi X DPR RI Hery Achmad mengkritik distribusi kualitas guru harus lebih merata, sehingga kualitas guru di seluruh Indonesia.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Kemil X Sarung Pengawasan Anggaran Militer Kerja

Ketua Komisi X DPR RI Dedy Supriatno mengemukakan pengawasan anggaran militer harus lebih ketat, terutama dalam hal pembelian senjata.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

RAPEN Kemendikbud Harus Obiang Target Yang Jelas

Anggota Komisi X DPR RI Tedy Supriatno mengkritik RAPEN Kemendikbud harus lebih jelas targetnya, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan.

Parlemen Kita - Berita

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Pemerintah Harus Serius Selesaikan RUU Ekraf

Ketua DPR RI mengemukakan harapan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Ditribusi Kualitas Guru Harus Merata

Anggota Komisi X DPR RI Hery Achmad mengkritik distribusi kualitas guru harus lebih merata, sehingga kualitas guru di seluruh Indonesia.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Kemil X Sarung Pengawasan Anggaran Militer Kerja

Ketua Komisi X DPR RI Dedy Supriatno mengemukakan pengawasan anggaran militer harus lebih ketat, terutama dalam hal pembelian senjata.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

RAPEN Kemendikbud Harus Obiang Target Yang Jelas

Anggota Komisi X DPR RI Tedy Supriatno mengkritik RAPEN Kemendikbud harus lebih jelas targetnya, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Pemerintah Harus Serius Selesaikan RUU Ekraf

Ketua DPR RI mengemukakan harapan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf) dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

Ditribusi Kualitas Guru Harus Merata

Anggota Komisi X DPR RI Hery Achmad mengkritik distribusi kualitas guru harus lebih merata, sehingga kualitas guru di seluruh Indonesia.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

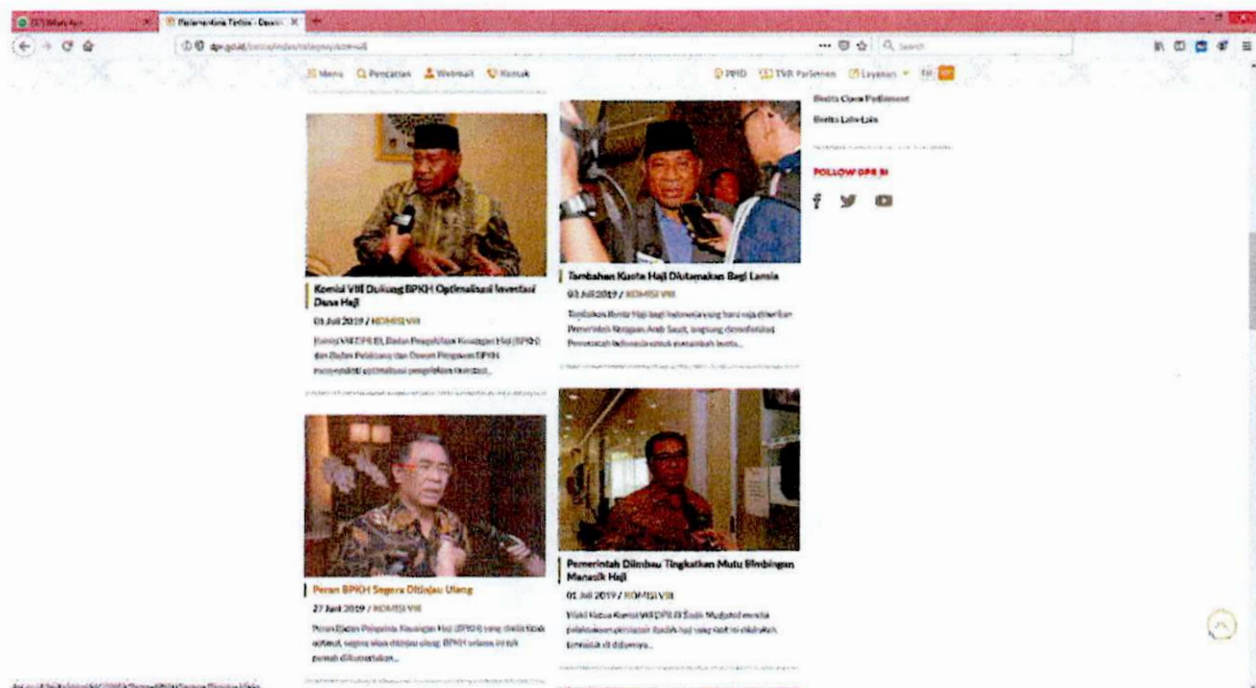
Kemil X Sarung Pengawasan Anggaran Militer Kerja

Ketua Komisi X DPR RI Dedy Supriatno mengemukakan pengawasan anggaran militer harus lebih ketat, terutama dalam hal pembelian senjata.

03 Juli 2019 / 10:00 WIB

RAPEN Kemendikbud Harus Obiang Target Yang Jelas

Anggota Komisi X DPR RI Tedy Supriatno mengkritik RAPEN Kemendikbud harus lebih jelas targetnya, terutama dalam hal peningkatan kualitas pendidikan.



15.34

Halaman

Pengaturan



DPR RI

Dikirim oleh Medsos

Kemarin pukul 08.33 · 🌐

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah terkait Anggaran Pemerataan Pendidikan Nasional



14

1 kali Dibagikan 282 Tayangan

Suka

Komentari

Bagikan

1.079 orang dijangkau >

Promosikan Postingan



DPR RI

Dikirim oleh Medsos

Kemarin pukul 08.29 · 🌐

[Infografis] 7 Fokus Isu Dalam Pembahasan RKUHP



DIRIM oleh Medsos
Kemarin pukul 08.47 · 🌐

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie terkait Penurunan Tarif Tiket Pesawat Maskapai Berbiaya Murah atau Low Cost Carrier (LCC) Secara Terbatas



14

2 Komentari 282 Tayangan

Suka

Komentari

Bagikan

1.140 orang dijangkau >

Promosikan Postingan

**DPR RI**

DIRIM oleh Medsos
Kemarin pukul 08.33 · 🌐

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah terkait Anggaran Pemerataan Pendidikan Nasional

**DPR RI**
@DPR_RI

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie terkait penurunan tarif tiket pesawat maskapai berbiaya murah atau low cost carrier (LCC) secara terbatas.

Terjemahkan Tweet



1.111 penayangan

23.19 · 05/07/19 · Twitter Media Studio

Tambahkan Tweet lain



Tweet

**DPR RI**
@DPR_RI

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna terkait Persiapan Pelaksanaan Ibadah Haji 1440 H / 2019 M. #Haji2019

[Terjemahkan Tweet](#)

308 penayangan

21.44 · 03/07/19 · [Twitter Media Studio](#)[Tambahkan Tweet lain](#)

Tweet

**DPR RI**
@DPR_RI

[VIDEO] Tanggapan Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna terkait penambahan kuota 10.000 untuk Jamaah Haji Indonesia. #Haji2019

[Terjemahkan Tweet](#)

261 penayangan

16.36 · 05/07/19 · [Twitter Media Studio](#)[Tambahkan Tweet lain](#)



Buletin

Parlementaria

nomor 1060/II/VII/2019 • Juli 2019

4TH
MENUJU
INDONESIA
JUNGGUL

Baleg Setujui RUU Penanggulangan Bencana Jadi Usul Inisiatif DPR



3 Pemerintah Harus
Siapkan Langkah Baru
Atur Tarif Tiket Pesawat



10 Komisi IV Apresiasi
Program SERASI di
Banyuasin



Pemerintah Harus Siapkan Langkah Baru **Atur Tarif Tiket Pesawat**

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menilai, pemerintah harus siap untuk memikirkan langkah baru guna mengatur tarif tiket penerbangan pesawat yang belakangan ini terus menjadi polemik yang tak kunjung usai. Ia meminta agar pemerintah dan *stakeholder* industri penerbangan tetap kondusif dan terus berkoordinasi hingga keadaan stabil.

Usai menerima kunjungan mahasiswa AMIK Bekasi di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7), Agus menginginkan ada keseimbangan antara bisnis industri penerbangan dengan para konsumen pengguna jasa penerbangan. Menurutnya pemerintah harus menyiapkan *grand design* untuk menyelesaikan dua prioritas tersebut.

"Pemerintah saya kira juga memiliki (tarif) batas atas dan batas bawah. Batasan inilah yang harus dikoordinasikan, karena kita tentunya tidak ingin BUMN juga merugi. Tetapi kita juga harus memberi keberpihakan

bahwa tarif tiket juga tidak boleh terlalu mahal. Ya inilah yang harus dikoordinasikan. Kemarin sudah ada kesepakatan-kesepakatan, namun tetap harus diperhatikan tema besarnya," analisa Agus.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi kinerja pemerintah yang tanggap menciptakan beberapa kesepakatan untuk memberi diskon sejumlah biaya operasional maskapai di tanah air dalam rapat koordinasi dengan *stakeholder*. Namun ia tetap mendorong pemerintah untuk menentukan sikap terkait langkah selanjutnya.

"Namun karena ini tahap penyesuaian, maka harus tetap dikoordinasikan, dan pemerintah juga tidak boleh bosan-bosannya mengingatkan para *stakeholder* karena bisnis penerbangan harus jalan, tetapi tarif tiket tentunya harus sesuai. Selanjutnya pemerintah harus didorong membentuk *grand theory* yang dapat mengatur keseimbangan industri penerbangan termasuk tarif tiket ini," tukas Agus.

■ er/sf



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Agus Hermanto. Foto: Arief/OD



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Darmayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.J Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virginne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.I.P., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumasari Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email: bag.penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Penduduk Bantaran Sungai Kahayan Harus Ditata



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau Sungai Kahayan, Palangka Raya. Foto: Azka/OD

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau penduduk yang tinggal di sepadan atau bantaran Sungai Kahayan, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disebutkan bahwa sepadan atau bantaran sungai sejauh 100 meter dari garis pasangnyanya air sungai.

“Mereka membuat rumah di atas sungai, sehingga ini harus ditata,” kata Herman di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau bantaran Sungai Kahayan, Palangka Raya, Kalteng, Selasa (2/7). Herman menambahkan, hal ini bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), guna mendata masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

”

MEREKA MEMBUAT RUMAH DI ATAS SUNGAI, SEHINGGA INI HARUS DITATA,”

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, masyarakat yang ada di bantaran sungai itu tidak bisa dipindahkan begitu saja, karena menyangkut hajat hidup mereka. Namun bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), ini juga menjadi kendala dalam program PTSL, guna menyelesaikan sertifikat dalam desa. Jika ada kendala permintaan masyarakat untuk mendapatkan legalitas dari keberadaan rumahnya, tentu ini harus turut dipikirkan.

“Penataan ini harus berbasiskan hajat hidup masyarakat yang berada di sini. Kalau dipindahkan lokasinya, mereka akan kehilangan pekerjaan. Ini harus melahirkan regulasi yang adaptif terhadap situasi masyarakat. Masih banyak sungai-sungai lainnya di sekitar Kalimantan. Pada sisi lain, masyarakat juga ingin mendapatkan sertifikat atas keberadaan rumah yang mereka tempati,” ungkap politisi dapil Jawa Barat itu.

Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalteng Pelopor, kunjungan Komisi II DPR RI ke Palangka Raya ini menjadi penyemangat baru bagi BPN dalam pelaksanaan PTSL di daerah. “Dengan kunjungan Komisi II DPR RI ini, mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa dilahirkan, seperti kasus hunian masyarakat di sepadan Sungai Kahayan ini,” tutur Pelopor. ■ azk/sf

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa mengatakan saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama pada era globalisasi saat ini, dimana masyarakat dituntut untuk *melek* akan teknologi informasi, sehingga akan mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Padang dan Ombudsman Sumatera Barat di Padang, Sumbar, Selasa (2/7). Dilanjutkan dengan mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pasar Raya Padang.

Ia menilai kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan, dengan pelayanan prima yang cepat dan mudah dijangkau. Selain itu, masyarakat juga perlu dibimbing dalam memanfaatkan teknologi informasi, mengingat keterbatasan pengetahuan akan teknologi menjadi salah satu tantangan dalam menumbuhkan antusias masyarakat terhadap pelayanan publik.

"Mal Pelayanan Publik ini terlihat cukup nyaman dan lengkap, serta tertata rapi. Secara sistem, kelihatannya bagus, tapi tentu ada hal yang perlu kita beri masukan. Berdasarkan kejadian di lapangan, MPP sangat rumit untuk dijangkau oleh masyarakat," ucap politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dwi Ria menjelaskan, kesulitan masyarakat untuk menjangkau

sistem yang ditawarkan MPP berdampak pada kurangnya antusias dalam memanfaatkan sistem pelayanan publik, baik secara *offline* maupun *online*. Untuk itu perlu sosialisasi agar masyarakat lebih familiar keberadaan MPP ini.

"Padahal fasilitas lengkap. Ada laporan bahwa masyarakat tidak tahu kalau tempat yang tinggi ini bisa dijangkau dengan kendaraan hingga lantai empat, diatas juga ada tempat parkir," pungkasnya. ■ dip/es

Anggota Komisi II DPR RI Dwi Ria Latifa. Foto: Dipa/OD



Penyelidik Jadi Penyidik di KPK Dipertanyakan

Rotasi pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dipertanyakan. Salah satunya soal penyelidik menjadi penyidik. Untuk mengalihkan penyelidik menjadi penyidik tidak tepat lewat instrumen rotasi pegawai, dibutuhkan proses seleksi ketat,

karena sangat jelas penyidik di KPK berasal dari Polri.

Persoalan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pimpinan KPK, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7). Sebelumnya, Pimpinan KPK menyampaikan ada rotasi pegawai di lingkungan KPK yang salah satunya menasar para penyelidik.

Arteria menjelaskan, menjadi penyidik butuh seleksi sendiri. Tidak bisa begitu saja penyelidik diangkat menjadi penyidik. "Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pimpinan KPK menyebut, rotasi itu dilakukan untuk perpindahan pegawai dengan penekanan pada fungsi yang sama. Jadi perpindahan penyelidik menjadi penyidik tidak tepat kalau dilakukan melalui instrument rotasi," tegasnya.

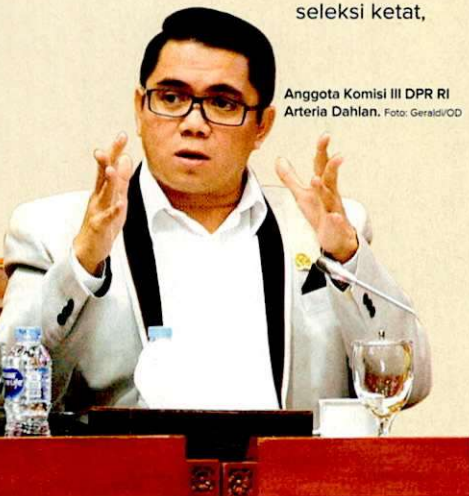
Penyelidik, sambung politisi PDI-Perjuangan itu, yang akan dijadikan penyidik berarti instrumennya adalah

alih tugas, bukan rotasi. Menjadi penyidik di KPK ada tingkatan eselon dan besaran gaji yang harus dibayar. Untuk itu, KPK wajib menggelar seleksi untuk merekrut penyidik walau dari internal pegawainya sendiri.

"Tidak bisa seseorang diangkat dari penyelidik menjadi penyidik tanpa seleksi. Untuk mutasi juga harus ada usulan dan seleksi. Bila tidak ada, itu melanggar Peraturan Pimpinan KPK. Hasilnya juga tidak sah. Apalagi definisi penyidik dan penyelidik sudah beda," urai Arteria, seraya menambahkan, "KPK mengangkat penyidik harus penyidik Polri, bukan yang lain."

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, di Undang-Undang KPK jelas bahwa KPK boleh mengangkat penyelidik dan penyidik. Untuk mengangkat penyidik dari pegawai internal KPK, sudah dibuat tatacara pengangkatan yang diatur dalam peraturan KPK dan Peraturan Pimpinan KPK. ■ mh/es

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan. Foto: Gerald/OD



Komisi IV Dorong Penguatan Hilirisasi Bagi Petani dan Nelayan



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV DPR RI mengunjungi UD Putri Laut. Foto: Singgih/DD

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong penguatan hilirisasi bagi petani maupun nelayan di Indonesia, yang mana potensi besar tersebut belum dimaksimalkan dengan baik. Ke depan hilirisasi bagi petani dan nelayan harus diperkuat sehingga mampu menguasai industri pangan.

“Kita mendorong agar diperkuat hilirisasi bagi petani maupun nelayan di Indonesia agar dapat menguasai industri pangan, karena itu menjadi jalan yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” ungkap Daniel mengunjungi Usaha Dagang (UD) Putri Laut, Tambakrejo, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/7).

Lebih lanjut, Daniel sampaikan bahwa potensi sumber daya alam

Indonesia sangat melimpah dan ia yakin Indonesia dapat menjadi kekuatan pangan dunia jika bahan baku dapat diolah sehingga memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“UD Putri Laut ini kan merupakan salah satu yang sudah berhasil dan sangat baik. Di Kota Semarang itu ada bandeng, cumi dan produk olahan laut maupun pertanian lainnya yang sudah mampu diolah sendiri, ke depan kita ingin lebih ditingkatkan lagi produksi dan kualitasnya agar mampu memasuki pasar ekspor,” ungkapnya.

Daniel, juga mengingatkan bahwa untuk melakukan ekspor juga tidak mudah, karena harus mampu memenuhi kebutuhan ekspor minimum. Dalam sebulan harus mampu memenuhi target ekspor. “Untuk bisa melakukan ekspor ini, biasanya jumlahnya tinggi, tidak hanya 100-200 kilogram saja. Misalnya,

”

KITA MENDORONG AGAR DIPERKUATNYA HILIRISASI BAGI PETANI MAUPUN NELAYAN DI INDONESIA AGAR DAPAT MENGUASAI INDUSTRI PANGAN

dalam sebulan harus bisa memenuhi permintaan lima *container* dan sifatnya *continue*,” ujar Daniel.

Politisi PKB ini berharap ke depan pemerintah lebih fokus dan meyakini hilirisasi untuk membangun industri pangan lima tahun ke depan, tentu dengan membangun sumber daya manusia sekaligus. “Kita juga mendorong agar pemerintah *men-support* industri pangan baik dalam segi pendanaan, peralatan serta kebutuhan lainnya yang mampu meningkatkan nilai produksi, termasuk juga di Kota Semarang, sehingga target ekspor pada 2020 mendatang bisa terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, pemilik UD Putri Laut Suhartono menyampaikan bahwa peralatan yang dimilikinya belum memadai pemenuhan kebutuhan ekspor. Ia berharap dukungan atau bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi usahanya dan rekan-rekannya.

Sebagaimana diketahui bahwa UD Putri Laut merupakan salah satu UPI (Unit Pengolahan Ikan) skala kecil menengah sejak 2002. Dalam proses pemasakan Bandeng Presto, UD Putri Laut menggunakan Panci *Low Temperature High Pressure Cooker* (LTHPC) yang mampu memuat 50 kilogram Bandeng dalam sekali masak. ■ skr/es

Maskapai Berbiaya Murah Belum Diberdayakan

Maskapai penerbangan berbiaya murah (*low-cost carrier*) selama ini belum diberdayakan Pemerintah Indonesia. Padahal keberadaannya sangat strategis ketika maskapai yang *economy full service* menaikkan harga tiketnya. Tiket pesawat bisa mahal, karena komponen pesawat dan fasilitas yang diberikannya memang mahal. Di sinilah maskapai berbiaya murah jadi pilihan masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal ini di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7). Sementara temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa ada kartel tiket pesawat, tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Bambang. Sebelumnya KPPU menemukan sumber masalah melonjaknya tiket pesawat, yaitu salah satunya temuan Dirut Garuda Indonesia yang merangkap

sebagai Komisaris Utama Sriwijaya Air.

"Yang kita persoalkan harusnya tarif maskapai *low-cost carrier*. Ketika KPPU masuk selama enam bulan, tidak menemukan apa pun. Dan baru terakhir ini menemukan jabatan rangkap Dirut Garuda jadi komisaris utama Sriwijaya Air. Walau ada jabatan rangkap, kan masih ada kompetitor lain, yaitu Lion Air. Apakah benar ada indikasi kartel. Kalau Dirut Garuda jadi komisaris di anak perusahaannya memang wajar," jelas politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, di luar negeri ada bandara khusus bagi perusahaan penerbangan berbiaya murah. Dari mulai *landing fee*, *airport tax*, *apron fee*, dan fasilitas lainnya diberikan tarif murah. Inilah alternatif penerbangan yang bisa diakses masyarakat bila tiket pesawat lainnya mahal. Sayangnya, perlakuan seperti itu tidak ada di Indonesia. Semua penerbangan

diberikan perlakuan sama. Inilah yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.

Ekonomi berbiaya tinggi juga terjadi ketika lalu lintas di udara dan lalu lintas di bandara begitu padat. Bahkan, di bandara-bandara besar seperti Medan, Denpasar, Jakarta, pesawat yang ingin mendarat harus berputar-putar dulu di udara menunggu antrian. Ini memboroskan bahan bakar. ■ mh/es



Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Foto: Alw/Man

PKH Harus Tepat Sasaran

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengingatkan agar Program Keluarga Harapan (PKH) didistribusikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga apa yang dicita-citakan melalui PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. PKH ini merupakan program

Kementerian Sosial yang menurut Ali Taher cukup efektif menekan angka kemiskinan, asalkan didukung dengan integritas pendamping yang bagus dan data yang akurat.

"Penerima PKH ini harus tepat sasaran, karena itu pendamping harus mendata sesuai dengan apa yang dilihat, dan jangan sampai mereka menyalahgunakan kekurangan masyarakat yang tidak memahami aspek pendataan, termasuk menggunakan kartu ATM penerima manfaat untuk kepentingan pribadi," ujar Ali Taher saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI mengunjungi Dinas Sosial Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Selasa, (2/7).

Politisi PAN ini menjelaskan bahwa kunjungan Komisi VIII ini dikategorikan sebagai kunjungan dengan spesifik dalam rangka melihat perjalanan PKH. Komisi VIII ingin melihat dari aspek pengawasan, dimana setelah DPR RI menggagalkan anggaran PKH setiap tahun, dan dana untuk PKH dari tahun ke tahun terus meningkat, baik itu jumlah, program maupun anggarannya.

"Tahun ini saja lebih dari Rp 35 triliun anggaran dikururkan untuk PKH, dan itu memerlukan kepastian bahwa program ini sampai di masyarakat sesuai *by name*, *by address*. Nah dengan demikian, maka salah satu studi kasusnya yang kita kunjungi adalah di Aceh," tutur Ali Taher.

Meski digambarkan masyarakat Aceh adalah masyarakat sangat religius, dan kaya, namun temuan di lapangan cukup banyak yang memerlukan PKH. Oleh karena itu intervensi program ini perlu diawasi agar bisa memberikan dampak bagi pelayanan publik yang sesungguhnya. "Karena tanggung jawab negara itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga DPR dan masyarakat secara luas," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Aceh Alhudri mengatakan, PKH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, yang pada waktunya akan mampu. Seperti keluarga penerima manfaat PKH di Aceh sudah banyak yang sudah dikeluarkan dari daftar penerima karena dianggap sudah mampu. ■ hs/es



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher. Foto: Hs/OD

Pemda Harus Hati-hati Keluarkan Izin Amdal

Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR menghimbau agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengeluarkan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, masih ditemukan perusahaan yang mendapat penilaian proper merah, yang berarti pengelolaan limbah lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Kita mengimbau kepada perusahaan yang masih mendapatkan proper merah, agar cepat memperbaiki. Karena kalau kerusakan lingkungan ini dibiarkan akan makin sangat berdampak untuk lingkungan, saya harap bisa mendapatkan proper biru jauh lebih baik,” kata Ihwan Datu Adam saat memimpin pertemuan Tim

Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Limbah dan Lingkungan dengan Bupati Morowali beserta jajaran dan sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7).

Selain itu, terkait adanya dampak limbah industri, Ihwan menyerahkan kepada perusahaan untuk segera menyelesaikan sehingga dampaknya tidak tersebar ke masyarakat. “Kita minta Pemda melakukan pengawasan dan kita di DPR RI melalui Panja Limbah dan Lingkungan akan terus memantau, semoga pemerintah daerah dan perusahaan bisa segera membereskan,” terang politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mengingatkan, agar instansi pertambangan patuh peringatan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Lingkungan Hidup, serta menaati UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penegakkan hukum harus tegas, baik itu sanksi administrasi maupun tuntutan pidana lingkungan harus dapat memberikan efek jera dalam menurunkan dampak kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Bupati Morowali Taslim mengatakan butuh dukungan dari pemerintah pusat terkait pembiayaan peralatan, khususnya untuk membenahi sampah di kawasan industri. Selain itu ia juga berkomentar terkait keberadaan perusahaan tambang yang banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Morowali. “Selama ini perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Morowali banyak memberikan manfaat, terutama banyak membuka lapangan pekerjaan,” pungkasnya. ■ jk/es



Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam saat Kunspek Panja Limbah dan Lingkungan dengan Bupati Morowali di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Senin (1/7). Foto: Jaka/mr

PPDB di Purworejo Hadapi Banyak Masalah



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto ketika memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Purworejo, Jateng. Foto: Chasbi/OD

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menemukan sejumlah permasalahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Purworejo. Pertama, masalah sarana dan prasarana yang belum seragam. Kedua, tenaga pendidik yang belum distandarkan dan minimnya jalur prestasi. Selain itu, ada pula kendala dari sekolah yang tidak difavoritkan yang minim pendaftar, sedangkan sekolah yang difavoritkan kebanjiran pendaftar.

"Tentunya ini semua menjadi masukan bagi kami dan akan kami rapatkan bersama dengan rekan-rekan yang melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dan Kendal, untuk sama-sama memberikan saran terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan agar ke depannya PPDB bisa berjalan dengan baik dan tidak merepotkan pihak

terkait," kata Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto ketika memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI ke Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (28/6).

Sebelumnya, Djoko menjelaskan, tujuan Komisi X DPR RI ke Purworejo untuk mendapatkan data empiris mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB Tahun 2019. Di waktu yang bersamaan, Komisi X DPR RI pun ingin mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengatasi kendala dan permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan.

"Sebagaimana kita ketahui sejak diimplementasikan kebijakan PPDB tahun 2017, kebijakan tersebut menuai berbagai masalah. Meskipun kebijakan PPDB bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun pada kenyataannya, implementasi

kebijakan PPDB selama tiga tahun terakhir selalu menimbulkan masalah," kata politisi Demokrat ini.

Perlu diketahui, lanjut Djoko, kebijakan PPDB telah mengalami tiga kali perbaikan, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017, lalu diubah menjadi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan yang terakhir Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.

Politisi dapil Jawa Tengah itu menambahkan, revisi Permendikbud terakhir dianggap telah menjawab persoalan yang ada yaitu dengan mengatur tiga jalur proses PPDB, yakni sistem zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Adapun prosentase kuota PPDB yaitu; zonasi (kuota 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen) dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

Dari tiga sistem tersebut, masih kata Djoko, zonasi masih menjadi kebijakan paling sensitif. Permasalahan seputar zonasi selalu muncul dalam pelaksanaan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 ini terjadi resistensi yang sangat tinggi ditengah masyarakat, sehingga Pemerintah mengeluarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

"Dalam Permendikbud terbaru tersebut memberikan pengecualian kepada daerah yang belum dapat melaksanakan PPDB secara optimal dengan memberikan perbedaan komposisi persentase tiga jalur proses PPDB, yaitu: zonasi (paling sedikit 80 persen), prestasi (paling banyak 15 persen), dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen)," jelas Djoko. ■ cas/sf

PPDB Zonasi Harus Diimbangi Pemerataan Kualitas Pendidikan

Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad menyoroti perlunya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan antar sekolah-sekolah di masyarakat dalam menyikapi polemik kebijakan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah berlangsung selama 3 tahun ini. Pasalnya ada kecenderungan untuk sekolah dengan jumlah penduduk sekitar yang padat akan mendapatkan jumlah siswa yang *overload*, namun akan terjadi kekurangan siswa untuk daerah dengan jumlah masyarakat sekitar yang sedikit.

“Beberapa sekolah ada yang kurang murid, tetapi ada juga sekolah yang terlalu banyak murid. Ini juga jadi catatan bersama, barangkali sekolah yang dekat perumahan yang padat itu pasti akan kebanyakan murid karena zonasi, tapi sekolah yang jauh dari perumahan akan kekurangan murid,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (27/6).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, begitu juga dengan sekolah yang berada di kota yang umumnya sekolah favorit pada akhirnya hanya diikuti oleh anak-anak kota. Oleh karena itu, jika permasalahan ini yang terjadi, maka harus ada pemerataan kualitas sekolah. Artinya sekolah yang favorit jangan hanya ada di kota tapi perlu ada di desa, terutama di dekat perumahan padat.

“Nanti kita akan bicarakan secara serius, yakni sarana dan prasarana. Artinya

pemerintah pusat perhatian untuk meningkatkan kualitas, sarana dan prasarana pendidikan. Sehingga tidak ada guru yang favorit yang bagus mengajar di sebuah SMA favorit yang hanya diikuti oleh anak-anak di lingkungan kota. Harus ada sarana dan pemerataan guru supaya proses penyidikan berimbang,” ujar Noor Achmad.

Usai berdiskusi dengan *stakeholder* terkait seperti Wakil Bupati Kendal, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, PGRI, sejumlah kepala sekolah negeri dan swasta, Noor Achmad berdiskusi tentang problematika sistem zonasi yang perlu ditinjau ulang. Seperti muncul pertanyaan manakala sistem zonasi diberlakukan apakah itu tidak membuat anak itu jadi apatis dan lemah sehingga tidak belajar karena ada optimisme akan diterima

di sekolah favorit karena sekolahnya dekat dengan rumah.

“Dari diskusi tersebut kemudian mereka mengusulkan agar ada tambahan dari jalur prestasi, karena jalur prestasi ini akan mengakibatkan sebuah kompetisi yang bagus di antara anak-anak tersebut,” ungkap legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.

Meski demikian, berdasarkan paparan yang dijelaskan ternyata hingga saat ini tak ada persoalan serius mengenai PPDB di Kabupaten Kendal. Hanya saja kedepannya, distribusi kualitas pendidikan harus segera

diratakan. “Saya apresiasi terhadap apa yang disampaikan teman-teman dari Kabupaten Kendal. Mereka sudah membuat analisa yang cukup bagus,” pungkas Noor Achmad.

■ hs/sf



Anggota Komisi X DPR RI Noor Achmad. Foto: Hendra/OD

Penerimaan Pajak Harus Optimal

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno menekankan optimalisasi

penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan harus terus dioptimalkan dari tahun ke tahun. Seperti yang diketahui, penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara di dalam menjalankan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

"Pada APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Juni 2019 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyampaikan perkembangan realisasi APBN 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, tercatat masih menunjukkan capaian positif dengan pendapatan negara yang mampu tumbuh 6,19 persen dan belanja negara meningkat 9,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," papar Soepriyatno saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR di Kantor Pajak Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (28/6).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, Kunspek Komisi XI DPR ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas terkait pelaksanaan tugas jajaran Kemenkeu di Provinsi Jatim, khususnya di bidang perpajakan. Mengingat pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting di Indonesia.

"Namun seiring dengan naiknya target penerimaan pajak, di beberapa provinsi terlihat adanya penurunan terhadap penerimaan pajak. Ini harus kita cari tahu penyebabnya, sehingga nanti

bisa disampaikan kepada Menkeu bagaimana cara mengatasinya agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi," jelas Soepriyatno.

Terakhir dirinya mengharapkan, agar pungutan pajak dan cukai yang dipungut dari masyarakat mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Jatim. "Saya kira ini penting menjadi masukan kita sehingga nantinya bisa disampaikan lebih lanjut saat rapat kerja dengan Kemenkeu dan Dirjen Pajak," tutur politisi Jawa Timur II itu.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II Lusiani menyatakan penerimaan pajak khususnya di wilayah Jatim II, target penerimaan mengalami peningkatan. Pada 2019 Bea Cukai Jatim II ditargetkan Rp 42,6 triliun, tumbuh sebesar 7,07 persen dari target 2018.

"Peningkatan penerimaan pada tahun 2018 didorong oleh peningkatan produksi hasil tembakau di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim II. Salah satu faktor pendorongnya adalah semakin berkurangnya peredaran rokok ilegal," jelasnya.

Untuk itu melalui kunspek Komisi XI DPR ke Jatim, dirinya berharap ada bantuan dan dukungan dari DPR terutama dalam bidang keberpihakan melalui aturan perundang-undangan. "Tentunya seperti yang kita tahu Kanwil ini adalah pelaksana dari aturan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan DPR," imbuhnya.

Kunspek Komisi XI turut diikuti oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, (F-P. Demokrat) dan sejumlah anggota Komisi XI DPR lain diantaranya, Andreas Eddy Susetyo, Eva Kusuma Sundari, Indah Kurnia, Rai Wirajaya (F-PDIP), Muhammad Misbakhun, Muhammad Nur Purnamasidi, Sarmuji (F-P. Golkar), Sumail Abdullah (F-P Gerindra), Siti Mufattahah (F.P.

Demokrat) dan Junaidi Auly (F-PKS). ■ tra/es

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno. Foto: Titara/OD



BAKN Dorong Evaluasi Tata Kelola Dana Desa



Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo dan Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar. Foto: Erman/PR

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta pemerintah segera mengevaluasi tata kelola Dana Desa dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mengingat, adanya tren peningkatan Dana Desa setiap tahun, namun tata kelola, pembinaan serta pengawasan terkait Dana Desa masih bermasalah.

Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Sinergi Laporan DPR dan Telaah BPK soal Dana Desa dan LKPP 2014-2018?” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6). Hadir sebagai narasumber, Ketua BAKN Andreas Eddy Susetyo, Wakil Ketua BAKN Willgo Zainar, serta Anggota BAKN Achmad Hatari, Sartono Hutomo dan Junaidi Auly.

Andreas mengungkapkan, selama tahun 2015-2019, Dana Desa telah direalisasikan sebesar Rp 256,9 triliun dan mengalami tren peningkatan. Namun, masih ditemukan sejumlah permasalahan terkait pengawasan Dana

Desa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018, BPK menemukan belum adanya sistem pengawasan atas pengelolaan Dana Desa.

Diantaranya, Kemendagri belum merancang sistem pengawasan pengelolaan Dana Desa, belum adanya sistem aplikasi untuk monitoring pengelolaan Dana Desa, belum ditetapkannya standar Akuntansi Pemerintah Desa. Belum lagi, perencanaan tidak mempertimbangkan perencanaan pembangunan desa dan prioritas penggunaan Dana Desa, dan BUMDes belum dapat memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian desa.

Andreas juga mempermasalahkan ketidakandalan data Dana Desa, akibat dualisme indeks pembangunan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPM). Menyikapi permasalahan itu, BAKN menyarankan kepada Pemerintah untuk mengoptimalkan perannya melalui Kemendagri, Kementerian Desa

PDPT, dan Kementerian Keuangan dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa di tingkat Pemerintah.

Selain itu, masih kata politisi F-PDI Perjuangan ini, untuk penguatan sinergitas dan sinkronisasi regulasi, BAKN mendorong ditetapkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kementerian Desa dan PDPT.

Sementara itu, Anggota BAKN Achmad Hatari menuturkan Dana Desa menjadi isu yang mengemuka saat ini. Karenanya, pemerintah segera melakukan evaluasi sehingga Dana Desa bisa menjadi *value of money*. “Jadi perlu dikritisi apakah efektif, efisien dan ekonomis. Tiga ‘E’ inilah yang pemerintah harus terus lakukan konsolidasi,” jelas politisi F-NasDem ini.

Wakil Ketua BAKN Willgo Zainar berharap Pemerintah lebih mengedepankan unsur pembinaan dan pengawasan Dana Desa, ketimbang unsur penindakan. Adapun, MoU antara Kementerian yang menaungi Dana Desa diharapkan ada kesamaan pemahaman. “Artinya, tidak serta merta setiap ada kasus harus dilanjutkan dalam proses hukum,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, jika memang ada peluang untuk melakukan perbaikan administrasi, maka dibuka. Karena tidak sedikit Kepala Desa yang menjadi khawatir tersandung persoalan hukum dalam menggunakan Dana Desa. “Bahkan, ada sebagian Kades yang berpikir lebih baik tidak ada Dana Desa. Namun, karena Dana Desa merupakan amanah UU Desa sehingga harus tetap dilaksanakan. Cuma memang intensitas pembinaan Kades ini yang harus dilakukan,” tandasnya. ■ ann/sf

Fasilitas RS Kasih Ibu Bali Cukup Memadai



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti beserta Anggota BURT meninjau fasilitas RS Kasih Ibu Bali. Foto: EkaHR

Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menilai fasilitas dan kesiapan Rumah Sakit (RS) Kasih Ibu, Denpasar, Bali, cukup bagus dan memadai. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, dengan berbagai fasilitas yang dimiliki, RS Kasih Ibu dirasa cukup menjadi rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya.

"Rumah sakit ini bisa menjadi rujukan yang memadai. Ruangan, peralatan, jumlah dokter yang lebih dari seratus, selalu siap. Jika Denpasar banyak turis, dan ada pasien dari lokal, maka yang diprioritaskan adalah orang Indonesia. Ini adalah salah satu rumah sakit yang direkomendasikan dari kita juga untuk pejabat negara dan masyarakat," kata

Novita saat pertemuan Tim Kunker BURT DPR RI dengan Direktur RS Kasih Ibu Denpasar beserta jajarannya, di Bali, Selasa (25/6).

Politisi Partai Gerindra itu dalam sambutannya mengatakan, dalam pelaksanaan program Jamkestama ini, ada masukan dari Anggota DPR RI terkait pelayanan yang diberikan RS *provider* PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), sebagai operator Jamkestama. Salah satu kasus yang sering terjadi, Anggota DPR RI mendapat pelayanan yang kurang memadai. Permasalahan lainnya, beberapa RS *provider* belum memiliki sarana untuk melaksanakan pelayanan berstandar VVIP.

Dari hasil peninjauan, Anggota BURT DPR RI Ansory Siregar menilai RS Kasih Ibu sudah cukup besar, dengan adanya 27 sub spesialisasi

dan sudah bekerjasama dengan hampir 200 asuransi. Namun ia mempertanyakan pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya kewajiban RS untuk menerima pasien yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Termasuk pelayanan kepada warga lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Sementara itu, Direktur RS Kasih Ibu Bali I Wayan Kesumadana mengatakan, RS yang dipimpinnya menyediakan sarana dan prasarana yang canggih. "Kami punya dokter spesialis, dokter bedah, kemudian spesialis penyakit dalam. Ada 104 dokter spesialis. Kemudian karyawan kami ada 328 orang. Fasilitas yang kami miliki ada UGD, ruang bersalin, poliklinik, apotek, ICU, ruangan bayi, dan kamar operasi dengan fasilitas yang canggih," papar Wayan. ■ hr/sf

LAMPIRAN MILESTONE 9

Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Isu di Media Internal DPR RI
1 – 5 Juli 2019

1. Rapat Agenda Setting Jumat, 28 Juni 2019 menetapkan 3 (tiga) isu isu utama yang akan dikelola dan diolah menjadi isu utama di seluruh media internal DPR yaitu media cetak, media social dan website, TV Parlemen dan Radio Parlemen, yaitu :
 - a. Pemerintah meminta maskapai LCC untuk menurunkan harga ticket per 1 Juli 2019,
 - b. Persiapan pelaksanaan haji 2019 terkait penambahan quota 10.000 jemaah haji, dan
 - c. Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Media internal, sebagaimana keputusan rapat agenda setting akan memfokuskan, antara lain :
 - a. Fokus isu harga tiket pesawat adalah pada :
 - Dampaknya ke masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia timur yang lebih banyak menggunakan pesawat.
 - Dampaknya pada dunia usaha dan pariwisata.
 - Belum adanya standarisasi harga ticket pesawat.
 - Beban biaya maskapai LCC dan premier sama.
 - b. Fokus isu Persiapan pelaksanaan haji 2020 adalah pada :
 - Kesiapan Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH)
 - Persiapan sarana dan prasarana bagi jamaah Indonesia di Mekah
 - Pengawasan pembagian penambahan quota 10.000 ke seluruh Indonesia terutama bagi Jamaah Reguler dan Lansia
 - c. Fokus isu Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 adalah pada :
 - Program pembangunan kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada peningkatan kualitas manusia Indonesia.
 - Roadmap anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.
 - Sasaran Anggaran Pendidikan.
3. Project leader, setiap hari mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan fokus/angle untuk peliputan atas isu hasil agenda setting kepada redaksi dan redaktur sebagaimana yang telah ditetapkan, agar dalam seminggu pemberitaannya tetap ada di media internal.

4. Berdasarkan hasil monitoring, semua media internal menyuarakan isu yang sama. Implementasi untuk minggu ini dinilai sukses namun tidak maksimal.
5. Tim Reporter menghadapi kendala yaitu Komisi-Komisi yang membidangi ketiga isu tersebut sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah pada Selasa – Kamis, 2-4 Juli 2019, sehingga sulit untuk menghubungi anggota Dewan yang menjadi narasumber untuk melakukan wawancara terkait isu tersebut terutama bagi TV Parlemen yang memerlukan visual/gambar narasumber.
6. Kendala tersebut dapat diatasi dengan koordinasi dan komunikasi dengan Tim yang bertugas untuk menitipkan ketiga isu tersebut kepada Tim Reporter yang ditugaskan ikut meliput kegiatan Kunjungan Komisi-Komisi ke daerah.

Jakarta, 5 Juli 2019

LAMPIRAN DUKUNGAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.**
Jabatan : Ketua DPR RI
Lembaga : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Sdri. **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Kamis 11 Juli 2019



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FERDIANSYAH, S.E., M.M.**

Jabatan : Anggota DPR RI

Fraksi : Partai Golongan Karya

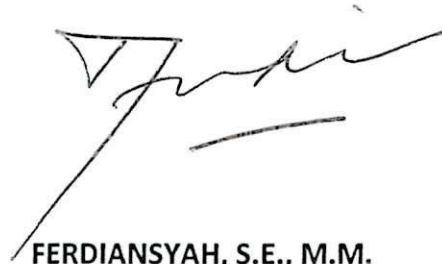
Instansi : DPR RI

Menyatakan mengapresiasi kegiatan Proyek Perubahan dari Saudari Suciati Jabatan Kepala Sub Analis Media dengan judul “Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu”.

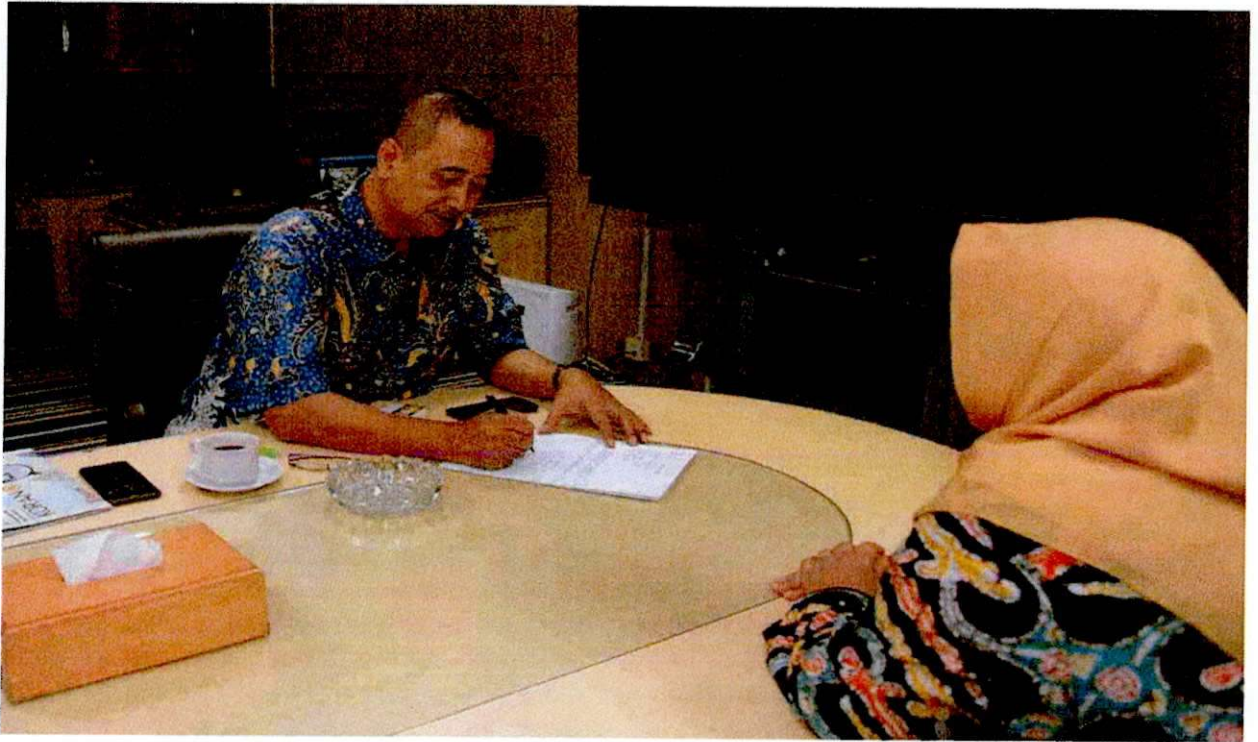
Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 5 Juli 2019-07-05

Yang membuat pernyataan,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.



Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Ferdiansyah mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Jumat 5 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Iskandar
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati, S.Sos.** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media Judul **“Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu”**.

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan



Indra Iskandar
NIP. 19661114 199703 1 001



Sekretaris Jenderal dan Badan Kehalian DPR RI Indra Iskandar mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Senin 20 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. Damayanti, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
Unit Kerja : Deputi Bidang Persidangan
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Dra. Damayanti, M.Si.

NIP. 196202111987032002



Deputi Perisdangan Sekjen dan BK DPR RI Damayanti mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Selasa 21 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

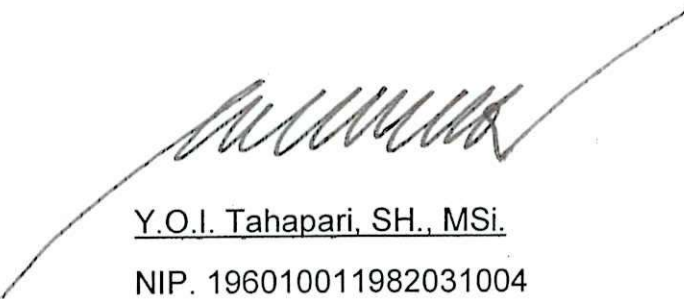
Nama : Y.O.I Tahapari, SH., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

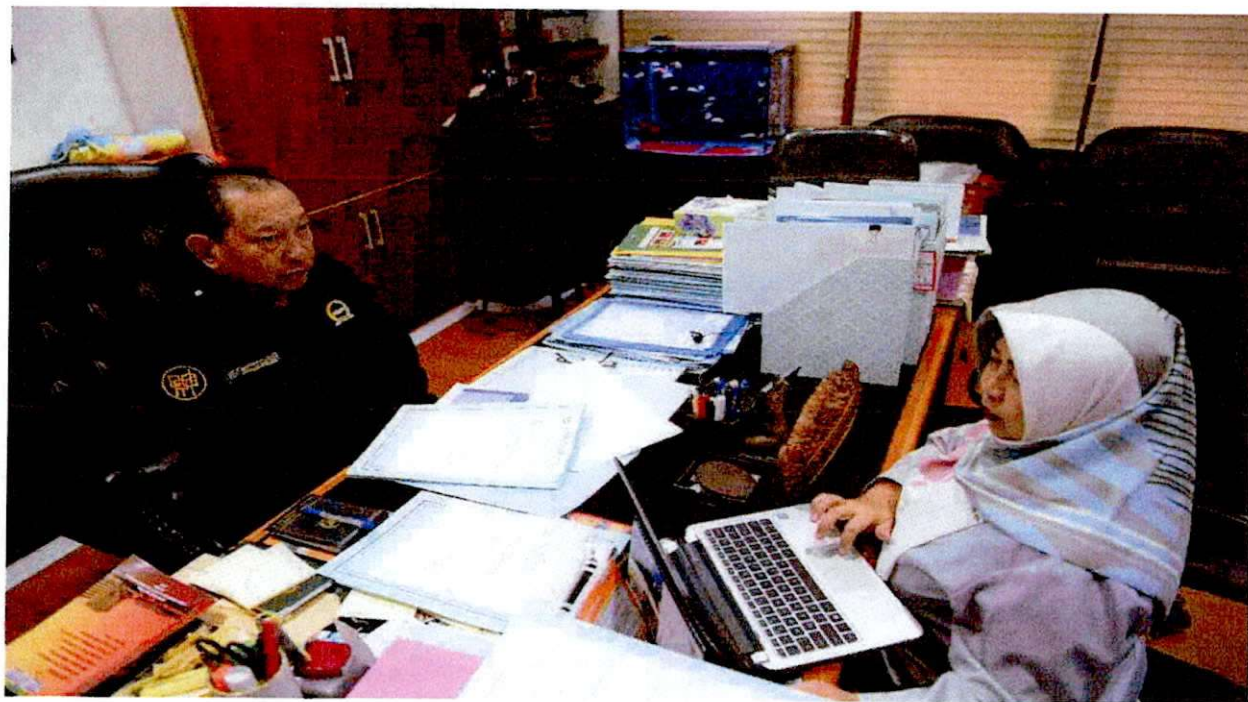
Jakarta, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Y.O.I. Tahapari, SH., MSi.

NIP. 196010011982031004



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen sebagai Promotor Y.O.I Tahapari mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Kamis 16 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Drs. Mohammad Djazuli, M.Si.

NIP. 196510311994031002



Dukungan Menthor, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohamad Djazuli sekaligus sebagai Promotor Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Kamis 16 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Media Cetak
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Sugeng Irianto, S.Sos., M.A.

NIP. 198105032005021002

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

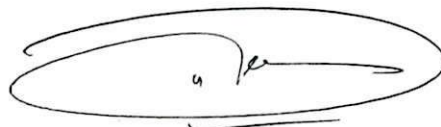
Nama : Nita Juwita, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Media Sosial dan Website
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Nita Juwita, S.Sos.

NIP. 198110182005022001



Dukungan Kepala Subbagian Media Cetak Sugeng Irianto dan Kepala Subbagian Media Sosial pada Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Kamis 16 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irfan S.Sos, MMSI.
Jabatan : Kepala Bagian Televisi dan Radio Parlemen
Unit Kerja : Bagian Televisi dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Irfan S.Sos, MMSI.

NIP. 196509101987021006

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bayu Setiadi, S.IP.
Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi
Unit Kerja : Bagian Televisi dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Bayu Setiadi, S.IP.

NIP. 197903262005021002



Kepala Bagian TV dan Radio Parlemen Irfan sebagai Promotor mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Jumat 17 Mei 2019



Dukungan dari Kepala Subbagian Program dan Produksi TV Parlemen Bayu Setiadi mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Jumat 17 Mei 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

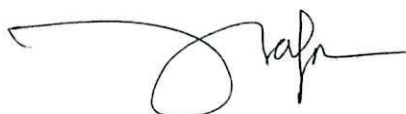
Nama : Ahyar Tibi
Jabatan : Redaktur Analis Media
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Ahyar Tibi

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.
Jabatan : Analis Media
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom.

NIP. 199410182018012003

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sunarya
Jabatan : Analis Media
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Sunarya

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Rizki Nugroho
Jabatan : Analis Media
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Mohammad Rizki Nugroho

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Harfa

Jabatan : Analis Media

Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahmi Harfa', written over a faint circular stamp.

Fahmi Harfa

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Safitri Restu Widyowati
Jabatan : Analis Media
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Safitri Restu Widyowati

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Deprisa Citra Akbari
Jabatan : Analis Media
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Deprisa Citra Akbari

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Larissa Amanda Indiaty
Jabatan : Analis Media
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Larissa Amanda Indiaty

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Singgih Kinanti Rimbani

Jabatan : Redaktur Media Sosial

Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Singgih Kinanti Rimbani

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fajar Suryanto

Jabatan : Reporter Media Sosial

Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial


Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Fajar Suryanto

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Riyan Hidayat

Jabatan : Reporter Media Sosial

Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Riyan Hidayat

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dipa Natalio
Jabatan : Reporter Media Sosial
Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Dipa Natalio

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tiara Annisa

Jabatan : Reporter Media Sosial

Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Tiara Annisa

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nafisa Hanum

Jabatan : Reporter Media Sosial

Unit Kerja : Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Nafisa Hanum

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

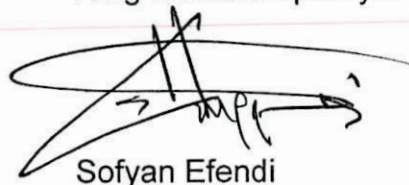
Nama : Sofyan Efendi
Jabatan : Redaktur Website dan Buletin Parlementaria
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Sofyan Efendi

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Rahayu Setyowati
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Rahayu Setyowati, S.Sos.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Surahmat Eko Budi S.
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Surahmat Eko Budi S.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ria Nur Mega

Jabatan : Reporter

Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Ria Nur Mega

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Virgiane Meiske Patuli
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Virgiane Meiske Patuli

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hendra Sunandar

Jabatan : Reporter

Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Hendra Sunandar

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Puntho Pranowo Wienahyu

Jabatan : Reporter

Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Puntho Pranowo Wienahyu

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

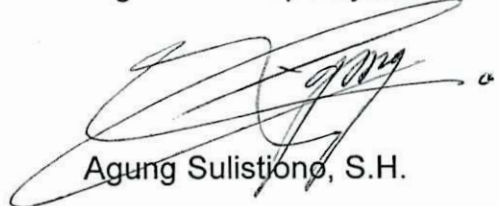
Nama : Agung Sulistiono, S.H.
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Agung Sulistiono, S.H.

NIP. 197910222005021002

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Devi Iriandi
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Devi Iriandi



Dukungan dari Redaktur dan Reporter Media Cetak, Media Sosial, serta dari Seluruh Staf Analis Media pada Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Senin, 8 Juli 2019.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Minarni, S.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Minarni, S.H.

NIP. 196506201993022001

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.
Jabatan : Pranata Humas Pertama
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Leidena Sekar Negari, S.I.Kom.

NIP. 198812172014022003

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom
Jabatan : Pranata Humas Pertama
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Agraha Dwita Sulistyajati, S.I.Kom

NIP. 199104262018011003



Dukungan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setjen dan BK DPR RI Minarni pada Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Kamis, 11 Juli 2019



Pranata Humas Sekjen dan BK DPR RI mendukung Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Kamis, 11 Juli 2019

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

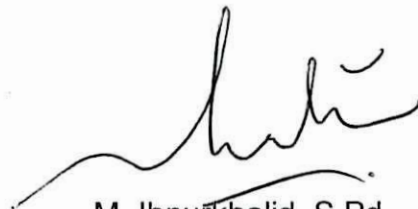
Nama : M. Ibnurkhalid, S.Pd.
Jabatan : Kepala Subbagian Radio
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



M. Ibnurkhalid, S.Pd.

NIP. 196802271997031002

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ratna Hapsari

Jabatan : Redaksi Radio Parlemen

Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Ratna Hapsari

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edo

Jabatan : Reporter Radio

Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Edo

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

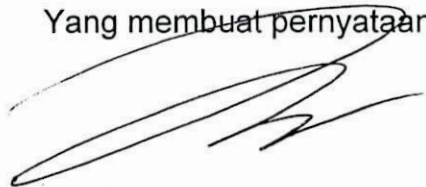
Nama : Farkhan Fajar Ilhami
Jabatan : Redaksi TV Parlemen
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Farkhan Fajar Ilhami

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Marlina Tampubolon
Jabatan : Redaksi TV Parlemen
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



M. Marlina Tampubolon

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Helmi Darmawan
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Helmi Darmawan

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Fatikha Sheila Hanoum
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Fatikha Sheila Hanoum

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

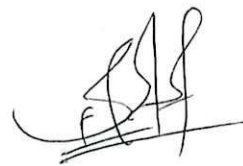
Nama : SIFA FAUZIAH
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



SIFA FAUZIAH

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Habibi Mahabbah*
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,


Habibi Mahabbah

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AMMYTA PRADITA W
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



AMMYTA PRADITA.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALDA GUSTARI

Jabatan : Reporter

Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,


ALDA GUSTARI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Esty Kartika Zahriyah
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Esty Kartika Zahriyah

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ILA RACHMAYATI

Jabatan : Reporter

Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



ILA RACHMAYATI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mahir Pratama
Jabatan : Reporter
Unit Kerja : Bagian TV dan Radio Parlemen
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan **Suciati** Jabatan Kepala Sub Bagian Analis Media dengan judul "Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan Parlemen melalui Penetapan Isu".

Demikian surat pernyataan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



MAHIR PRATAMA



Dukungan dari Kepala Subabgian Radio Parlemen M. Ibnur Khalid dan Redaksi/Reporter Radio Parlemen, pada Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA) Kamis, 11 Juli 2019









Dukungan Redaksi dan Reporter TV Parlemen pada Proyek Perubahan Optimalisasi Kegiatan Agenda Setting Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pemberitaan di Biro Pemberitaan melalui Penetapan Isu (OPTIK SETIA), Jumat 12 Juli 2019.

LAMPIRAN COACHING

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA COACH DENGAN PESERTA
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN II TAHUN 2019

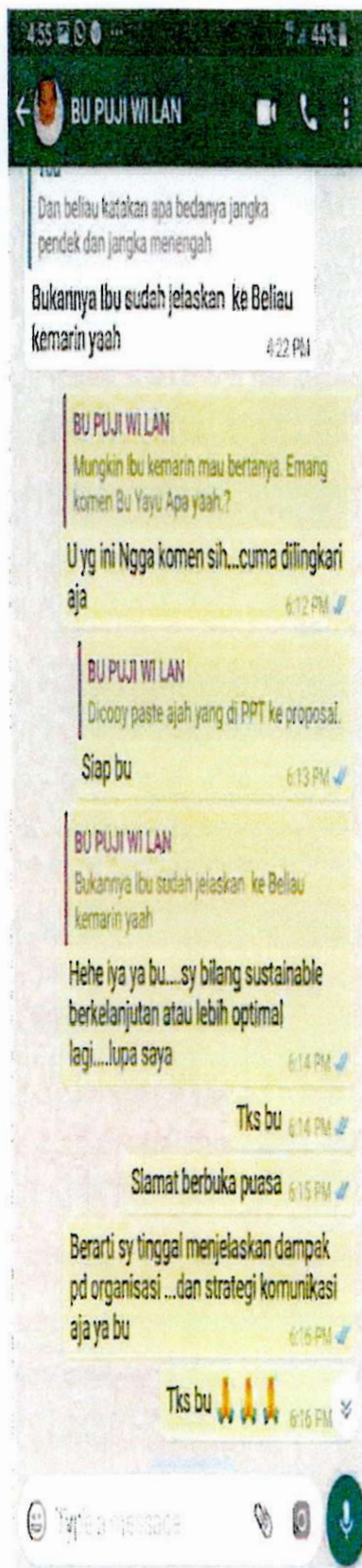
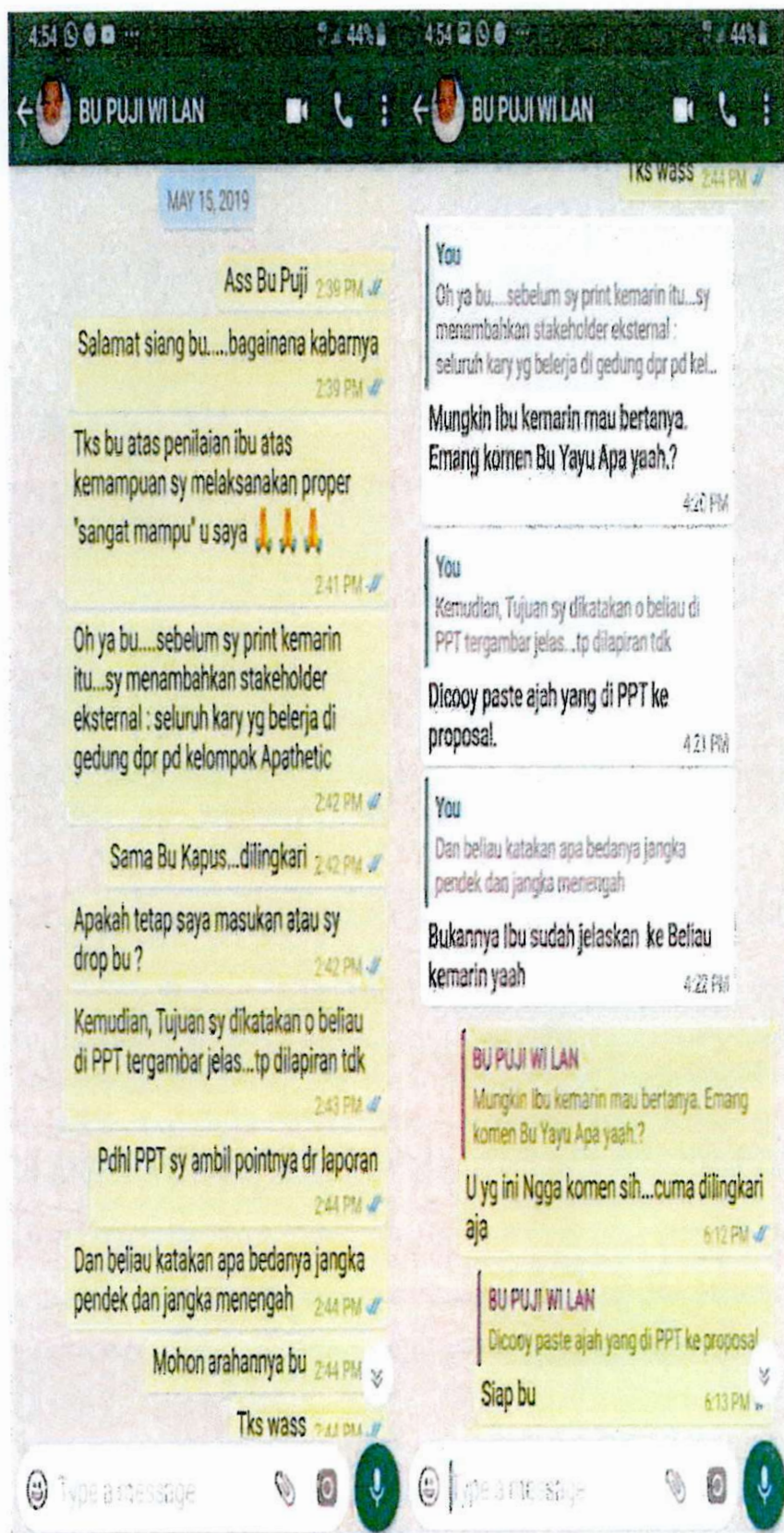
Nama : Suciati, S.Sos. Nama Coach : Dra. Puji Hastuti, M.Pd
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
NIP. : 197207201994032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Peserta
1	15 Mei 2019	Koreksi Seminar RPT	WA		
2	25 Juni 2019	Progres Report Proper	WA Grup Kelompok		
3	13 Juli 2019	Proper final	WA	"Menambah Fakta" "Laporan Pelaksanaan" pel. kea. Anggaran	
4	18 Juli 2019	Materi PPT	WA		
5	20 Juli 2019	- Koreksi Coach - Laporan PP - PPT Final	WA		
6	22 Juli 2019	Materi Bab III	Total Mura	Jelas Realisasi & Capaianannya	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH



5:00

43%



Kelompok 1 Pim4 2019

BU PUJI, Cecep, Efi, Ifana, Murni, Pa, Rojal...



Bapakbtelah menyampaikan Progress
Report pelaksanaan PP Bapak sampai deng...

Baik bu.. nanti saya coba koreksi... terima
kasih

4:12 AM

Weda BUMN



LaporanProper_Weda_Co...



XLSX

9:37 AM

terlampir progress report yang sudah di
koreksi. terima kasih

9:38 AM



Laporan PP Suci.docx

DOCX

12:11 PM

You

Laporan PP Suci.docx

Assalamualaikum ibu....terlampir
Laporan PP Suci, tks

12:12 PM

JUNE 26, 2019

Efi K3



milestone JK Pendek.docx



DOCX

7:03 AM

Assalamu'alaikum bu, terlampir laporan
PP Effie

7:03 AM

Terima kasih

7:04 AM



Type a message





BU PUJI WI LAN



JULY 12, 2019

Waalaikumussalam Warahmatullahi
Wabarakaatuh.
Waah WA nya terdorong ke bawah..
Waaah Bu.. Minggu depan full coaching
Pim III LAN.. Dan Kemendikbud Bu.
Sepertinya langsung Senin Selasa yaah
Bu.

8:35 PM

Kalau Ada yang didiskusikan bisa via WA
Bu.
Skr saya OTW Luar kota .. Ada acara
keluarga.. Bu

8:40 PM

JULY 13, 2019

Siap bu 7:02 AM ✓✓



Proper Suci.docx

DOCX

9:47 PM ✓✓

Assallammualaikum Ibu Puji....selamat
malam....maaf mengganggu

9:48 PM ✓✓

Ini Proper saya mohon koreksinya, tks



9:48 PM ✓✓

JULY 18, 2019

Ass Bu Puji 11:47 PM

Maaf menqqanqqu....yg dinasukan



Type a message



Media



JULY 18, 2019

Ass Bu Puji 11:47 PM ✓✓

Maaf mengganggu....yg dinasukan
dalam slide Power Point apa aja ya bu

11:47 PM ✓✓

Judul, Tujuan, Manfaat, dan Capaian
Milestone

11:47 PM ✓✓

Apakah window dimasukkan lagi bu ?

11:48 PM ✓✓

Kemudian kesimpulan...apakah
dimasukkan juga ?

11:48 PM ✓✓

JULY 19, 2019

Nanti yah Bu. Sdng OTW Kemendikbud..
Mau seminar LATSAR.. Agak kesiangan
saya. Mulainya pkl 07.30.. ini msh jauh.



7:20 AM

Siap bu tks 7:27 AM ✓✓

YESTERDAY

Terlampir saya sampaikan kembali
Dokumen Pelaksanaan PP yang sudah
saya beri catatan

6:55 AM



Catatan Puji Proper Suci...



Type a message





BU PUJI WI LAN



YESTERDAY

Terlampir saya sampaikan kembali
Dokumen Pelaksanaan PP yang sudah
saya beri catatan

6:55 AM



Catatan Puji Proper Suci...

DOCX

6:56 AM

Siap tks bu 10:14 AM ✓✓

Sy buka dulu 10:14 AM ✓✓

Ibuuu....u di PPT apa saja ya bu

10:17 AM ✓✓



Proyek Perubahan

Berkas PDF - 5.000.000



Reduksi Biaya Kebutuhan Anggaran



PPT Proper Juli.pptx

PPTX

10:18 AM ✓✓

Ini PPT saya....mohon korekei 10:18 AM ✓✓

Mohon koreksi ibu....tkns 🙏🙏🙏

10:31 AM ✓✓

Sedang pergi yaah Bu. Kalau pakai HP
gak bisa. Happy weekend Bu.

3:41 PM

You deleted this message 3:59 PM



Type a message



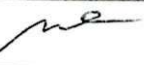

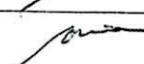


Coaching tatap muka, membahas materi Bab III Capaian Proyek Perubahan, Senin, 22 Juli 2019 di Ruang Kelas.

LAMPIRAN MENTORING

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN II TAHUN 2019

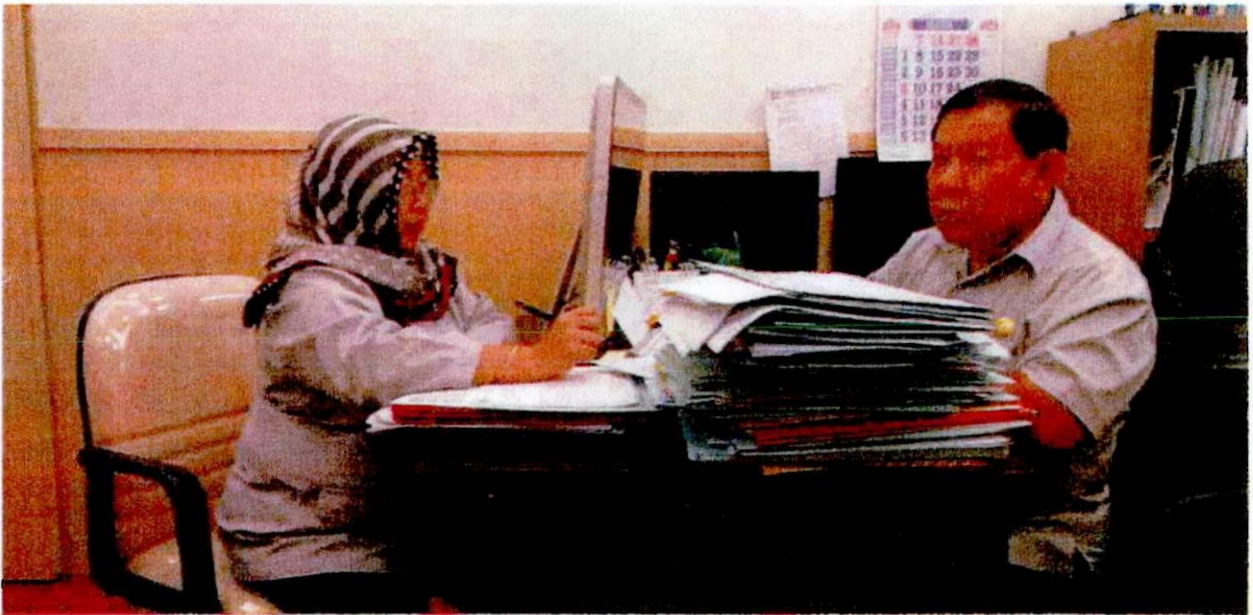
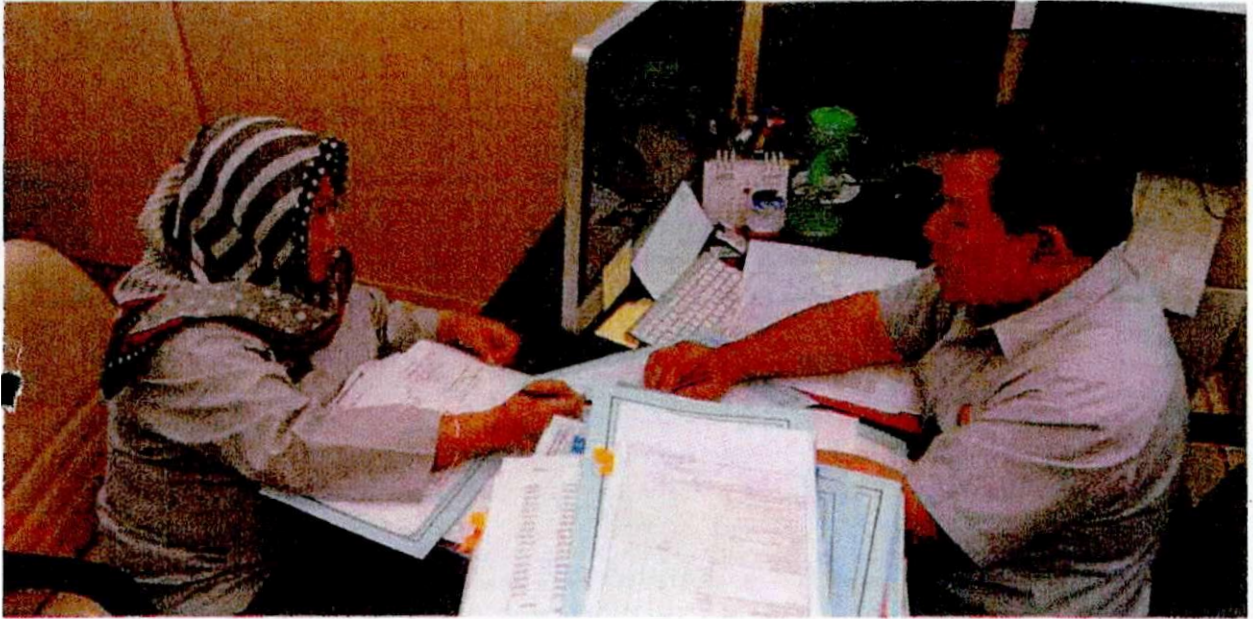
Nama : Suciati, S.Sos. Nama Coach : Dra. Puji Hastuti, M.Pd
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
NIP. : 197207201994032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	16 Mei 2019	Surat Tugas Tim Persiapan Sosialisasi Dukungan Propon	Tatap Muka	Surat Tugas Tim di TTD Karo	
2	17 Juni 2019	Persiapan Uji Coba (1)	Tatap Muka	- Selektif Isu - Komunikasi - Koordinasi	
3	4 Juli 2019	Evaluasi & Laporan Rekomendasi Propon	Tatap Muka	- Rekomendasi Agenda Kerja	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor



Mentoring, membahas siapa saja yang menjadi Tim Efektif, Persiapan Sosialisasi dan minta Dukungan Mentor, Kamis, 16 Mei 2019.



Mentoring, membahas persiapan uji coba 1 agenda setting dan materi apa saja yang akan dibahas di agenda setting, Senin, 17 Juni 2019



Mentoring, membahas Evaluasi kegiatan agenda setting, laporan Proyek Perubahan dan materi rekomendasi pada bab penutup, Kamis, 4 Juli 2019